



MONOGRAF



PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN MEMANFAATKAN BONUS DEMOGRAFI DI PROVINSI **NUSA TENGGARA TIMUR**

WILSON RAJAGUKGUK

MONOGRAF
PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN
MEMANFAATKAN BONUS
DEMOGRAFI DI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR

Penulis:

Wilson Rajagukguk



UKI Press
2021

MONOGRAF
PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN
MEMANFAATKAN BONUS
DEMOGRAFI DI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR

Penulis:

Wilson Rajagukguk

Editor:

Dr. Indri Jatmoko, S.Si., MM

Penerbit: UKI Press

Redaksi: Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta 13630

Telp. (021) 8092425

Anggota IKAPI

Anggota APPTI

Cetakan I Jakarta: UKI Press, 2021

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.



UKI Press
2021

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Kata Pengantar	3
BAB 1. PENDAHULUAN	4
BAB 2. SITUASI DEMOGRAFI DAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	7
2.1. Proses Demografis	7
2.2. Keluaran Demografis	9
2.3. Situasi dan Kondisi Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	12
BAB 3 SITUASI KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	13
3.1. Partisipasi dan Tingkat Pengangguran serta situasi Angkatan Kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur	13
3.2. Status Pekerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	17
3.3. Investasi dan Kesempatan Kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur	19
3.4. Permasalahan ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	22
BAB 4. TIPOLOGI BONUS DEMOGRAFI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT	25
4.1. Transisi Demografis di Indonesia	25
4.2. Pembangunan Bidang Kependudukan di Kabupaten Manggarai Barat	30
4.3. Kebijakan terkait data kependudukan dan Kependudukan	33
BAB 5: SITUASI DAN PERMASALAHAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	36
5.1. Dinamika Kependudukan dan Pembangunan	36
5.2. Situasi Keluaran Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	39
5.3. Situasi Proses dan Keluaran Demografis di Provinsi Nusa Tenggara Timur	42
5.4. Situasi Keluarga Berencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur	42
5.5. Permasalahan Kependudukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	45
5 6. Permasalahan Keluarga Berencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur	47

BAB 6. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMANFAATAN BONUS DEMOGRAFI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	52
6.1. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Menuai Bonus Demografi	52
6.2. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Penduduk Usia Produktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur	55
 BAB 7 PENUTUP	 58
 DAFTAR PUSTAKA	 62

KATA PENGANTAR

Indonesia mengenal sejumlah daerah yang mempunyai ketimpangan yang besar antar wilayah. Daerah yang lebih maju umumnya terdapat di wilayah Indonesia Bagian Barat. Salah satu wilayah yang tertinggal dalam pembangunan dan kemajuan ekonomi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sejumlah variabel pembangunan menunjukkan ketimpangan di Provinsi NTT antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pencapaian rata-rata lama sekolah, prevalensi stunting, angka harapan hidup, NEM SD hingga SMA, PDB per kapita, dan parameter demografis lainnya yang berujung pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kesejahteraan penduduk.

Buku yang kami beri judul “**Pertumbuhan Ekonomi dengan memanfaatkan Bonus Demografi di Provinsi Nusa Tenggara Timur**” ditujukan untuk memberi sumbangan kepada pengambil keputusan bagaimana dan dari mana membangun Provinsi NTT. Pembangunan di Provinsi NTT dapat dilakukan melalui sejumlah saluran. Salah satu adalah dengan memanfaatkan penduduk usia produktif sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan adalah dari dan untuk penduduk. Penduduk merupakan sumber daya yang utama (*ultimate resource*) pada pembangunan. Membangun sebuah ekonomi adalah dengan membangun penduduknya dan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi penduduk hingga menjadi sumber daya utama dan mesin pertumbuhan utama.

Doa dan harapan buku ini dapat memberi sumbangan untuk kemajuan Provinsi NTT khususnya dan Indonesia umumnya.

Jakarta, Januari 2023

Penulis,

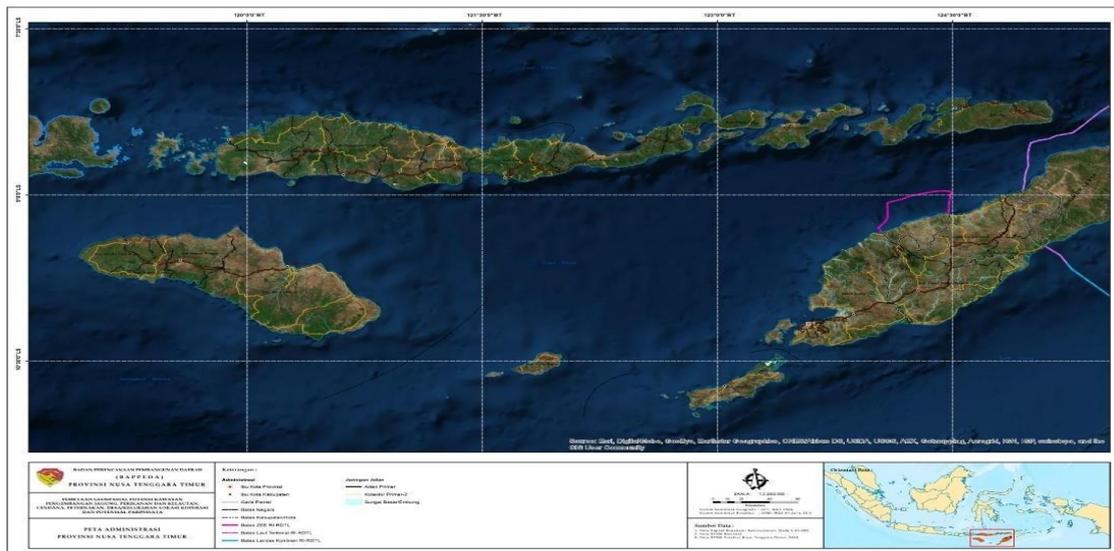
Wilson Rajagukguk

BAB 1

PENDAHULUAN

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan ibu kota di Kupang. Secara geografis, Provinsi NTT terletak pada 8o-12o LS dan 118o-125o BT. Provinsi Kepulauan NTT disatukan oleh Laut Sawu dan Selat Sumba (Gambar 1.1). NTT memiliki wilayah daratan seluas 47.350 km² serta garis pantai sepanjang 5.700 km². Batas Wilayah sebelah Utara adalah Laut Flores, di sebelah Timur berbatasan dengan Republik Demokratik Timor Leste dan Kepulauan, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rote Ndao dan Laut Sawu, dan Batas wilayah Selatan adalah Samudera Hindia. Luas wilayah Provinsi NTT terdiri dari daratan sebanyak 47.349.9 km² dan lautan seluas 200.000 km².

Provinsi NTT mempunyai 1.192 pulau (besar dan kecil). Sebanyak 243 pulau sudah diberi nama dan 44 pulau yang sudah dihuni manusia. Provinsi Kepulauan NTT berbatasan darat dengan Timor Leste dan berbatasan laut dengan Australia. Di Provinsi NTT terdapat sebuah daerah kantong (*enclave*), distrik Oecussi, Timor Leste. Iklim di Nusa Tenggara Timur dalam satu tahun terdiri dari 8 bulan kemarau/kering dan 4 bulan musim hujan/basah. Secara administratif Provinsi NTT terdiri dari 21 Kabupaten dan 1 Kota, sebanyak 306 Kecamatan dan 3.270 Desa/Kelurahan. Provinsi NTT mempunyai 11 Kabupaten Kepulauan dengan 5 (lima) pulau terluar, yaitu Pulau Alor, Batek, Dana, Ndana, dan Mengkudu.



Sumber: Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur (2022).

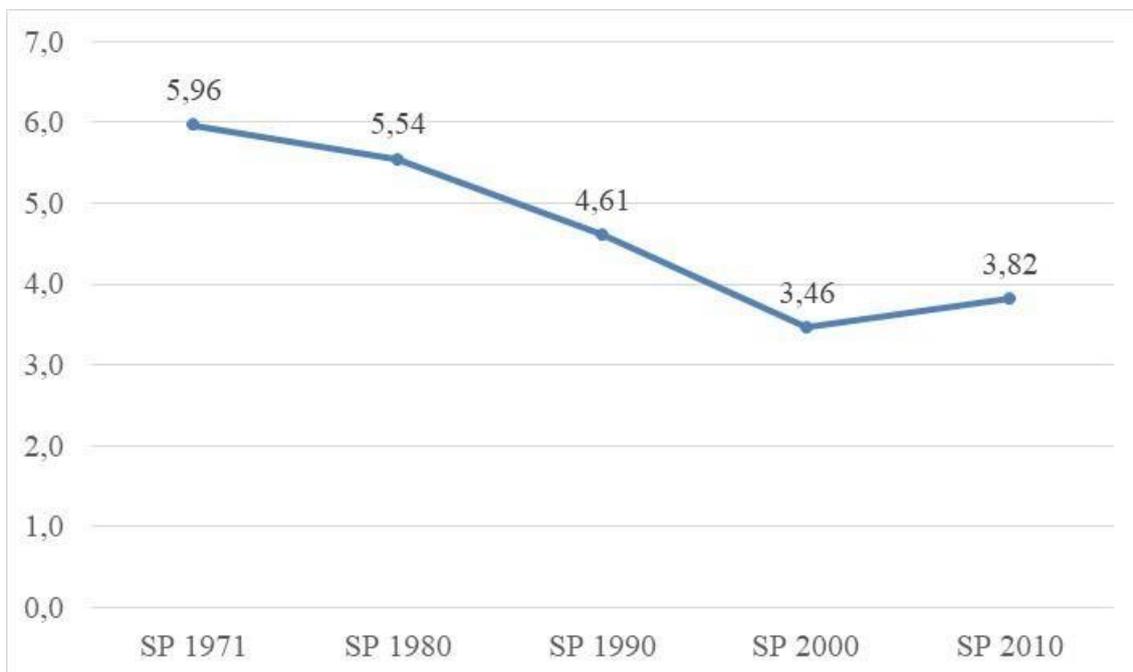
Gambar 1.1
Peta Provinsi Nusa Tenggara Timur

BAB 2. SITUASI DEMOGRAFI DAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Pada Bab ini disajikan situasi demografi dan Pembangunan kependudukan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.4. Proses Demografis

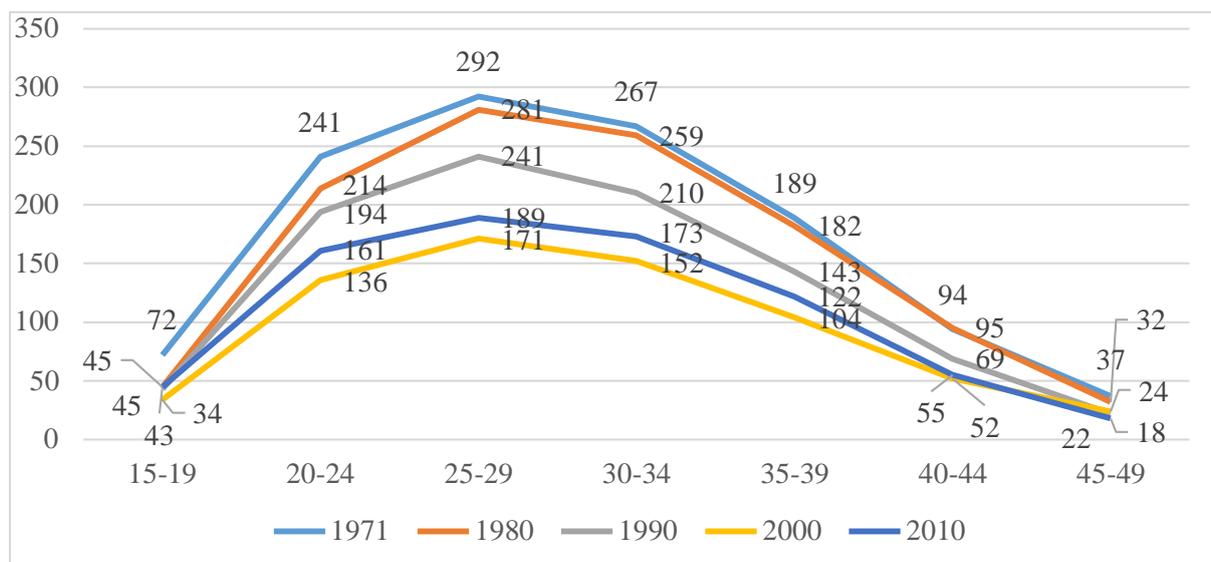
Proses demografis meliputi fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Dalam hal fertilitas, Provinsi NTT merupakan provinsi dengan tingkat kelahiran tertinggi di Indonesia. Seperti dapat dilihat pada Gambar 1.2, angka fertilitas total (*total fertility rate/TFR*) mencapai hampir enam (6) anak per perempuan menurut hasil SP 1971 dan menurun menjadi 3,5 anak perempuan menurut hasil SP 2000 dan kemudian meningkat menjadi 3,8 anak per perempuan menurut hasil SP 2010. Peningkatan ini dapat disebabkan karena adanya ledakan bayi kecil (*baby boomlet*) dimana para perempuan usia reproduksi yang merupakan anak dari para perempuan yang lahir pada masa ledakan bayi (*baby boom*) pada periode 1960-an melahirkan. Situasi yang sama juga terjadi di Indonesia secara keseluruhan.



Sumber: BPS (2022) (diolah).

Gambar 2.1.
Angka Fertilitas Total (anak per perempuan):
Provinsi Nusa Tenggara Timur SP71–SP2010

Provinsi NTT merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki pola fertilitas yang berbeda dimana puncak fertilitas ada pada usia 25-29 tahun sejak tahun 1971. Seperti dapat dilihat pada Gambar 1.3, angka fertilitas menurut umur (*age specific fertility rate/ASFR*) paling tinggi pada kelompok umur 25-29 tahun, yaitu 189 anak per 1.000 perempuan usia 25-29 tahun menurut hasil SP 2010. Selain itu, ASFR perempuan usia 15-19 tahun di Provinsi NTT juga relatif rendah jika dibandingkan ASFR perempuan usia 15-19 tahun di beberapa provinsi lain di Indonesia. Akan tetapi, ASFR perempuan usia 45-49 tahun di Provinsi NTT relatif tinggi jika dibandingkan dengan ASFR perempuan usia 45-49 tahun provinsi-provinsi lain di Indonesia.

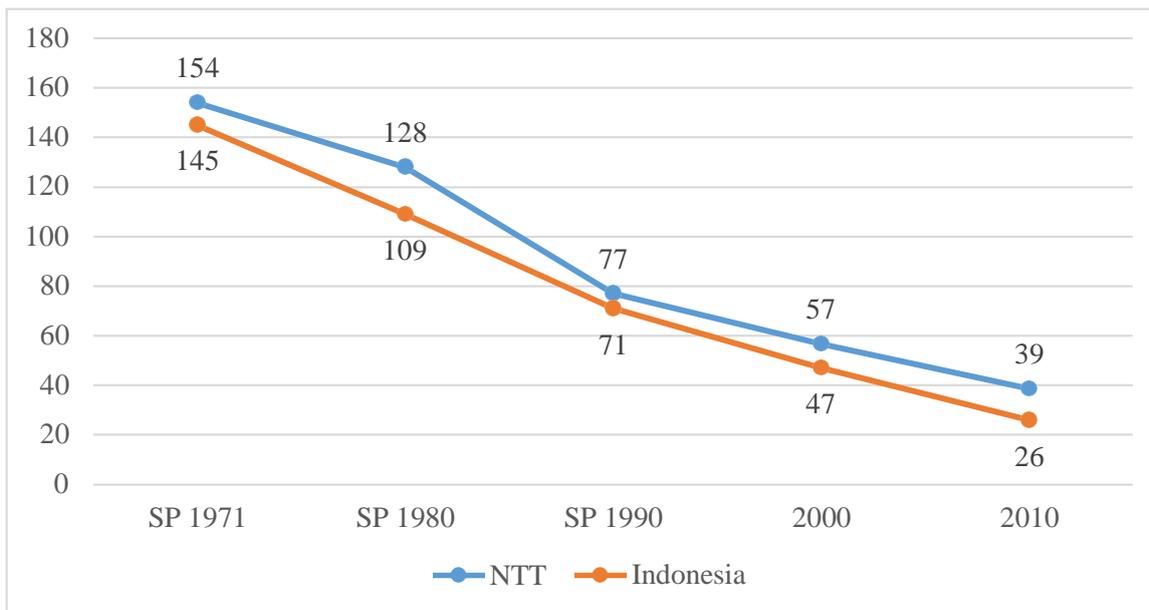


Sumber: BPS (2022) (diolah).

Gambar 2.2.
Angka Fertilitas Menurut Umur (anak per 1.000 perempuan umur tertentu):
Provinsi Nusa Tenggara Timur 1971–2010

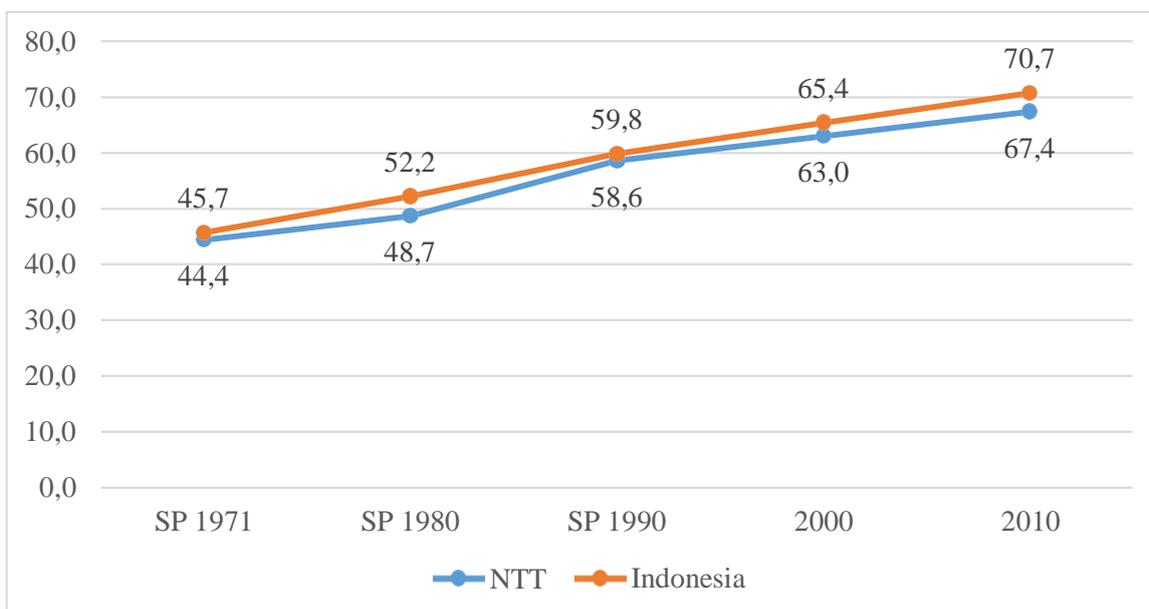
Dalam hal mortalitas, Provinsi NTT merupakan salah satu provinsi dengan tingkat mortalitas yang tinggi di Indonesia. Seperti dapat dilihat pada Gambar 1.4, angka kematian bayi (*infant mortality rate/IMR*) di Provinsi NTT menurun dari 154 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup menurut SP 1971 menjadi 39 menurut SP 2010. Dapat dilihat juga bahwa IMR Provinsi NTT secara konsisten lebih tinggi daripada IMR Indonesia.

Penurunan IMR diikuti dengan kenaikan harapan hidup saat lahir (HHSL). Seperti dapat dilihat pada Gambar 1.4, HHSL di Provinsi NTT meningkat dari hanya 44,4 tahun menurut hasil SP 1971 menjadi 67,4 tahun menurut hasil SP 2020. Selain itu, sebagai konsekuensi dari IMR yang lebih tinggi, HHSL di Provinsi NTT lebih pendek daripada HHSL Indonesia.



Sumber: BPS (2022) (diolah).

Gambar 2.3.
Angka Kematian Bayi (kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup):
Provinsi Nusa Tenggara Timur 1971–2010

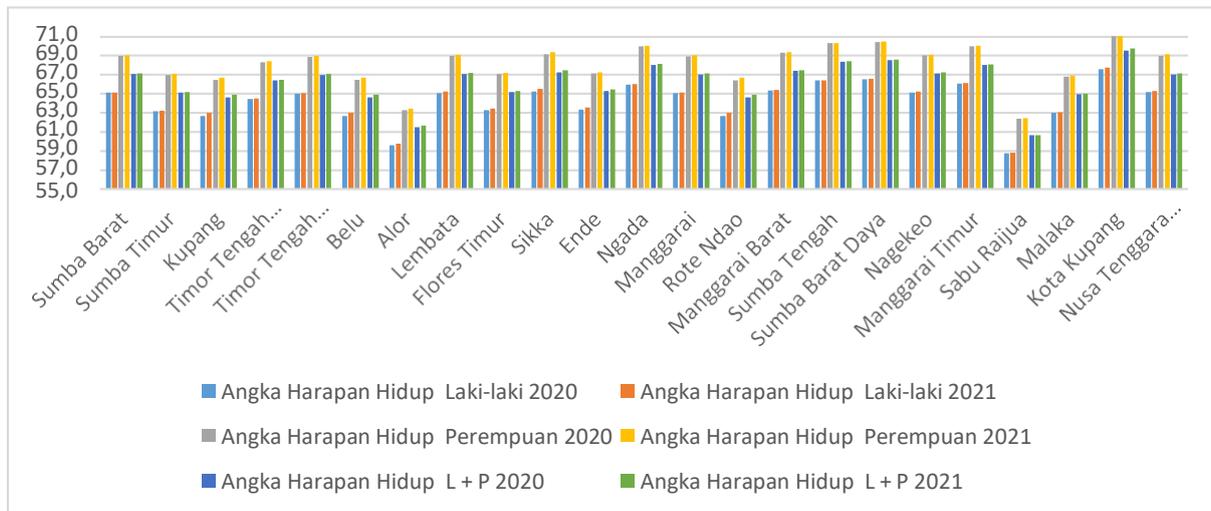


Sumber: BPS (2022) (diolah).

Gambar 2.4.
Harapan hidup saat lahir: Provinsi Nusa Tenggara Timur 1971-2010 (tahun)

HHSK kabupaten/kota dan Provinsi Kepulauan Nusa Tenggara Timur menurut jenis kelamin pada tahun 2020 dan 2021 diperlihatkan pada Gambar 1.6. HHSK laki-laki lebih pendek daripada HHSK

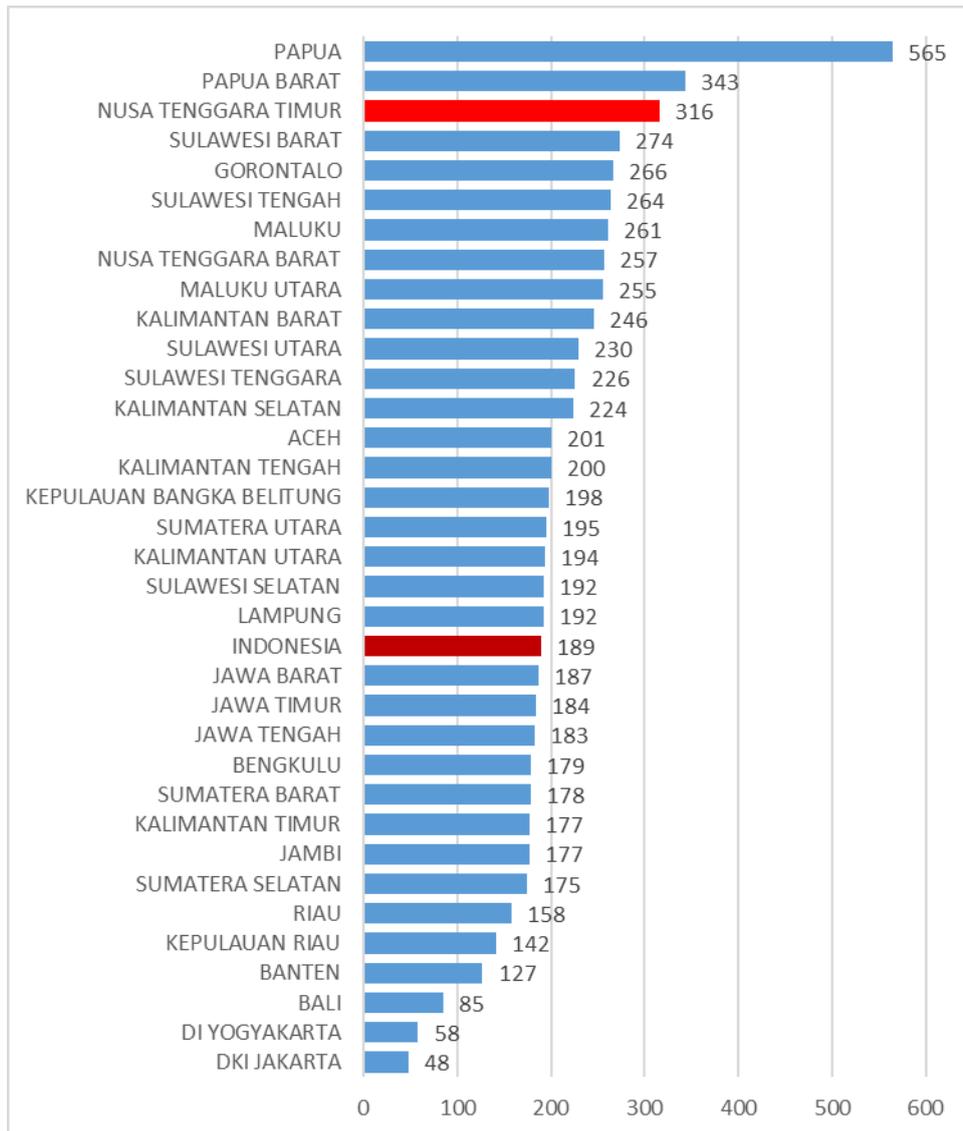
perempuan, masing-masing 65,2 tahun versus 69,0 tahun pada tahun 2020 dan 65,3 tahun versus 69,1 tahun pada tahun 2021.



Sumber: BPS (2022) (diolah).

Gambar 2.5.
Harapan Hidup Saat Lahir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin:
Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020 dan 2021

Pada Gambar 1.7 disajikan Angka Kematian Ibu (maternal mortality rate) provinsi dan Indonesia. Provinsi Nusa Tenggara Timur (2022) menduduki posisi nomor 3 tertinggi (316 kematian per 100.000 kelahiran hidup) setelah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Angka ini jauh di atas Indonesia sebesar 189.

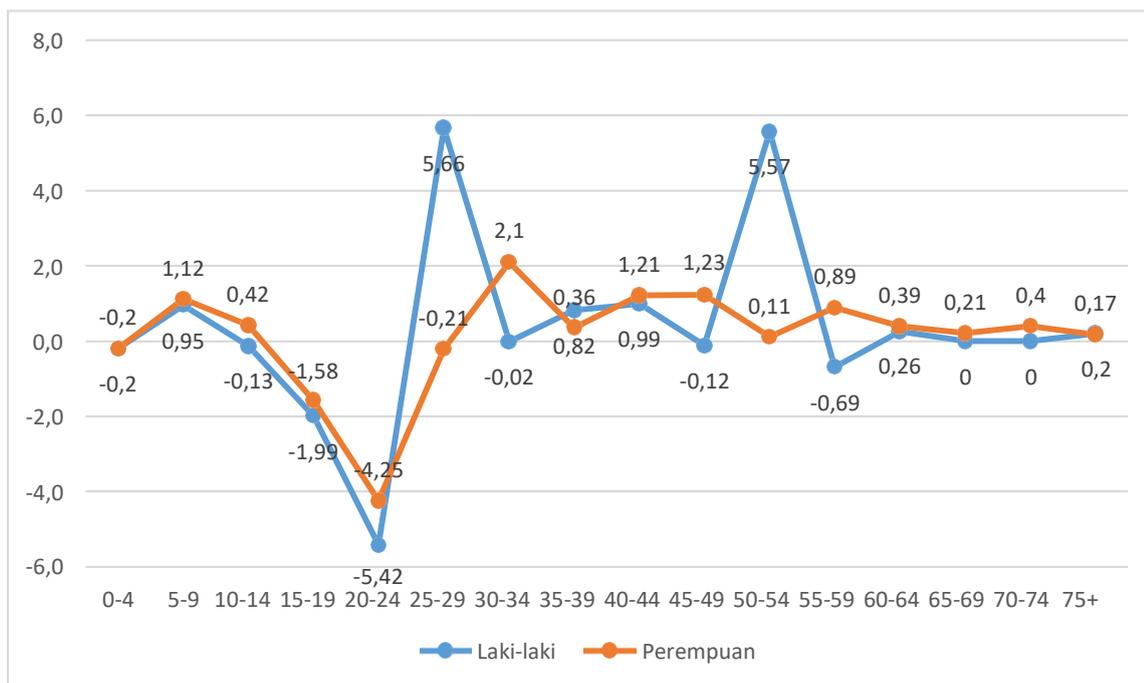


Sumber: BPS 2023, diolah

Gambar 2.6.

Angka Kematian Ibu/Maternal Mortality Rasio, Provinsi dan Indonesia, 2022

Pada Gambar 2.7 disajikan angka migrasi risen neto menurut umur (*age spesific net migration rate/ASMR*) pada periode 2010-2015 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terlihat bahwa terjadi migrasi keluar yang lebih besar daripada migrasi masuk baik pada laki-laki maupun perempuan pada kelompok umur 10-14 tahun hingga kelompok umur 20-24. Sementara itu, migrasi masuk yang lebih tinggi daripada migrasi keluar yang cukup tinggi terjadi pada laki-laki kelompok umur 25-29 dan 50-54

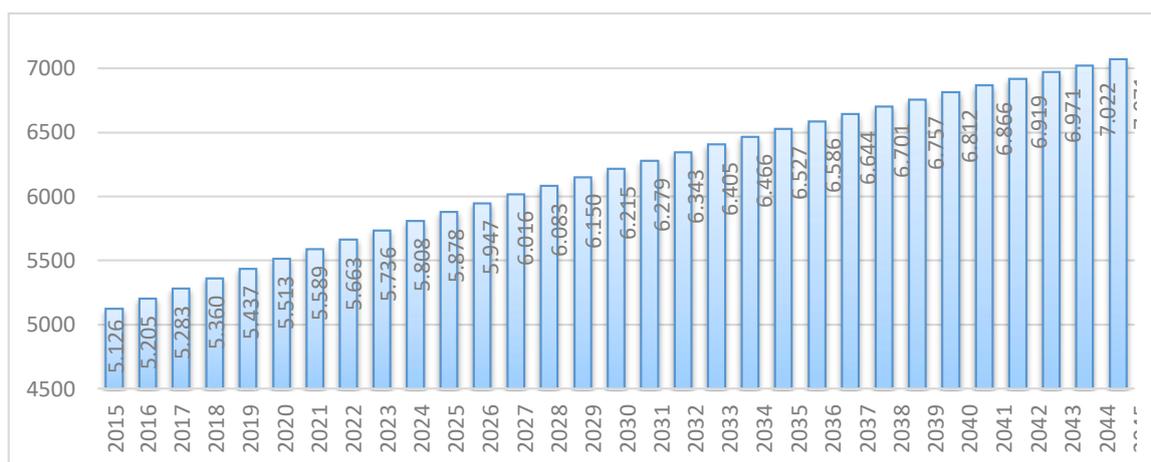


Sumber: Bappenas dkk (2018).

Gambar 2.7.
Age Specific Net Migration Rate (ASNMR): Provinsi Nusa Tenggara Timur
Survei Penduduk Antar Sensus 2015

2.5. Keluaran Demografis

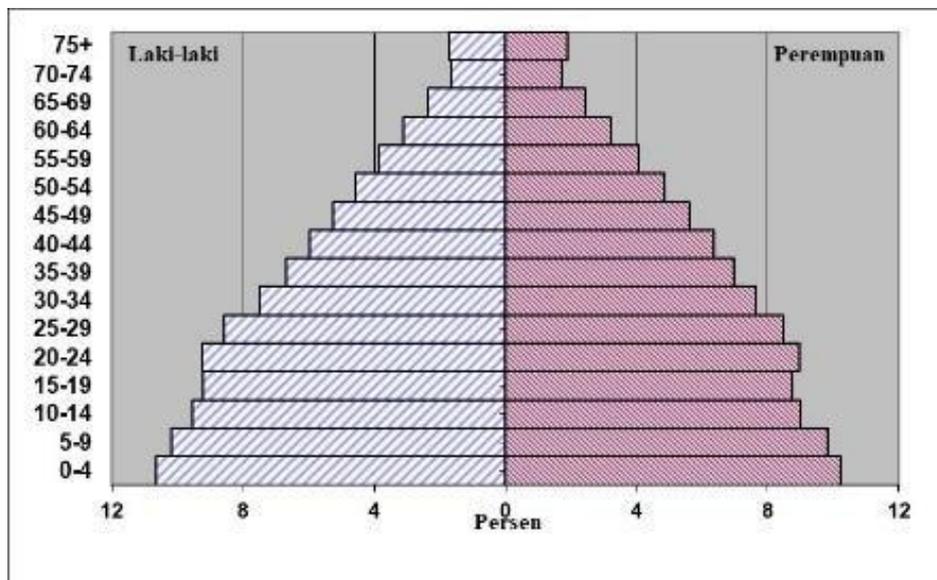
Pada Gambar 2.8 disajikan proyeksi penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode 2015–2045. Terlihat bahwa penduduk Provinsi NTT akan bertambah dari 5.126.100 jiwa pada tahun 2015 menjadi 7.071.200 jiwa pada tahun 2045.



Sumber: BPS (2018) (diolah).

Gambar 2.8.
Proyeksi Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribuan), 2015–2045

Struktur umur penduduk Provinsi NTT relatif muda. Seperti dapat dilihat pada Gambar 1.10, piramida penduduk Provinsi NTT masih berbentuk ekspansif dimana batang piramida penduduk pada kelompok umur 0-4 tahun masih lebih lebar daripada batang piramida penduduk pada kelompok umur yang lebih tua. Sementara itu, batang piramida penduduk pada kelompok usia 65 tahun ke atas relatif lebar dibandingkan batang piramida penduduk pada kelompok usia 65 tahun ke atas provinsi-provinsi lain di wilayah Timur Indonesia, seperti Papua. Hasil SP 2020 menunjukkan bahwa penduduk usia 65 tahun ke atas di Provinsi NTT adalah 5,9%, sementara di Papua Barat dan Papua angka ini masing-masing hanya 3,3% dan 3,4% dan di DKI Jakarta angka ini lebih rendah, yaitu 5,3%. Hal ini mengindikasikan terjadinya migrasi keluar penduduk usia produktif 15-64 tahun di Provinsi NTT.

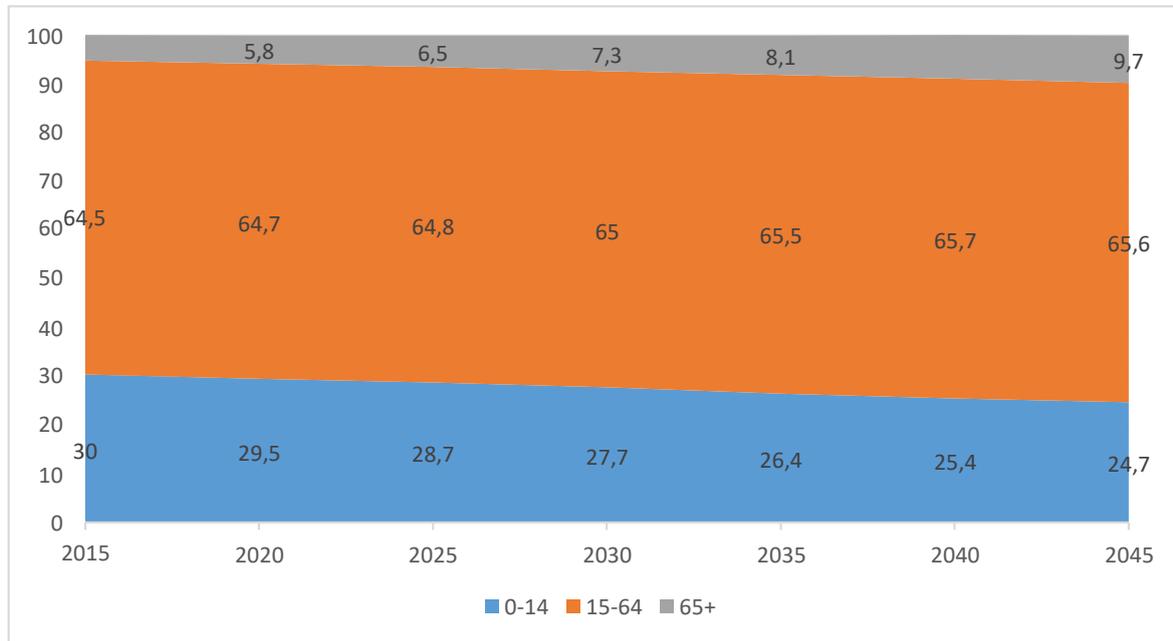


Sumber: BPS (2020) (diolah).

Gambar 2.9
Piramida Penduduk: Provinsi Nusa Tenggara Timur Sensus Penduduk 2020

Provinsi NTT merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berada dalam tahap awal bonus demografi dalam hal tipologi bonus demografi. Wilayah yang ada pada tahap awal bonus demografi dicirikan dengan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita dalam kelompok rendah, angka fertilitas total antara 2,1 dan 4,0 anak per perempuan, dan persentase penduduk usia produktif yang masih meningkat. Seperti dapat dilihat pada Gambar 12, persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) masih akan meningkat pada periode 2015-2045. Hasil SP 2020 menunjukkan bahwa rasio ketergantungan umur (RKU) Provinsi NTT paling tinggi di Indonesia (55,2). Artinya, terdapat 46 orang penduduk usia muda dan sembilan (9) orang penduduk usia tua per 100 penduduk usia produktif di Provinsi NTT. Angka-angka ini

mengindikasikan tantangan pembangunan kependudukan yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan di Provinsi NTT dimana beban penduduk usia produktif relatif lebih tinggi dibandingkan beban penduduk usia produktif di provinsi-provinsi lain di Indonesia.



Sumber: BPS (2018) (diolah).

Gambar 2.10

Distribusi persentase penduduk menurut tiga kelompok umur besar (muda, produktif, dan tua): Provinsi Nusa Tenggara Timur 2015-2045

2.6. Situasi dan Kondisi Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dari Gambar 2.11 terlihat bahwa PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kontraksi pada masa pandemi COVID-19. Terlihat terjadi penurunan angka pertumbuhan PDRB sebesar 7,9% pada tahun 2019 menjadi -0,2% pada tahun 2020. Akan tetapi dengan cepat mengalami rebound pada tahun 2021 dengan angka pertumbuhan sebesar 4,1%.

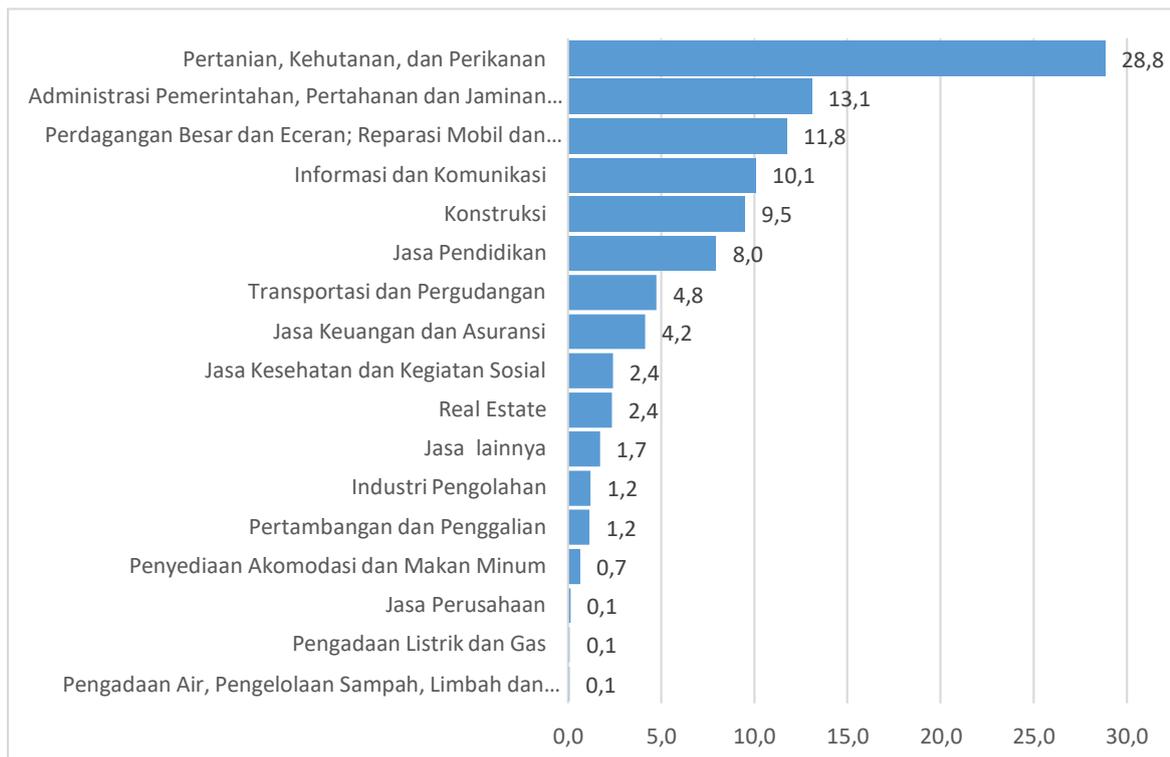


Sumber: BPS, 2020. Diolah

Gambar 2.11
PDRB, Provinsi Nusa Tenggara Timur (Rp. Juta), 2010 - 2021

Pada Gambar 1.13 disajikan Persentase PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut Lapangan Usaha, Triwulan 2 2022. Dari yang terbesar didapat dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan terkecil dari sektor Jasa Perusahaan, Pengadaan Listrik dan Gas, serta sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Sebanyak 28,8% PDRB Povinsi NTT dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan perikanan. Selanjutnya sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib menyumbang sebesar 13,1% dan sektor ketiga terbesar didapat dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,8%.

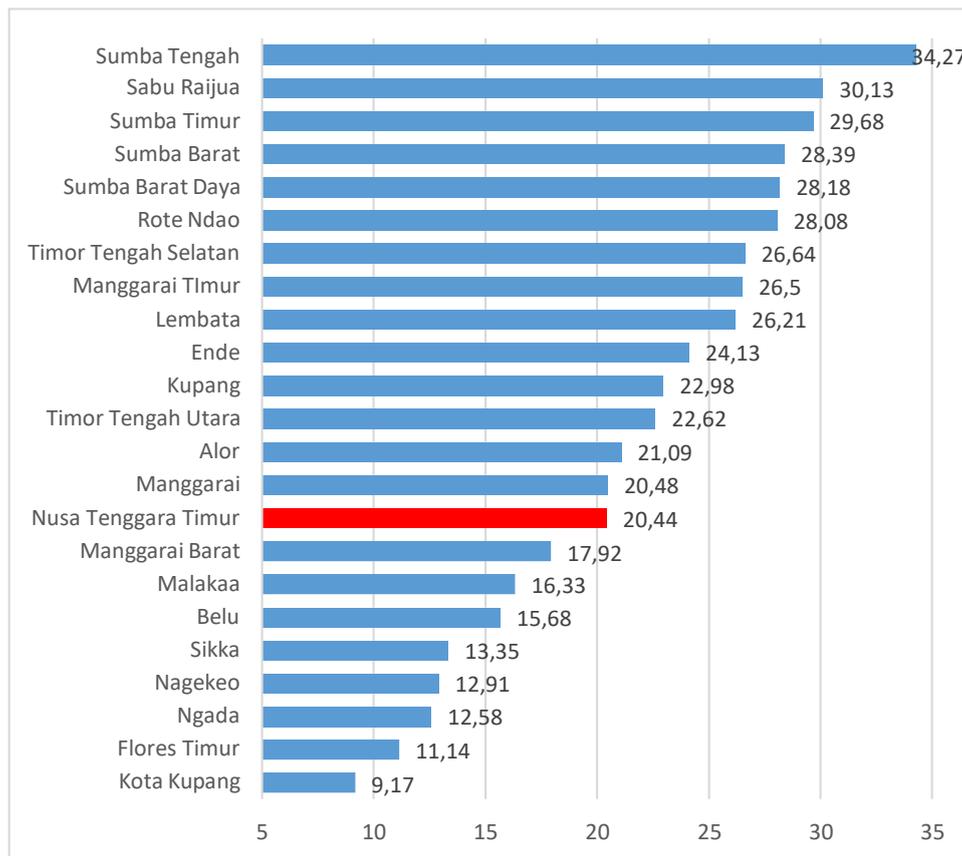
Sektor penyumbang terkecil adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Pengadaan Listrik dan Gas, dan sektor Jasa Perusahaan masing-masing sebesar 0,1%.



Sumber: BPS NTT (2022).

Gambar 2.12
Distribusi Persentase PDRB Provinsi NTT menurut Lapangan Usaha, Triwulan
2, 2022

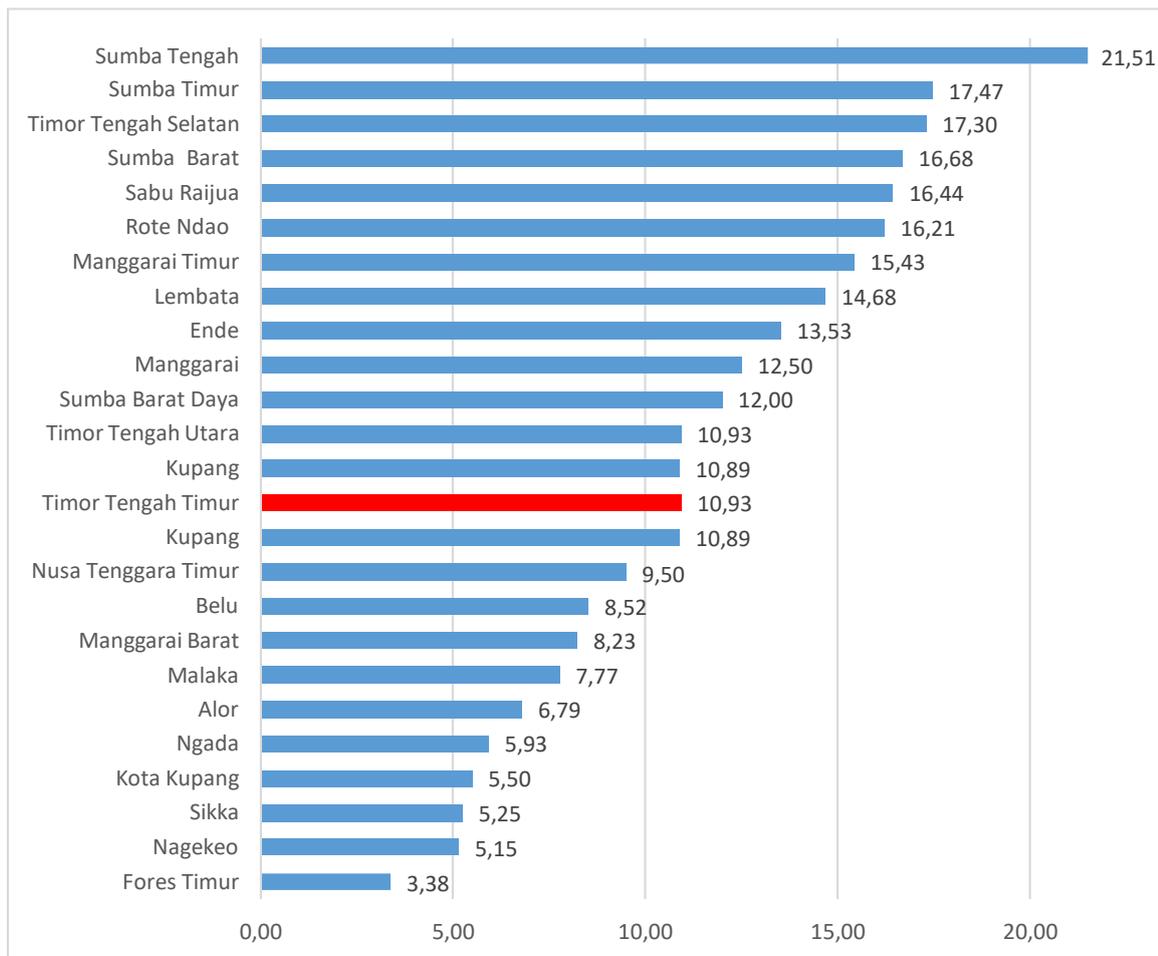
Persentase penduduk miskin menurut kabupaten dari Provinsi dan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021 disajikan dalam Gambar 1.13. Kabupaten Sumba Tengah mempunyai 34,27% penduduk miskin pada tahun 2021. Persentase Penduduk miskin pada provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 20,44. Kabupaten dengan persentase penduduk miskin terkecil adalah Kota Kupang sebanyak 9,17%.



Sumber: Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur (2022).

Gambar 2.13
Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021

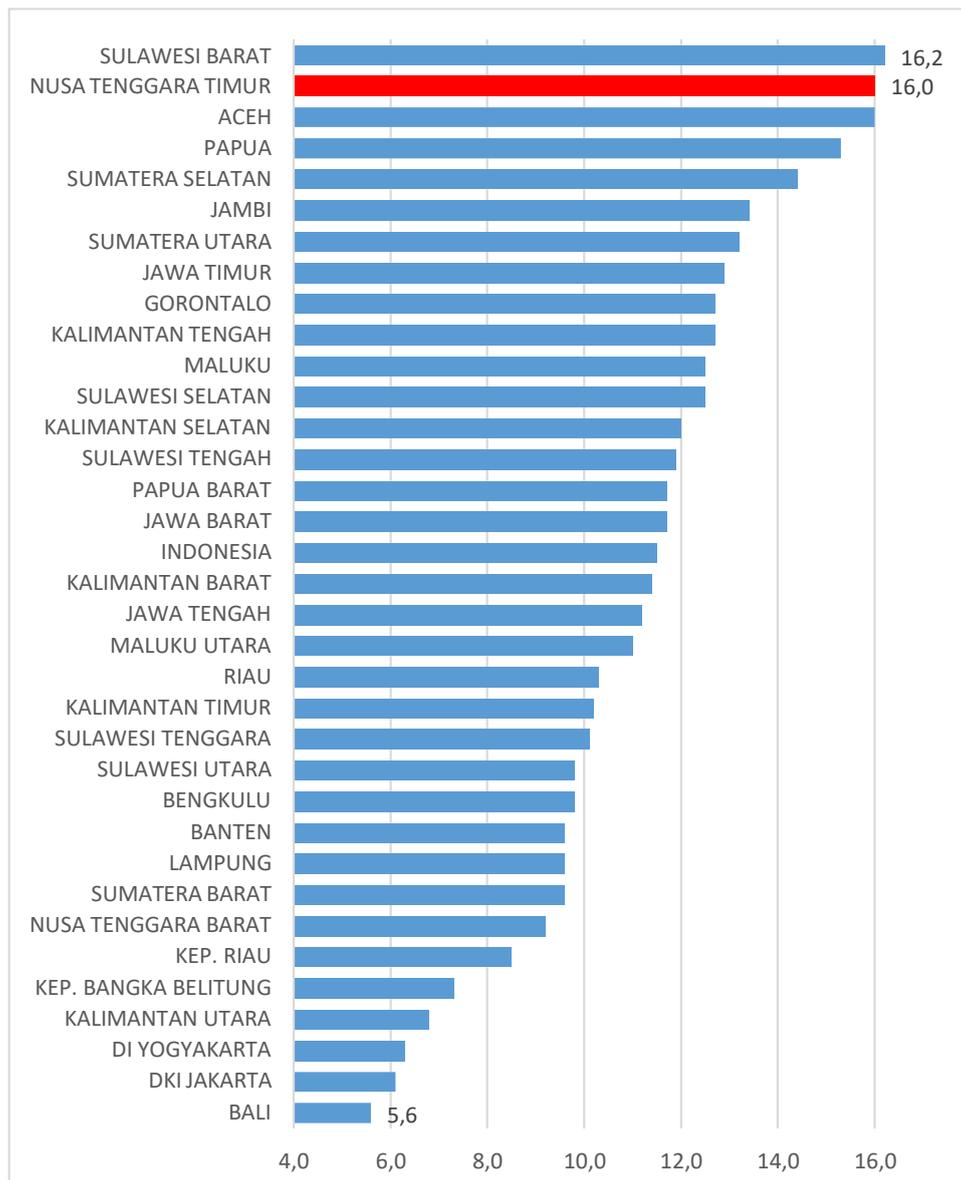
Selanjutnya pada Gambar 2.14 disajikan Persentase penduduk miskin ekstrim menurut kabupaten pada Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021. Seluruh kabupaten/ktoa di Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai penduduk miskin ekstrim. Kabupaten Sumba Tengah mempunyai penduduk miskin ekstrim sebesar 21,51%, kemudian diikuti Kabupaten Sumba Timur sebanyak 17,47%, dan selanjutnya kabupaten dengan persentase penduduk miskin ekstrim terendah adalah kabupaten Flores Timur sebanyak 3,38%. Sementara itu Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai persentase penduduk ekstrim sebanyak 10,93 pada tahun 2021.



Sumber: Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur (2022).

Gambar 2.14
Persentase Kemiskinan Esktrim menurut Kabupaten, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021

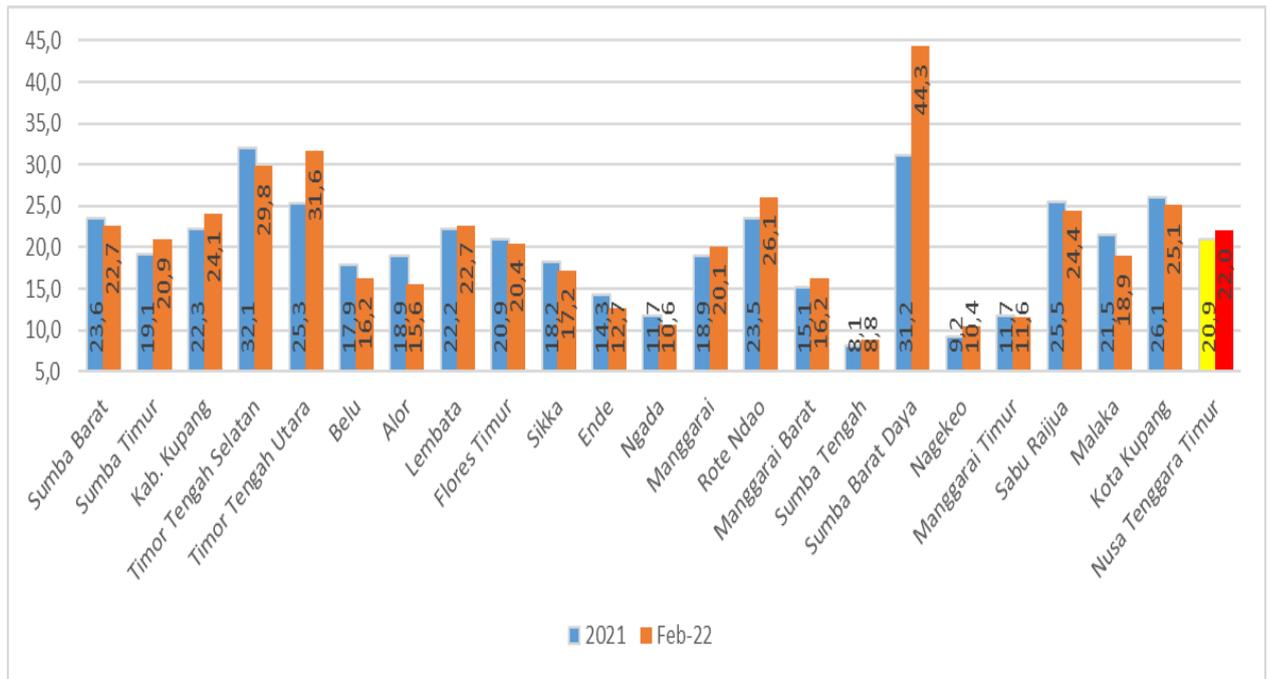
Pada Gambar 2.15 disajikan persentase balita sangat pendek menurut provinsi tahun 2016 – 2018. Dari Gambar tersebut terlihat bahwa provinsi Nusa Tenggara Timur menduduki posisi kedua di Indonesia dalam hal persentase balita sangat pendek (sebesar 16.0%) setelah provinsi Sulawesi Barat sebesar 16,2%.



Sumber: Pemantauan Status Gizi, Profil Kesehatan Indonesia, KEMENKES (2022). (Diolah).

Gambar 2.15
Persentase Balita Sangat Pendek (Persen) menurut Provinsi: Indonesia 2016-2018

Pada Gambar 2.16 disajikan Persentase Stunting menurut Kabupaten, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021-2022. Provinsi Nusa Tenggara Timur secara umum mengalami persentase kenaikan stunting dari tahun 2021 (20,9%) ke tahun 2022 (22,0%). Terdapat sejumlah kabupaten yang mengalami kenaikan stunting dan juga mengalami penurunan. Kenaikan terbesar terjadi pada kabupaten Sumba Barat Daya dari 31,2% tahun 2021 menjadi 44,3% tahun 2022. Persentase stunting terendah terjadi pada Kabupaten Sumba Tengah (8,1% tahun 2021 dan 8,8% tahun 2022).



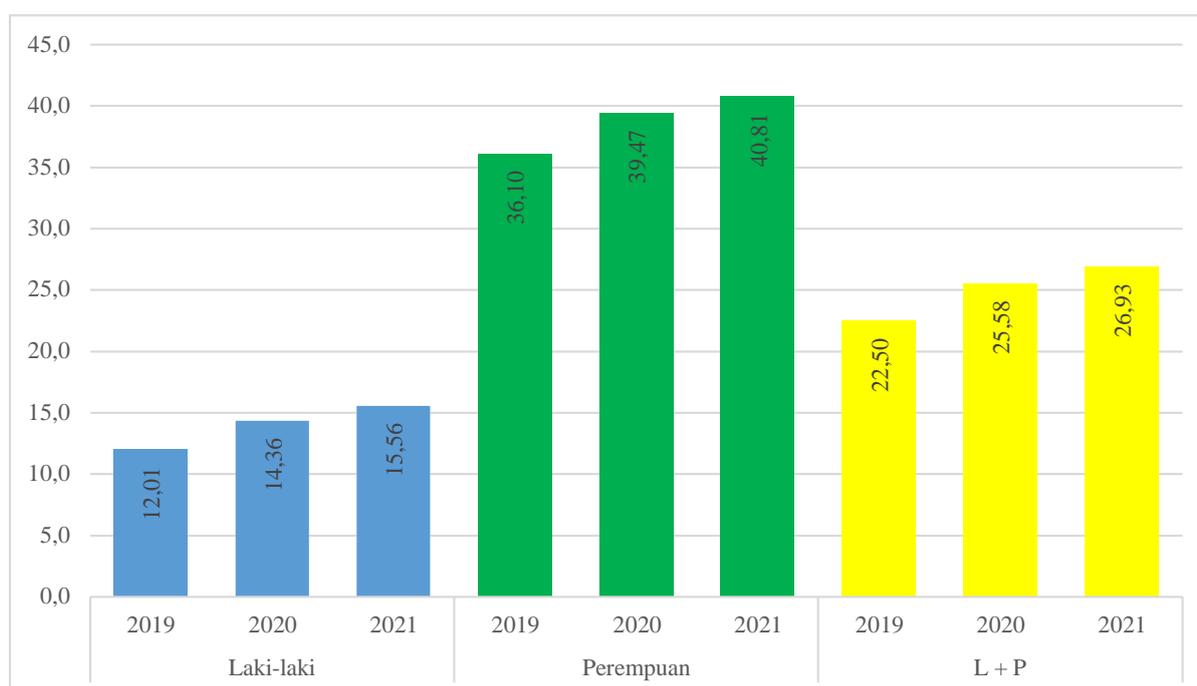
Sumber: Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur (2022).

Gambar 2.16
 Persentase *Stunting* menurut Kabupaten, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021-2022

Bab 3

Situasi Ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Persentase pekerja rumah tangga/tidak dibayar di Provinsi Nusa Tenggara Timur relatif tinggi dan meningkat pada periode 2019-2021 (Gambar 3.1). Pada tahun 2021, lebih dari seperempat angkatan kerja yang bekerja di Provinsi NTT merupakan pekerja rumah tangga/tidak dibayar. Angka ini secara nyata lebih tinggi pada pekerja perempuan daripada pada pekerja laki-laki. Pada tahun 2021 pekerja perempuan sekitar 3,7 kali lebih cenderung untuk menjadi pekerja rumah tangga/tidak dibayar dibandingkan pekerja laki-laki.



Gambar 3.1

Persentase Pekerja tidak Dibayar menurut Jenis Kelamin: Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2019-2021

Pada Tabel 3.1 disajikan persentase penduduk yang termasuk Angkatan Kerja kabupaten menurut pendidikan yang ditamatkan pada Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020. Sebanyak 47,26 % pekerja lulus SD ke bawah, 17,33 % lulus SMP, dan 24,48% lulus SMA, serta sebanyak 10,94 % lulusan Perguruan Tinggi. Pada semua kabupaten/kota persentase pekerja menurut pendidikan yang ditamatkan didominasi oleh lulusan SD ke bawah.

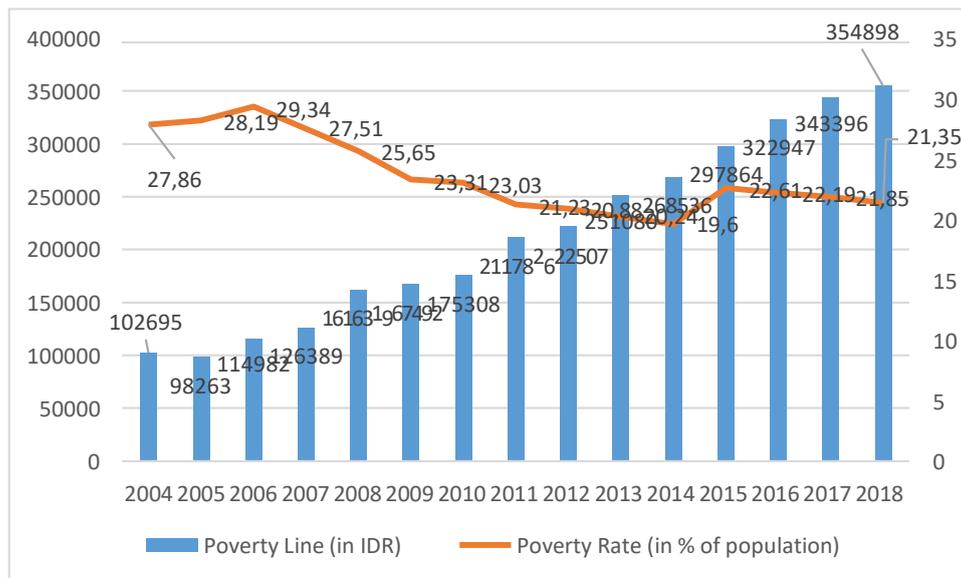
Tabel 3.1.

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020

	SD Ke Bawah	SMP	SMA	Universitas
Sumba Barat	47,27	19,20	22,15	11,38
Sumba Timur	44,66	16,90	26,01	12,43
Kupang	46,97	18,67	26,64	7,72
Timor Tengah Selatan	52,53	17,98	20,05	9,43
Timor Tengah Utara	51,86	14,85	22,46	10,82
Belu	49,62	15,48	24,51	10,40
Alor	43,40	19,81	25,74	11,06
Lembata	50,37	16,59	22,45	10,59
Flores Timur	52,00	17,26	21,67	9,07
Sikka	53,41	15,41	21,48	9,71
Ende	46,16	15,06	27,88	10,91
Ngada	44,77	17,84	23,11	14,29
Manggarai	49,10	19,83	20,17	10,90
Rote Ndao	49,61	16,82	24,94	8,63
Manggarai Barat	53,93	18,05	16,68	11,34
Sumba Tengah	54,57	15,69	18,00	11,74
Sumba Barat Daya	53,02	17,99	21,24	7,76
Nagekeo	50,06	17,26	21,48	11,20
Manggarai Timur	60,48	18,01	13,82	7,68
Sabu Raijua	52,60	18,41	21,13	7,86
Malaka	47,85	15,72	25,84	10,59
Kota Kupang	15,70	17,16	46,95	20,19
Nusa Tenggara Timur	47,26	17,33	24,48	10,94

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2022. Diolah

Garis kemiskinan dan Angka Kemiskinan di Provinsi NTT mengalami perbaikan pada periode tahun 2004 – 2018. Garis kemiskinan tahun 2004 sebesar Rp. 102.695 dan pada tahun 2018 menjadi 354.898. Selanjutnya angka kemiskinan pada tahun 2004 sebesar 27,84% dan kemudian turun menjadi 21,35% pada tahun 2018. Angka kemiskinan mengalami kontraksi pada tahun 2015, akan tetapi selanjutnya mengalami perbaikan hingga tahun 2018.



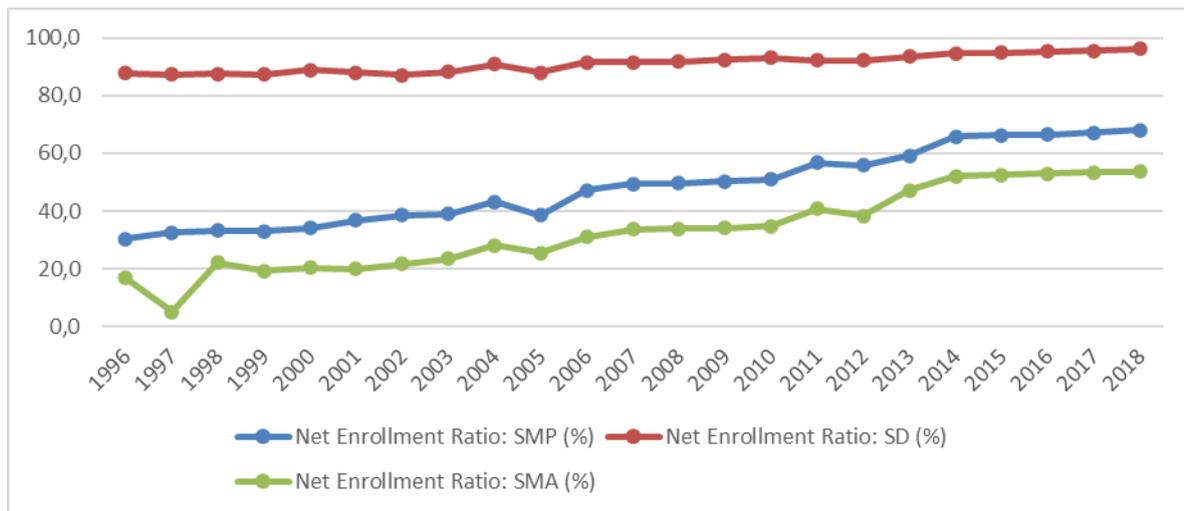
Sumber: World Bank, INDODAPOER 2023. diolah

Gambar 3.2

Garis Kemiskinan dan Angka Kemiskinan di Provinsi NTT, 2004-2018

Pada Gambar 3.3. disajikan angka partisipasi sekolah (*enrollment rasio*) SD, SMP dan SMU/SMA di Provinsi Nusa Tenggara Timur (World Bank, 2023). Terlihat bahwa secara signifikan terjadi peningkatan dalam parameter pendidikan ini. Terjadi kenaikan pada periode 2004 – 2018.

Net enrollment rasio SD jauh lebih tinggi dibandingkan dengan SMP dan SMA/U. Hal ini menunjukkan angka tidak melanjutkan sekolah dari SD ke SMP dan SMA/U tinggi. Kemudian net enrolment SMP lebih tinggi dibandingkan dengan SMA/U.

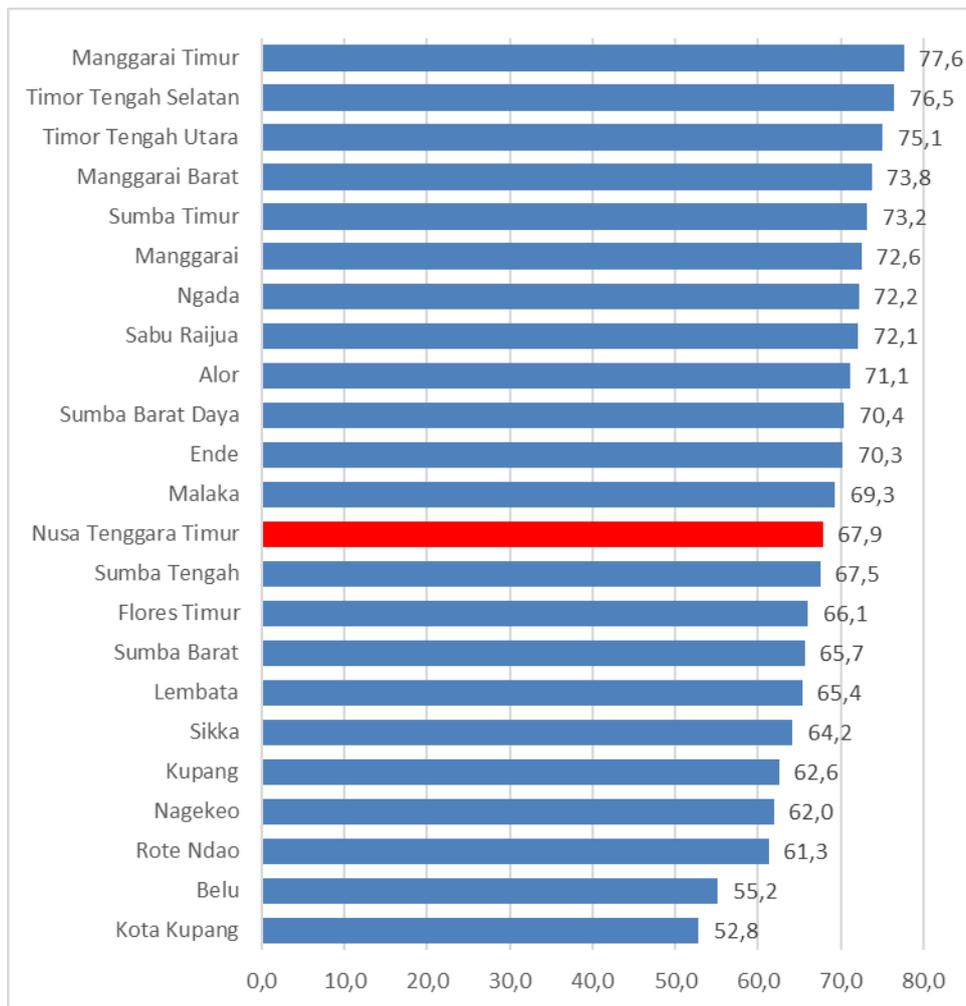


Sumber: World Bank, INDODAPOER, 2023. diolah

Gambar 3.3
Net Enrollment Ratio SD, SMP dan SMA/U Provinsi Nusa Tenggara Timur, 1996-2018

3.1. Partisipasi dan Tingkat Pengangguran serta situasi Angkatan Kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur

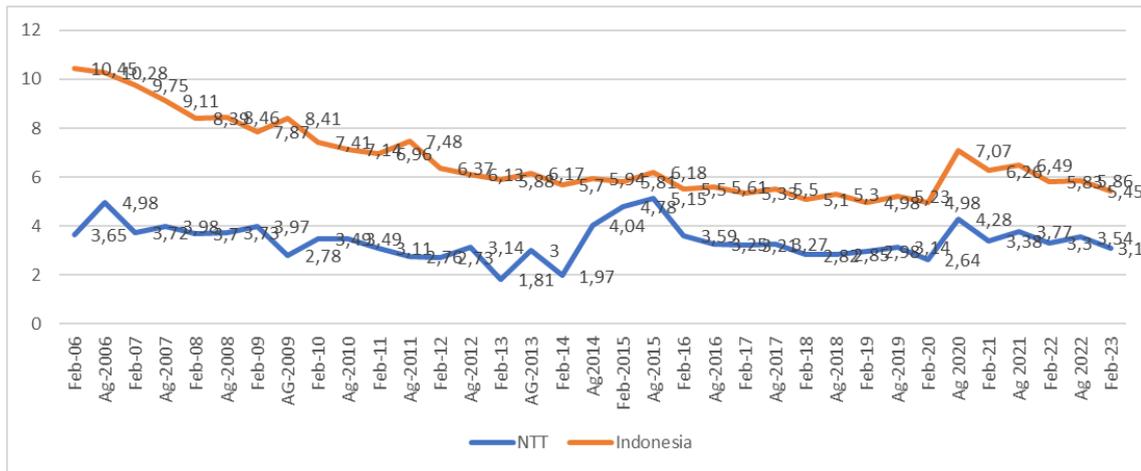
Pada Gambar 3.4. disajikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut kabupaten/kota: Nusa Tenggara Timur 2022. TPAK tertinggi terdapat di Kabupaten Manggarai Timur (77,6%) dan terendah di Kota Kupang (52,8%). Sementara itu TPAK di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 67,9%. Rendahnya TPAK di Kota Kupang bersesuaian dengan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi ini adalah sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan. Sektor yang dominan di Kota Kupang adalah sektor lainnya.



Sumber: BPS NTT. 2023. Diolah

Gambar 3.4.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut kabupaten/kota:
Nusa Tenggara Timur 2022

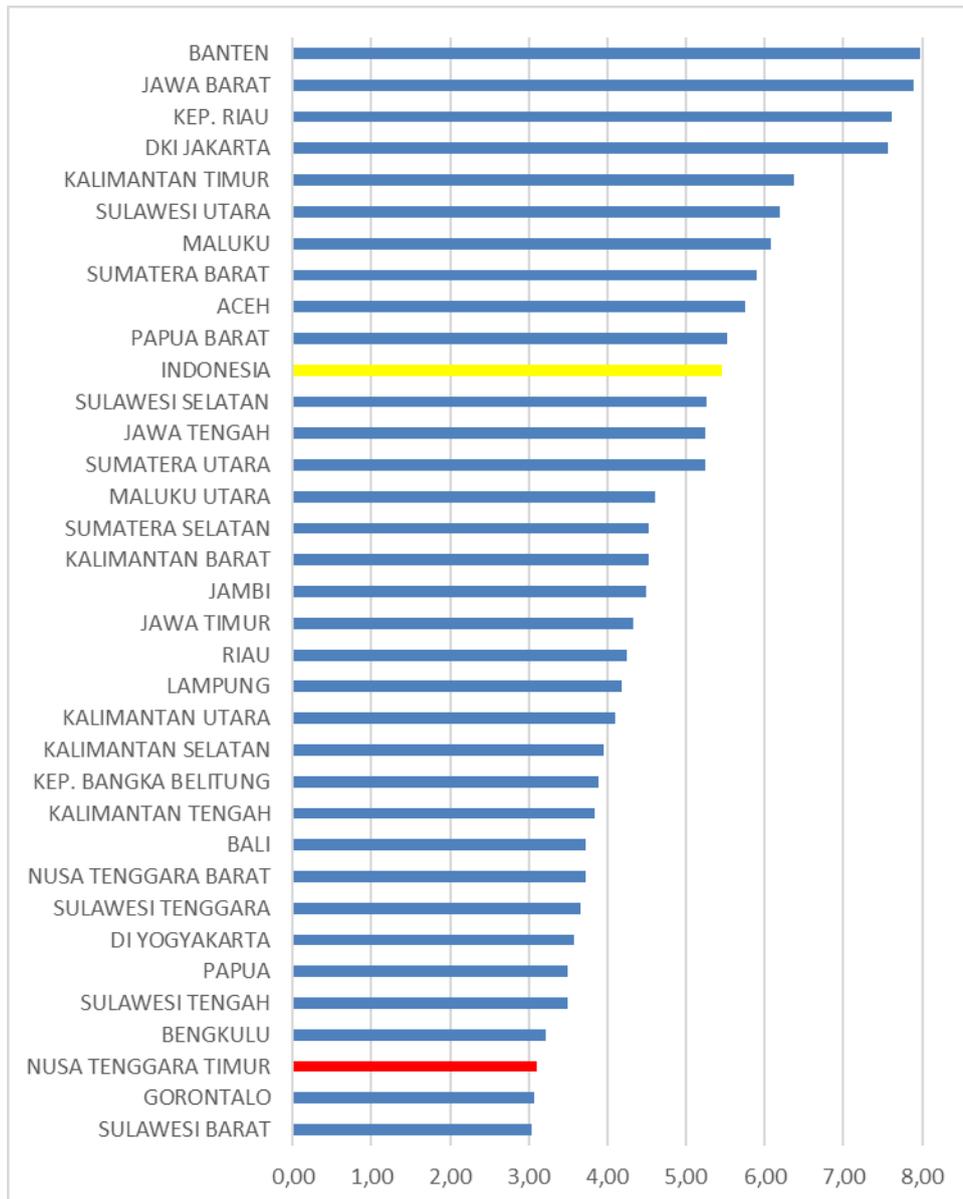
Pada Gambar 2.5 disajikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode Februari 2006 sampai Februari 2023. Tren TPT di Provinsi NTT mempunyai pola yang mirip dengan Indonesia. Terjadi penurunan TPT pada periode studi. Walau terjadi rebound pada tahun 2020, akibat Pandemi Covid-19, tren penurunan TPT terjadi pada periode sesudah tahun 2020 hingga tahun 2023.



Sumber: BPS. 2023. Diolah

Gambar 3.5.
Tingkat Pengangguran Terbuka: Nusa Tenggara Timur dan Indonesia
Feb 2006 - Feb 2023

Pada Gambar 2.6 diperlihatkan TPT pada provinsi dan Indonesia pada bulan Februari tahun 2023. TPT pada Provinsi NTT menempati posisi tiga besar terbaik di Indonesia. TPT Provinsi NTT lebih baik dibandingkan dengan Indonesia.

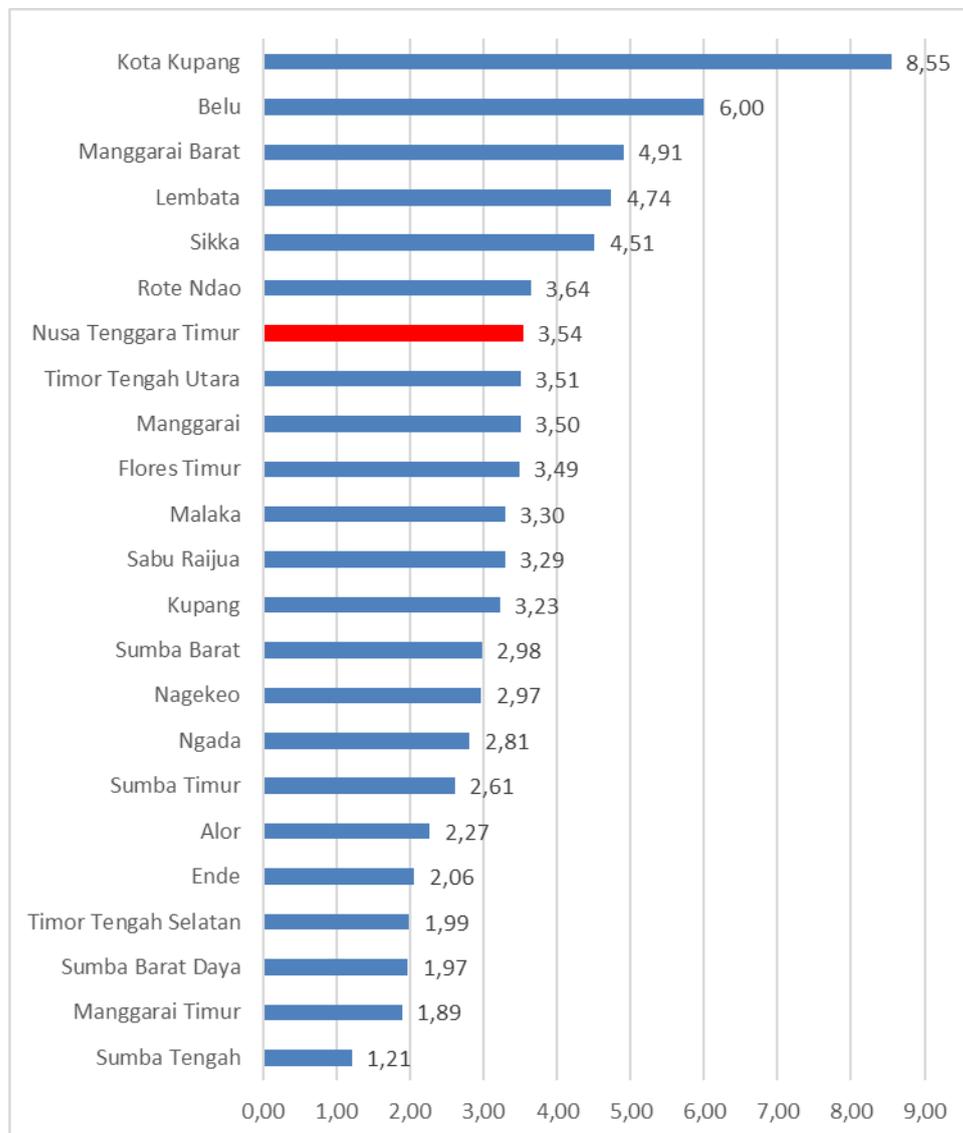


Sumber: BPS 2023. Diolah

Gambar 3.6.
Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia dan Provinsi, Februari 2023

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pengangguran terbuka bervariasi secara nyata menurut kabupaten/kota (Gambar 2.7). Hasil SAKERNAS 2022 menunjukkan bahwa TPT paling rendah di Kabupaten Sumba Tengah (1,21%) dan paling tinggi di Kota Kupang (8,55%). Lebih rendahnya TPT di Kabupaten Sikka dan di kabupaten lainnya dapat disebabkan karena sebagian besar dari penduduk bekerja bekerja di sektor pertanian yang cenderung lebih mudah dimasuki karena tidak memerlukan kualifikasi tenaga kerja yang tinggi. Sementara itu, TPT paling tinggi di Kota Kupang dapat disebabkan karena perekonomian didominasi oleh sektor nonpertanian yang

memerlukan kualifikasi tenaga kerja tertentu sehingga cenderung lebih sulit untuk dimasuki.

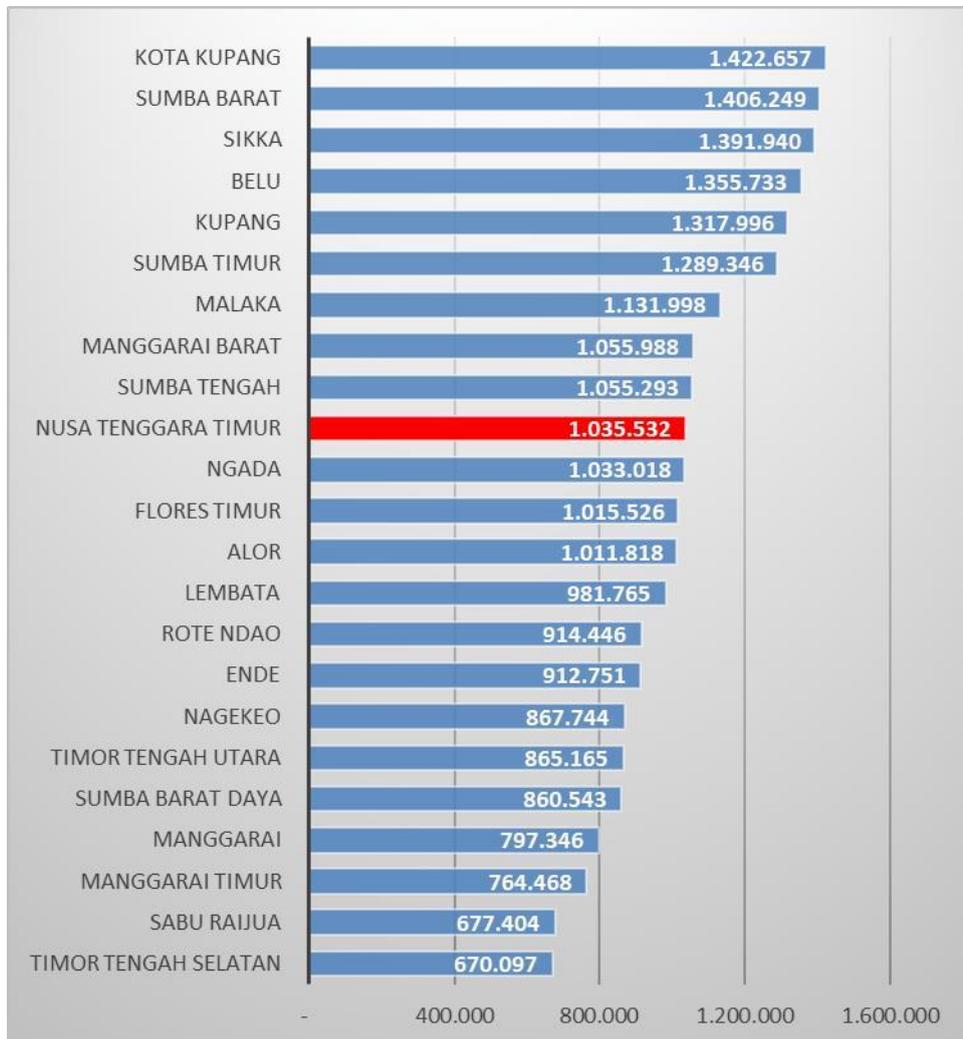


Sumber: ntt.bps.go.id. 2023 (diolah).

Gambar 3.7
Tingkat Pengangguran Terbuka menurut kabupaten/kota:
Nusa Tenggara Timur 2022

Rata-rata upah di Kabupaten/Kota Provinsi NTT terendah di Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2022 sebesar Rp. 670.097 dan tertinggi di Kota Kupang sebesar Rp. 1.422.657 (Gambar 2.8). Rendahnya upah ini disebabkan oleh umumnya tenaga kerja yang bekerja pada sector pertanian dan tingginya upah di

Kora Kupang karena pekerja bekerja pada sektor industri dan jasa yang lebih termoterisasi.

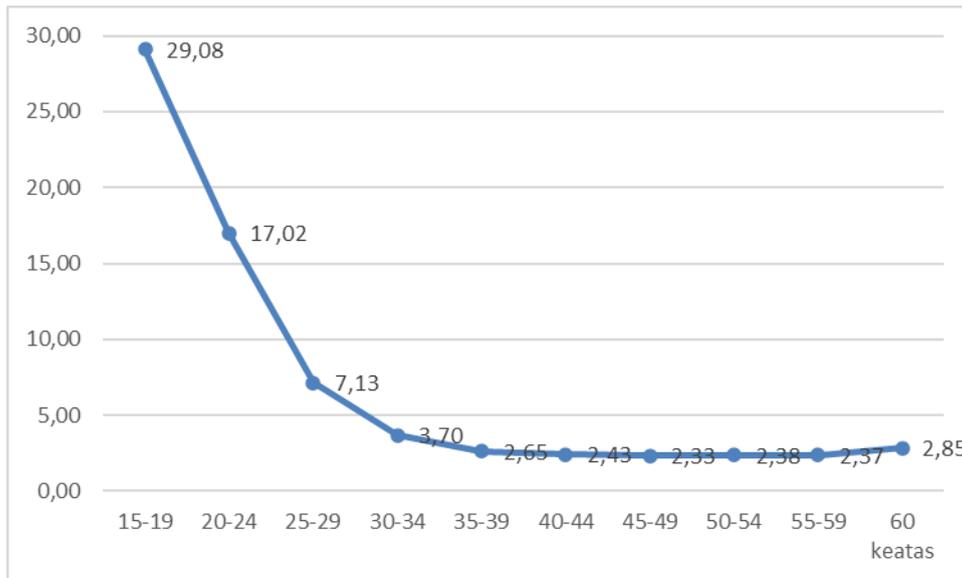


Sumber: BPS NTT 2023. Diolah

Gambar 3.8

Rata-rata Upah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTT. 2022

Tingkat Pengangguran Terbuka menurut kelompok umur di Provinsi Nusa Tenggara Timur disajikan dalam Gambar 2.9. TPT tertinggi pada kelompok usia 15-19 tahun (29,08) dan terendah pada kelompok usia 45-49 tahun (2,33)

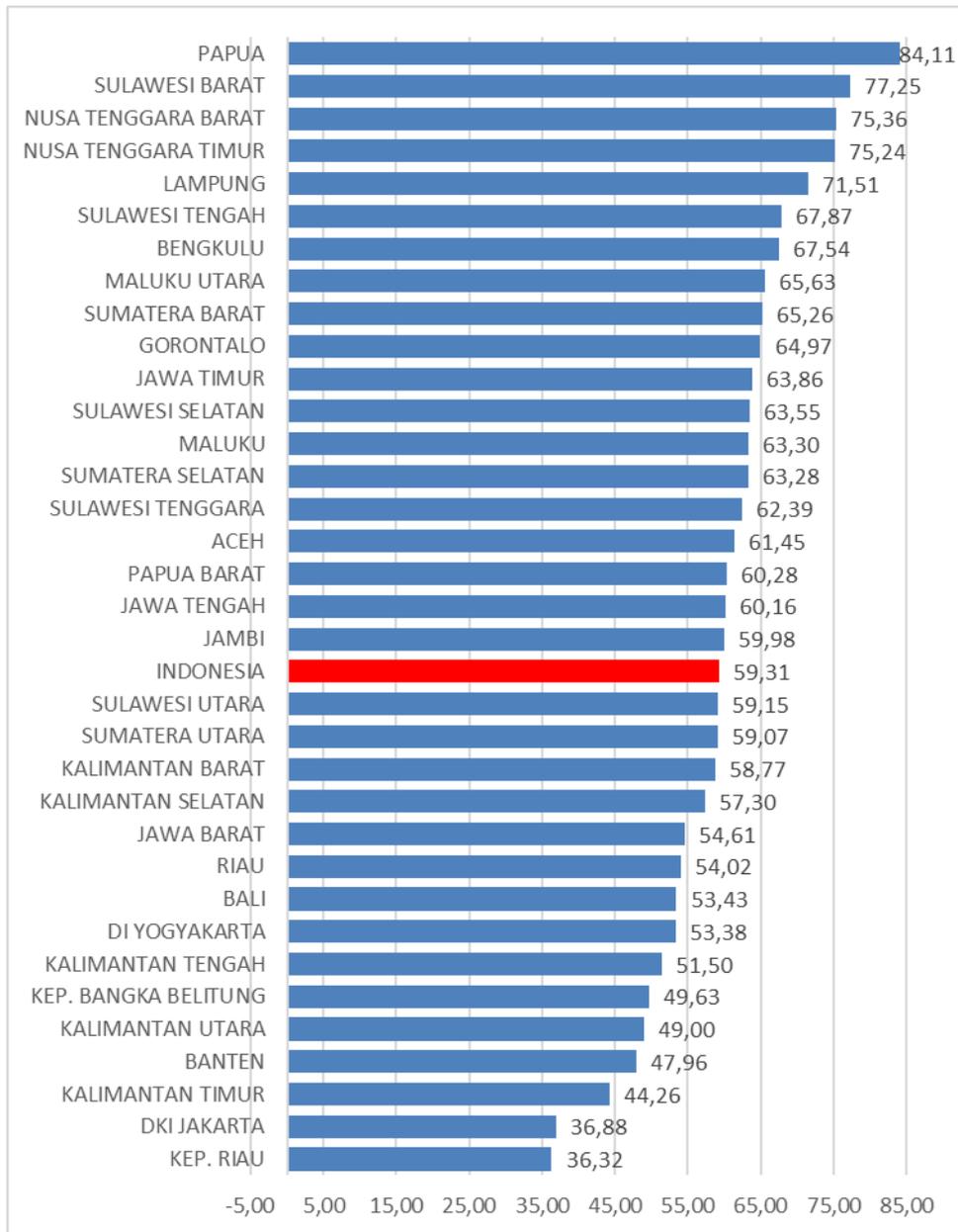


Sumber: BPS (2023a) (diolah).

Gambar 3.9
Tingkat Pengangguran Terbuka menurut kelompok umur:
Nusa Tenggara Timur 2022

3.2. Status Pekerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

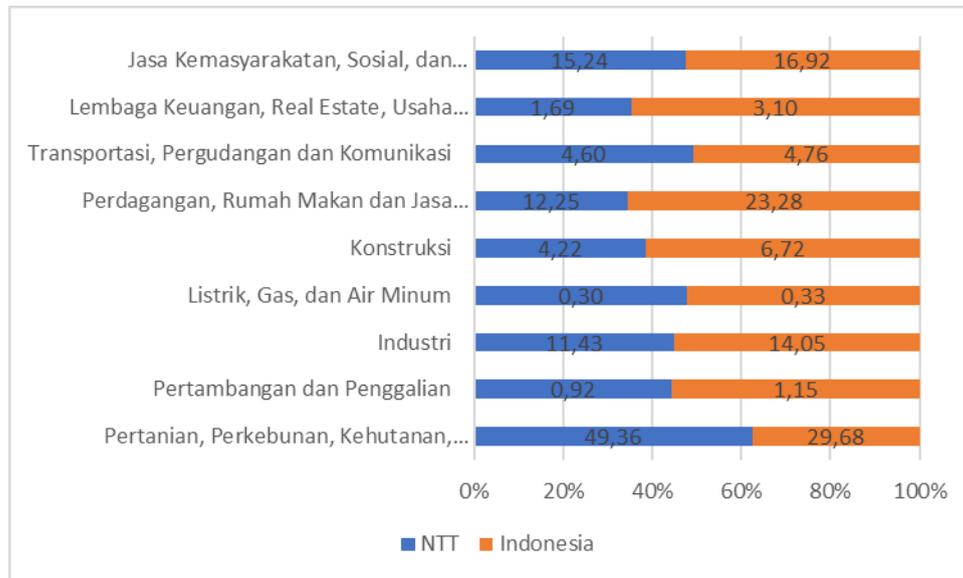
Sebagian besar penduduk yang bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur berstatus informal (Gambar 3.10). Hasil SAKERNAS 2022 menunjukkan bahwa 75,24% penduduk bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur berstatus informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian, dan pekerja keluarga/tidak dibayar).



Sumber: BPS 2023. diolah

Gambar 3.10
Distribusi Persentase Lapangan Kerja Informal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2022.

Distribusi pekerja menurut status pekrjaa utama di Provinsi Nusa Tenggara timur sebanyak 49,36% bekerja pada sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan. Proporsi pekerja pada sektor ini merupakan yang terbesar dan proprosi terkecil terjadi pada sektor Lisrik, Gas, dan Air Minum. Dibandingkan dengan Indonesia, pekerja pada sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan sebesar 29,68% (Gambar 3.11)

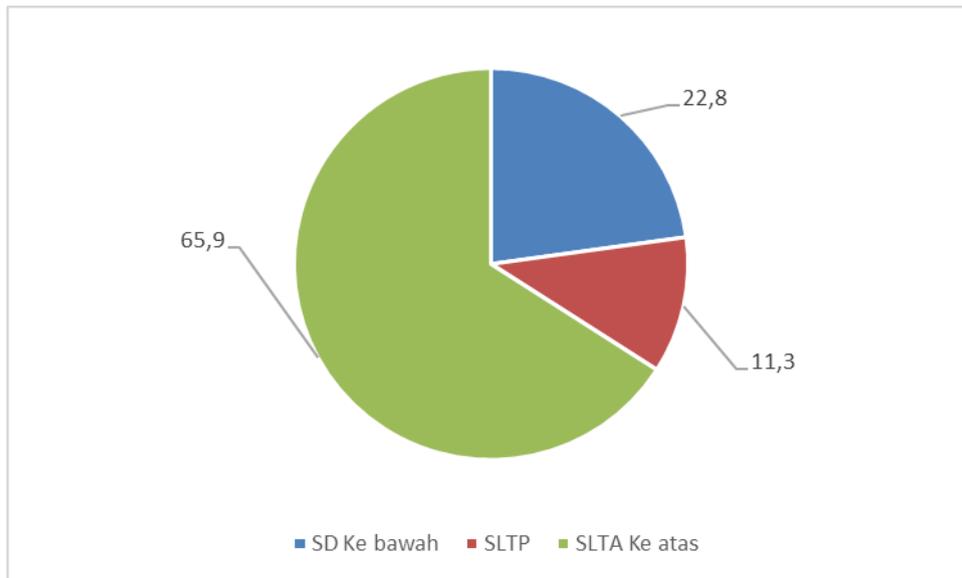


Sumber: BPS (2016a).

Gambar 3.11

**Distribusi persentase penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama:
Nusa Tenggara Timur dan Indonesia 2022**

Pada Gambar 3.12 disajikan distribusi pengangguran menurut pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Persentasi Pengangguran tertinggi pada lulusan SLTA ke atas sebesar 65,9%. Selanjutnya diikuti lulusan SD sebesar 22,8% dan lulusan SMP sebesar 11,3%. Hal ini disebabkan para pekerja lulusan SMP dan SD mau menerima bekerja pada sektor pertanian



Sumber: BPS 2023. Diolah

Gambar 2.12

Distribusi Pengangguran menurut Pendidikan, Provinsi NTT, 2023

Penduduk bekerja di 20 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur didominasi oleh penduduk bekerja sektor formal, paling tinggi di Kabupaten Manggarai Timur (93,5%) (Gambar 2.13). Hanya di Kota Kupang penduduk bekerja didominasi penduduk bekerja sektor formal (berusaha dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai) (63,1%). Pekerja keluarga/tidak dibayar mendominasi penduduk bekerja di 20 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari yang paling rendah 30,5% di Kabupaten Rote Ndao sampai yang paling tinggi 51,8% di Kabupaten Manggarai Timur.

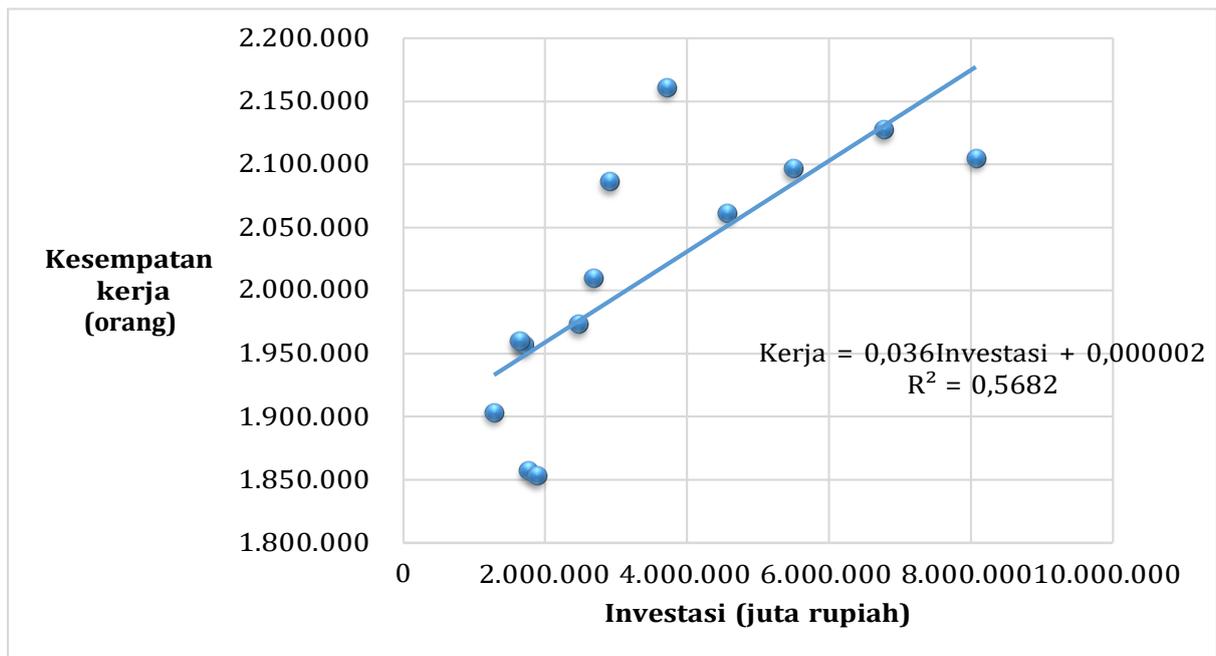
Menurut kelompok umur, hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan bahwa pola persentase penduduk bekerja sektor formal di Provinsi Nusa Tenggara Timur berbentuk huruf U terbalik: meningkat seiring dengan meningkatnya umur, mencapai puncak pada kelompok umur 25-29 tahun (22,6%), dan kemudian menurun dan mencapai tingkat paling rendah pada kelompok umur 65 tahun ke atas, hanya 2,3% (Gambar 3.22). Selain itu, penduduk bekerja usia 15-19 tahun dan 20-24 tahun merupakan penduduk bekerja yang paling rentan di Provinsi Nusa Tenggara Timur: 68,7% penduduk bekerja usia 15-19 tahun dan 50,1% penduduk bekerja usia 20-24 tahun di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah penduduk bekerja keluarga/tidak dibayar. Peningkatan status bekerja penduduk usia produktif paling

muda (15-24 tahun) juga merupakan salah satu agenda penting untuk optimalisasi penduduk usia produktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur karena masa bekerja mereka yang masih panjang, sekitar 40 – 49 tahun lagi jika akan bekerja hingga usia 64 tahun.

3.3. Investasi dan Kesempatan Kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam penyerapan angkatan kerja. Data investasi dan kesempatan kerja pada periode 2004-2018 menunjukkan bahwa investasi dan kesempatan kerja cenderung meningkat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, grafik garis linier antara investasi dan kesempatan kerja menunjukkan bahwa peningkatan investasi sebesar satu juta rupiah, akan menyerap tenaga kerja sebanyak 0,036 orang, atau investasi sebesar satu miliar rupiah akan menyerap tenaga kerja sebanyak 36 orang (Gambar 3.27). Artinya, investasi merupakan suatu instrumen untuk meningkatkan kesempatan kerja dan optimalisasi penduduk usia produktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara umum akan terjadi peningkatan kesempatan kerja jika pemangku kepentingan meningkatkan investasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Investasi yang dimaksud dalam bentuk pembangunan infrastruktur maupun investasi swasta.

Pada Bab 2 sudah didiskusikan permasalahan luaran pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu rendahnya investasi infrastruktur dalam kebutuhan dasar. Dalam hal jarak geografis, terdapat sejumlah kabupaten yang tidak dapat dilalui dengan jalur darat maupun laut. Hal ini menyulitkan bagi pemerataan pembangunan. Pemerintah perlu membangun infrastruktur, khususnya pembangunan pelabuhan, agar semua kabupaten dapat mudah dilalui dan terhubung. Selain itu, pendistribusian anggaran pembangunan sulit di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jika hanya mengandalkan jalur udara (penerbangan), maka kabupaten yang tidak dapat dilalui dengan jalur darat maupun laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur sulit mendapatkan porsi pembangunan yang memadai, sebagaimana halnya kabupaten lainnya yang dekat dengan ibu kota provinsi. Dalam rangka optimalisasi penduduk usia produktif, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dalam pemerataan pembangunan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Sumber: INDODAPOER Bank Dunia (diolah).

Gambar 2.13

Investasi dan Kesempatan Kerja: Nusa Tenggara Timur 2004-2018

3.4. Permasalahan ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencakup permasalahan angkatan kerja, pengangguran, lapangan pekerjaan, status pekerjaan, jam kerja, pekerja tidak dibayar dan penghasilan pekerja. Dalam hal angkatan kerja, sebagian besar angkatan kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur tinggal di perdesaan dan berpendidikan rendah. Dalam hal pengangguran, sebagian besar pengangguran terbuka berusia 15-29 tahun dan berpendidikan SLA ke atas.

Dalam partisipasi angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja paling rendah di Kota Kupang dan pada angkatan kerja berpendidikan menengah. Dalam hal pengangguran terbuka, tingkat pengangguran terbuka paling tinggi di Kota Kupang serta lebih tinggi pada angkatan kerja berusia 15-24 tahun, di perkotaan dan berpendidikan tinggi.

Dalam hal lapangan pekerjaan, sebagian besar penduduk bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja di sektor pertanian, terutama di perdesaan dan pada

penduduk bekerja berpendidikan rendah. Dalam hal status pekerjaan, sebagian besar penduduk bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja sebagai pekerja sektor informal, terutama sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar. Mayoritas penduduk bekerja usia muda, di perdesaan, perempuan, berpendidikan rendah, dan yang bekerja di sektor pertanian adalah pekerja keluarga/tidak dibayar.

Dalam hal jam kerja, pekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara rata-rata bekerja lebih singkat daripada pekerja Indonesia secara keseluruhan. Jam kerja pekerja perempuan, perdesaan, dan berpendidikan rendah lebih pendek daripada jam kerja pekerja lainnya. Dalam hal penghasilan, di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat kesenjangan penghasilan menurut jenis kelamin, tempat tinggal, dan pendidikan.

BAB 4

TIPOLOGI BONUS DEMOGRAFI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

4.1. Transisi Demografis di Indonesia

Transisi demografis tahap 1 (UN 2015) melalui perkiraan angka kelahiran dan angka kematian terjadi di Indonesia setelah perang kemerdekaan. Tingkat kelahiran sebesar 43 per 1000 kelahiran penduduk pada periode 1950-1955 menjadi 45 kelahiran per 1000 penduduk periode 1955 – 1960 (Gambar 4.1)

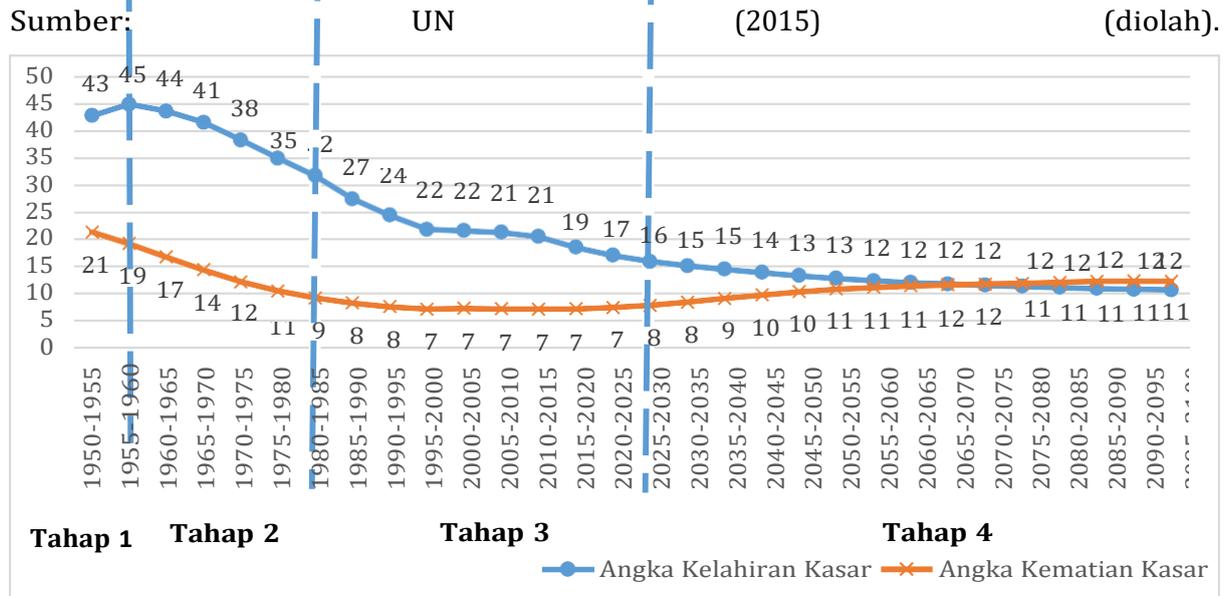
Transisi demografis tahap 2 terjadi pada periode 1960 – 1985. Transisi demografis 2 ini ditandai dengan kematian turun lebih cepat dari tingkat kelahiran. Pada periode 1960 – 1985 jumlah penduduk usia 0 -14 tahun meningkat. Hal ini ditandai dengan tanggungan penduduk usia produktif kelompok muda meningkat. Beban ekonomi penduduk usia produktif meningkat.

Transisi demografis tahap 3 di Indonesia terjadi sejak tahun 1985. Hal ini ditandai dengan tingkat kelahiran turun dengan akselerasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kematian. UN (2015) memperkirakan akan berlangsung hingga periode 2025 – 2030. Hal ini ditandai dengan angka fertilitas total sudah mencapai tingkat penggantian penduduk sebesar 2,1 anak per perempuan.

Pada tahap ini persentase penduduk usia produktif menurun. Dampaknya tanggungan usia tidak produktif muda menurun. Jumlah penduduk usia produktif kelompok tua meningkat. UN memperkirakan Indonesia akan mengalami transisi demografis sejak periode 2030 – 2035. Tahap ini ditandai ketika tingkat kelahiran dan kematian keduanya sudah rendah. Indonesia akan mengalami penurunan persentase penduduk usia tidak produktif muda dan peningkatan penduduk usia tidak produktif tua. Hal ini berdampak pada beban tanggungan usia produktif meningkat

Gambar 4.1.

Angka Kelahiran Kasar dan Angka Kematian Kasar: Indonesia 1950-2100



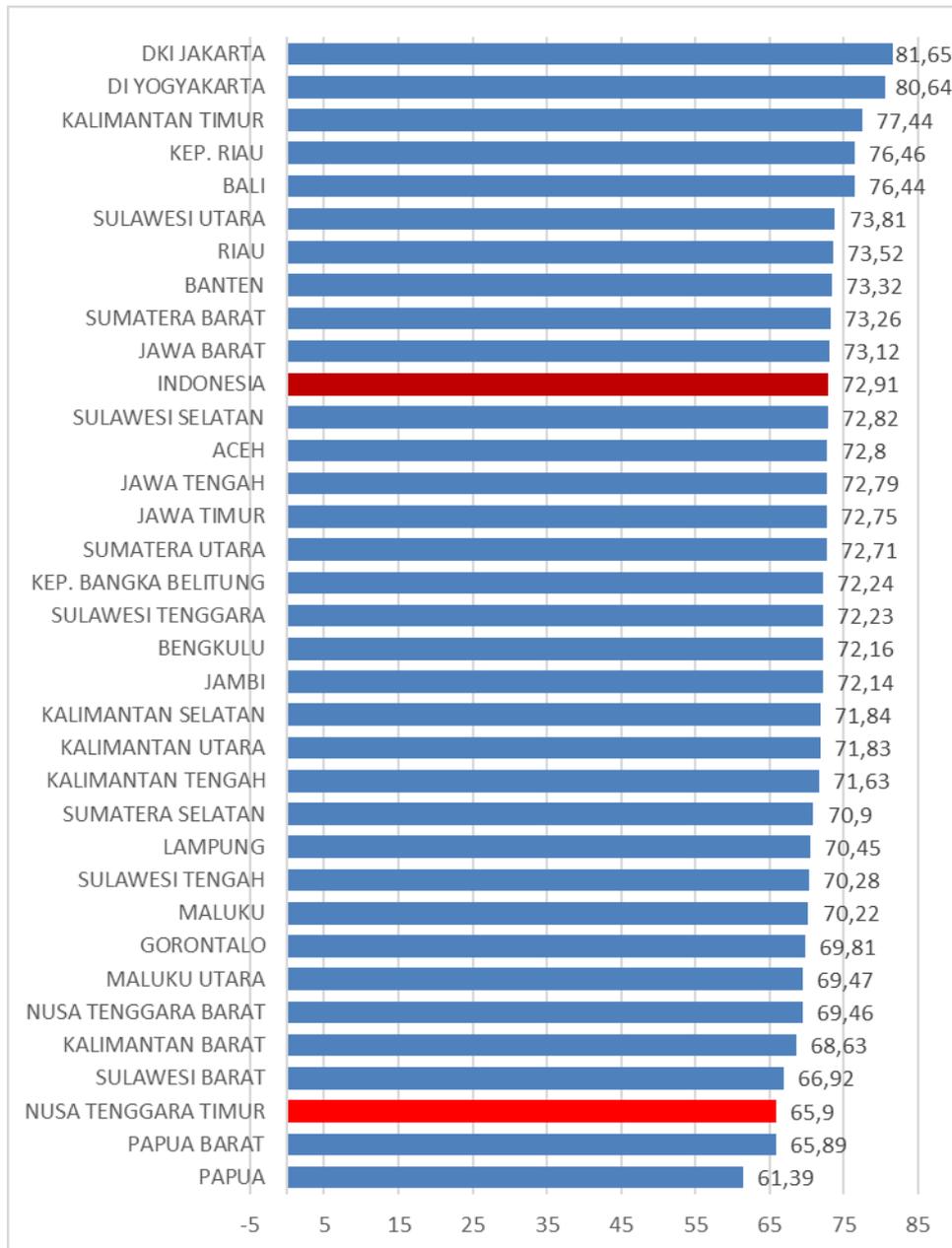
Atas waktu, transisi demografis tetap terjadi di Indonesia. Transisi demografis telah, sedang, terus belangsung di Indonesia. Transisi demografis akan memberi peluang kepada Indonesia untuk menikmati bonus demografi. Bonus demografi adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui dan dengan memanfaatkan jendela kesempatan. Apa yang dimaksud dengan jendela kesempatan? Jendela kesempatan adalah meningkatnya proporsi penduduk usia produktif. Pembangunan dan investasi dilakukan terhadap kelompok usia produktif. Usia produktif yang diinvestasi sebaik-baiknya akan menjadi mesin produksi ekonomi terbaik. Investasi pada penduduk usia produktif adalah pemanfaatan jendela kesempatan dengan menetapkan serta melakukan kebijakan strategis mengarah pada pembentukan penduduk usia produktif ini menjadi mesin produksi ekonomi.

Indonesia dengan banyaknya provinsi dan kabupaten/kota mempunyai jenis transisi demografis yang tidak sama. Daerah dengan program pembanguana manajemen kependudukan yang tertinggal mengalami pertumbuhan ekonomi yang

lebih rendah. Terdapat hubungan yang positif antara investasi dalam bidang kependudukan dan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sebuah wilayah di Indonesia. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) beserta seluruh kabupaten/kota yang tercakup di dalamnya lebih tertinggal dalam bidang investasi dan pengelolaan penduduk. Data pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang perlu dan dapat ditingkatkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi NTT secara umum saat ini sudah mengalami bonus demografis tahap 1. Apakah sudah dimanfaatkan? Bagaimana memanfaatkannya? Rajagukguk dkk (2015) menunjukkan bahwa jendela kesempatan demografis untuk menuai bonus demografis belum dimanfaatkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perencanaan dan program pembangunan belum didasarkan pada situasi struktur umur penduduk dimana persentase penduduk usia produktif sedang meningkat. Meskipun demikian, Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini sedang menikmati bonus demografis berupa pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat serta peningkatan dalam pencapaian pembangunan.

Pemanfaatan jendela kesempatan demografis untuk menuai bonus demografis dapat dilakukan dengan mengelola kondisi kependudukan dan pengelolaan penduduk melalui program keluarga berencana. Hal ini dilakukan merespon dan mengingat laju pertumbuhan penduduk dan tingkat kelahiran relatif tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya penduduk usia produktif yang jumlahnya sedang dan diperkirakan terus meningkat juga harus dikelola secara optimal agar mereka memiliki kemampuan dan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang diperlukan untuk menuai bonus demografis yang lebih besar di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi NTT menempati urutan nomor tiga paling bawah di Indonesia dan masih jauh di bawah Indonesia (Gambar 4.2)

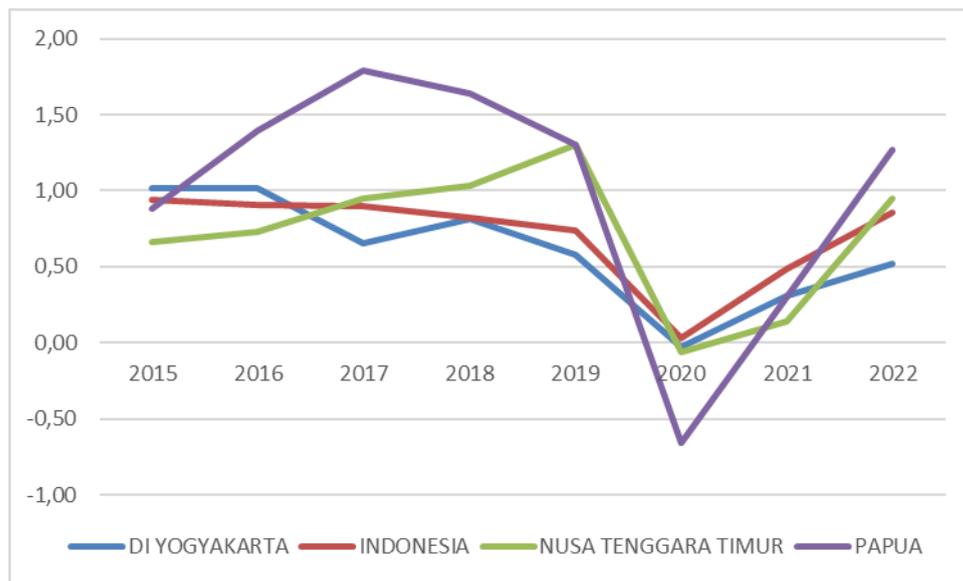


Sumber: BPS (2023). Diolah

Gambar 4.2

Indeks Pembangunan Manusia, Provinsi, 2022

Pada Gambar 4.3. diperlihatkan Angka Pertumbuhan IPM di Prvinsi NTT, D.I. Yogyakarta, Papua, dan Indonesia. Satu hal yang menjanjikan dari Gambar 4.3 adalah bahwa angka pertumbuhan IPM di Provinsi yang paling rendah seperti Papua dan NTT mengalami angka pertumbuhan cukup tinggi. Bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi dengan IPM tertinggi dan Indonesia. Hal ini menunjukkan kesempatan terjadinya cacing up dalam IPM. IPM pada provinsi terendah ini sedang mengejar IPM provinsi tertinggi dan IPM Indonesia.



Sumber : BPS. 2023. Diolah

Gambar 4.3.

Angka Pertumbuhan IPM Provinsi NTT, DI Yogyakarta, Indonesia, dan Papua.
2015-2022

Pada Tabel 4.1. diperlihatkan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut tipologi bonus demografi. Secara keseluruhan, Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dikatakan sedang menikmati bonus demografi pada tahap awal. Akan tetapi, ada dua (2) kabupaten yang masih dalam tahap pre-bonus demografi karena TFR yang masih di atas empat (4) anak per perempuan. Sebagian besar kabupaten/kota ada dalam tahap awal bonus demografi karena TFR sudah lebih rendah daripada empat (4) anak per perempuan. Selanjutnya, ada lima (5) kabupaten yang sudah pada tahap akhir bonus demografi karena persentase penduduk usia produktif yang sudah mulai menurun. Hal ini merupakan kesempatan dan tantangan untuk meningkatkan pencapaian pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 4.1

Kabupaten pada Provinsi Nusat Tenggara Timur menurut Tipe Bonus Demografi

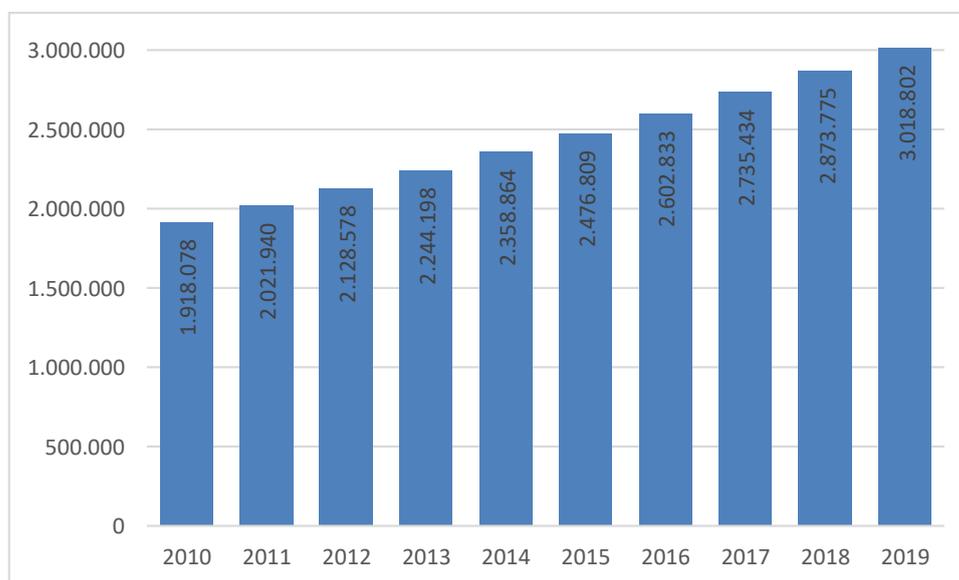
Tipe Bonus Demografi	Kabupaten/Kota
Pra	SUMBA BARAT DAYA
	SABU RAIJUA
Awal	SUMBA BARAT
	SUMBA TIMUR
	KUPANG
	TIMOR TENGAH SELATAN
	BELU

	LEMBATA
	FLORES TIMUR
	SIKKA
	ENDE
	NGADA
	ROTE NDAO
	NAGEKEO
	MANGGARAI TIMUR
	MALAKA
	KUPANG
Akhir	TIMOR TENGAH UTARA
	ALOR
	MANGGARAI
	MANGGARAI BARAT
	SUMBA TENGAH

Sumber: Omas Bulan Samosir dkk, LD FEB UI, tidak diterbitkan (2019) (diolah).

4.4. Pembangunan Bidang Kependudukan di Kabupaten Manggarai Barat

PDRB Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010–2019 diperlihatkan pada Gambar 21. Terjadi kecenderungan yang baik pada PDRB (harga Konstran 2010) dari Rp. 1.918.078 juta meningkat menjadi Rp. 3.018,802 juta pada tahun 2019.



Sumber: BPS Kabupaten Manggarai (2022) (diolah)

Gambar 4.4.

PDRB (harga Konstan, 2010): Kabupaten Manggarai Barat 2010 – 2019 (Juta Rupiah)

4.5. Kebijakan terkait data kependudukan dan Kependudukan

Kebijakan data dan administrasi kependudukan di Kabupaten Manggarai Barat masih dilaksanakan dan terpusat pada Dinas Dukcapil. Cakupan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemanfaatan data penduduk yang belum optimal dalam penentuan arah pembangunan. Pelayanan kependudukan yang belum optimal serta tindak lanjut pemanfaatan data masih terbatas.

Tabel 4.2

Pemetaan permasalahan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih terbatasnya cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Pelayanan Adminduk yang masih terpusat di Dinas Dukcapil belum sampai ke kecamatan
		Belum optimalnya sarana dan prasarana
		Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
Rendahnya pemanfaatan data kependudukan	Belum optimalnya tindak lanjut pemanfaatan data kependudukan	Masih ada OPD yang belum melakukan perjanjian kerja sama dan pemanfaatan data kependudukan.
		Belum optimalnya ketersediaan jaringan internet dalam akses pemanfaatan data
		Belum optimalnya sosialisasi kepada OPD terkait pentingnya pemanfaatan data

Sumber: Kabupaten Manggarai Barat, 2021. diolah

Tabel 4.3

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penduduk Ber-KTP	80,70	85,44	92,86	93,48	93
Ketersediaan database kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Persentase Kepenilikan Kartu Keluarga	88,18	86,71	84,82	84,90	100
Persentase Pasangan ber-Akta Nikah	22,20	22,57	30	35,21	55,91
Persentase anak berakte kelahiran	74,14	15,97	42,08	28	100
Persentase kepemilikan kartu identitas anak	0	3,71	5,90	13,24	9,51

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Manggarai Barat (2021).

Visi Nomor 2, Kabupaten Manggarai Barat, terdapat sasaran 'terkendalnya laju pertumbuhan penduduk. Sasaran ini dicapai dengan strategi (1) Peningkatan cakupan penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB) dengan arah kebijakan Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Peningkatan partisipasi/akseptor KB aktif, pendataan dan fasilitasi Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin berKB, dan Peningkatan Kapasitas tenaga penyuluh. Strategi (2) Peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk dengan arah kebijakan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pencegahan kasus pernikahan dini, pengembangan grand design kependudukan, dan peningkatan pemanfaatan data kependudukan.

Tabel 4.4.

Isu strategis, permasalahan, dan tantangan pembangunan kuantitas penduduk termasuk pada masa pencemi COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Isu strategis	Permasalahan	Tantangan
Belum optimalnya ketahanan keluarga/ melemahnya ketahanan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • masih lemahnya komitmen dan dukungan taeholders erhadap program KKBPK, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran; • masih tingginya jumlah anak yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja masih rendah. • Sarana prasarana yang ada di

	<p>di inginkan dari setiap keluarga, yaitu sekitar 3 sampai dengan 4 anak (TFR 3.6)</p> <ul style="list-style-type: none"> • pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif juga muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE belum dipahami secara optimal • pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender, tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB; • peran bidan dan tenaga lapangan KB dalam konseling KB belum optimal 	<p>lapangan tidak proposional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya peran aktif Poktan dalam meningkatkan ketahanan keluarga
<p>Belum optimalnya penyelenggaraan program KB / kurangnya kemandirian ber-KB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi (unmet need.17.) • Masih terdapat kesenjangan dalam kesertaan ber-KB (contraceptive prevalence rate/CPR) • Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (drop out) masih tinggi, • Penggunaan alat dan obat Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (non MKJP) terus meningkat • Rendahnya kesertaan KB Pria • Kualitas pelayanan KB Jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas pelayanan KB, terutama dalam rangka pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan alat kontrasepsi tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. • Masih terbatasnya cakupan layanan KB • Kurangnya jumlah tenaga penyuluh sementara jumlah keluarga terus bertambah • Rendahnya penggunaan alat kontrasepsi MKJP • Rendahnya kesertaan Pria ber KB • Kesadaran dan Peran Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP/PPKBD) dalam membantu tugas PKB/PLKB untuk mendukung

		program KB secara komprehensif;
Kurangnya pemahaman tentang kesehatan Reproduksi	<ul style="list-style-type: none"> • Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi • Masih banyaknya perkawinan usia muda Ditandai dengan median usia kawin pertama perempuan yang rendah • Terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja • Tingginya perilaku seks pranikah di sebagian kalangan remaja, berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi • Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku berisiko masih rendah • Cakupan dan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK/R/M) belum optimal. 	Pengaruh media sosial dan lingkungan lebih cepat
Belum terlaksananya pemetaan pengendalian penduduk	<ul style="list-style-type: none"> • Masih tingginya jumlah keluarga Pra Sejahtera/KPS sebanyak 11.486 Keluarga dari total keluarga Manggarai Barat sebanyak 51.321 keluarga atau 22.38 % (Pendataan Keluarga, BKKBN 2021) • Pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anak masih rendah; • Partisipasi, pemahaman dan kesadaran keluarga/orang tua yang memiliki remaja Dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih rendah; 	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat

	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas hidup Lanjut usia (lansia) dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia masih belum optimal; • Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga; • Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB /pelestarian Peserta KB Aktif (PA) 	
<p>Belum adanya pemahaman yang sama tentang pentingnya pembangunan kependudukan, KB dan pembangunan keluarga dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB belum memadai, sehingga masih banyak kebijakan pembangunan sektor lain yang tidak sinergi dengan pembangunan bidang KKB; • Belum semua kebijakan perencanaan program dan penganggaran yang terkait dengan bidang KKB dimasukkan dalam perencanaan daerah, • Koordinasi pembangunan bidang KKB dengan program pembangunan lainnya masih lemah (antara lain; koordinasi dengan program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan/PKH, Jamkesmas/Jamkesda, Jampersal, PNPM, dan SJSN Kesehatan),serta penanganan kebijakan pembangunan bidang KKB selama ini masih bersifat parsial. 	<p>Adanya ego sektoral</p>

BAB 5

SITUASI DAN PERMASALAHAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

5.1. Dinamika Kependudukan dan Pembangunan

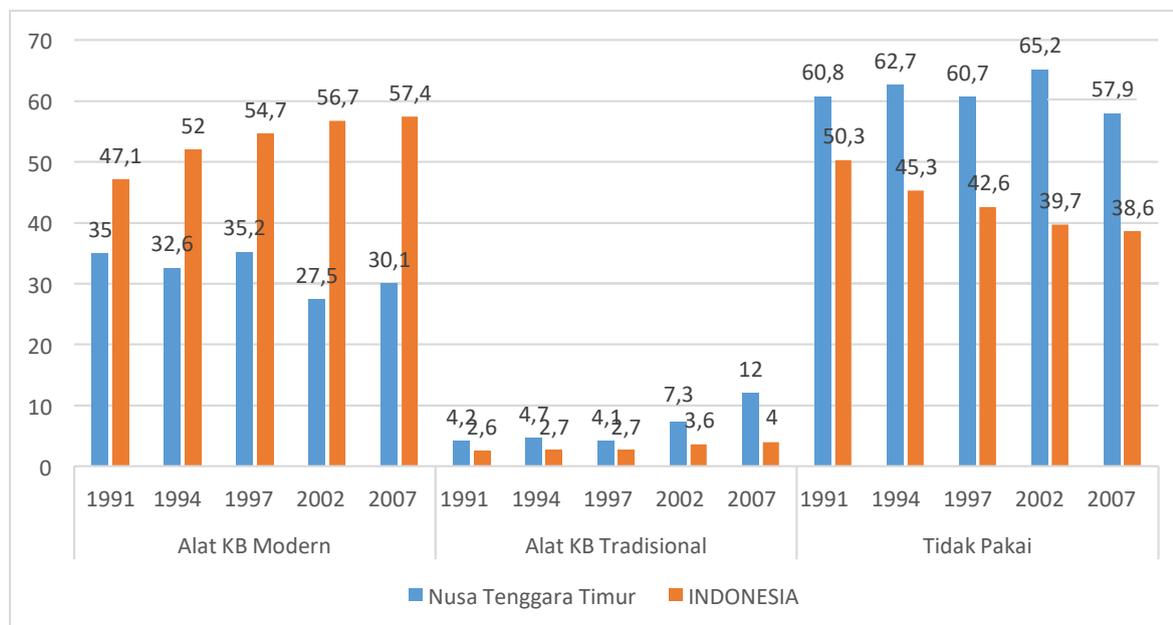
Dinamika kependudukan memiliki hubungan yang timbal balik dengan pembangunan (UN 1995, Hayes 1995). Artinya, dinamika kependudukan menentukan pencapaian pembangunan dan merupakan hasil dari pembangunan. Negara-negara dengan laju pertumbuhan penduduk yang rendah cenderung memiliki pencapaian pembangunan yang lebih baik. Negara-negara dengan pencapaian pembangunan yang lebih baik cenderung memiliki laju pertumbuhan penduduk yang rendah. Sebagai contoh, secara global Norwegia dan Swiss masing-masing menduduki peringkat pertama dan ketiga dalam pencapaian pembangunan manusia. Angka pertumbuhan penduduk hanya sekitar satu persen di kedua negara ini.

Dinamika kependudukan meliputi proses demografis (*demographic process*) dan keluaran demografis (*demographic outcome*). Proses demografis terdiri dari kelahiran, kematian, dan migrasi. Keluaran demografis mencakup jumlah dan pertumbuhan penduduk, struktur umur dan jenis kelamin penduduk, serta persebaran penduduk. Proses demografis menentukan keluaran demografis. Jika tingkat kelahiran di suatu wilayah tinggi maka laju pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut tinggi.

Dinamika kependudukan mempengaruhi pembangunan melalui keluaran demografis. Keluaran demografis akan menentukan proses pembangunan, yang antara lain mencakup tabungan/investasi, pemanfaatan lahan dan tenaga kerja, konsumsi barang dan jasa, pengeluaran publik, serta perdagangan internasional dan keuangan. Sebagai contoh, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat mengakibatkan tingkat tabungan dan investasi rendah, tekanan penduduk terhadap lahan besar, dan peningkatan angkatan kerja yang pesat. Hal ini selanjutnya dapat mengakibatkan produktivitas lahan dan tenaga kerja serta upah tenaga kerja rendah, yang kemudian dapat menyebabkan keunggulan komparatif suatu wilayah rendah dan impor bahan baku dan perlengkapan produksi yang penting tinggi.

Pembangunan mempengaruhi dinamika kependudukan melalui keluaran pembangunan. Keluaran pembangunan meliputi tingkat dan jenis *output* barang dan jasa, tingkat upah dan jumlah pekerja, tingkat pendidikan, status kesehatan dan gizi, kualitas perumahan dan sanitasi serta kualitas lingkungan. Selanjutnya, keluaran pembangunan akan menentukan proses demografis. Akses terhadap pendidikan yang rendah, khususnya bagi perempuan, merupakan kontributor utama tingkat kelahiran yang tinggi. Akses terhadap layanan kesehatan yang rendah telah menyebabkan tingkat kematian tinggi di beberapa wilayah. Tingkat upah yang rendah di suatu wilayah telah mengakibatkan migrasi ke luar ke wilayah utama pembangunan.

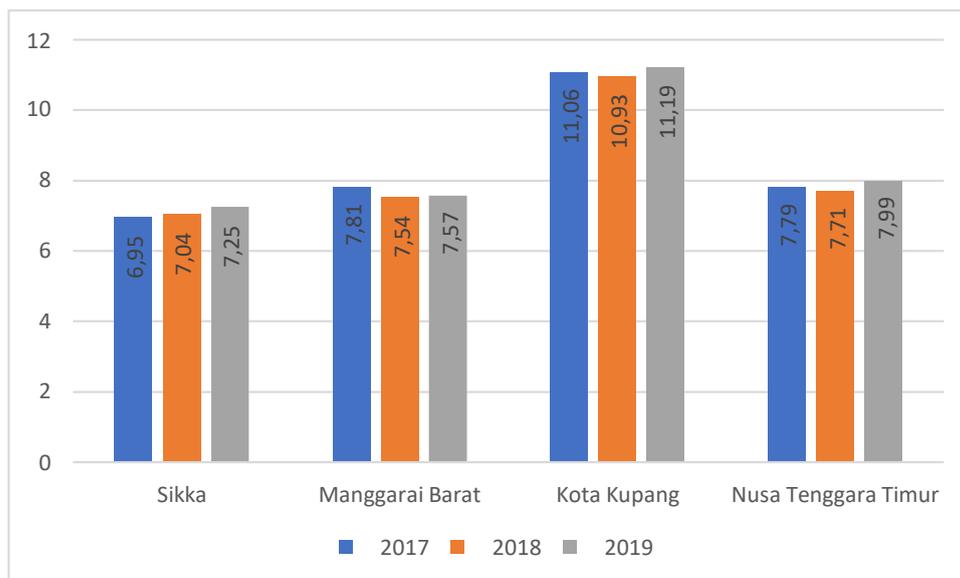
Persentase Wanita Berstatus Kawin dan Pemakaian Alat/Cara KB, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia, 1991-2007 (Gambar 5.1.). Di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat proporsi perempuan kawin yang lebih besar tidak menggunakan alat KB dibandingkan dengan yang memakai alat KB (modern dan tradisional). Selanjutnya terlihat terjadinya kecenderungan peningkatan pemakaian alat KB tradisional. Disajikan bahwa di Provinsi Nusa Tenggara Timur terjadi kecenderungan penurunan persentase pemakaian alat KB modern dari tahun 1991 – 2007, sementara untuk Indonesia terjadi kenaikan.



Sumber: BPS, 2022 (diolah).

Gambar 5.1.
 Persentase Wanita Berstatus Kawin dan Pemakaian Alat/Cara KB: Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia SDKI 1991 – SDKI 2007

Rata-rata lama sekolah di pada beberapa kabupaten terpilih dan Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlihatkan dalam Gambar 5.2 tahun 2017 – 2019. Kota Kupang mempunyai rata-rata lama sekolah sebesar berturut – turut sebesar 11,06, 10,93, dan 11,19 tahun. Sementara Kabupaten Sikka mempunyai rata-rata lama sekolah pada tahun 2017, 2018, dan 2019 sebesar 6,95, 7,04, dan 7,25 tahun. Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai rata-rata lama sekolah sebesar 7,79, 7,71 dan 7,99 tahun pada tahun 2017, 2018, dan 2019.

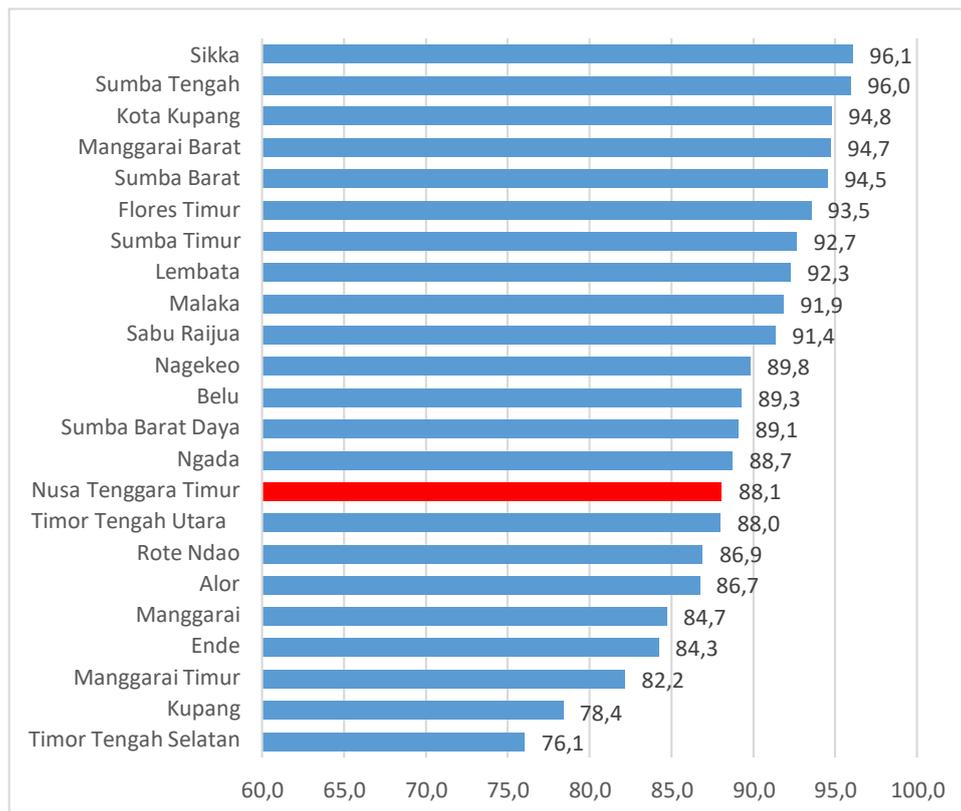


Sumber: BPS, 2023. Diolah

Gambar 5.2

Rata-rata Lama Sekolah, Kabupaten Sikka, Manggarai Barat, Kota Kupang dan NTT, 2017 – 2019

Gambar 5.3 menyajikan Persentase Penduduk yang Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut Kabupaten tahun 2020. Persentase tertinggi terjadi pada Kabupaten Sikka (95,09%) dan terendah pada kabupaten Tmor Tengah Selatan (76,05%). Sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur angka ini mencapai 88,08%.

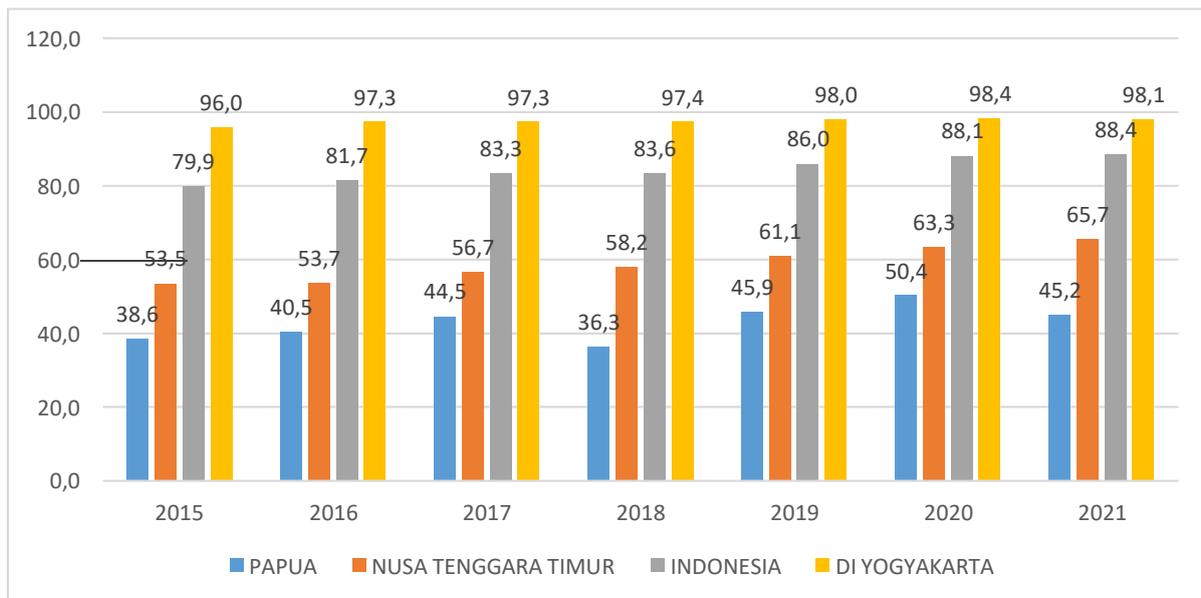


Sumber: BPS NTT 2023. diolah

Gambar 5.3
Persentase Penduduk yang Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK), 2020

Pada Gambar 5.4. diperlihatkan Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 pada beberapa provinsi tertentu dan Indonesia. diperlihatkan Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 di Indonesia tahun 2015 tercatat sebesar 79,9% dan pada tahun 2021 mencapai 88,4%. Persentase ini terendah di dan tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta. Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0 - 17 tahun di provinsi Papua sebesar 38,6% tahun 2015 dan mencapai 45,2 % tahun 2021. Sementara itu Provinsi DI Yogyakarta persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 -17 tahun pada tahun 2015 mencapai 96% dan pada tahun 2021 sudah mencapai 98,1%.

Pencapaian persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 pada Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 58,5% tahun 2015 dan sebesar 65,7% pada tahun 2021.



Sumber: BPS (2022) (diolah).

Gambar 5.4

Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun Provinsi Papua, NTT, DI Yogyakarta dan Indonesia, 2015 - 2021

5.2. Situasi Keluaran Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

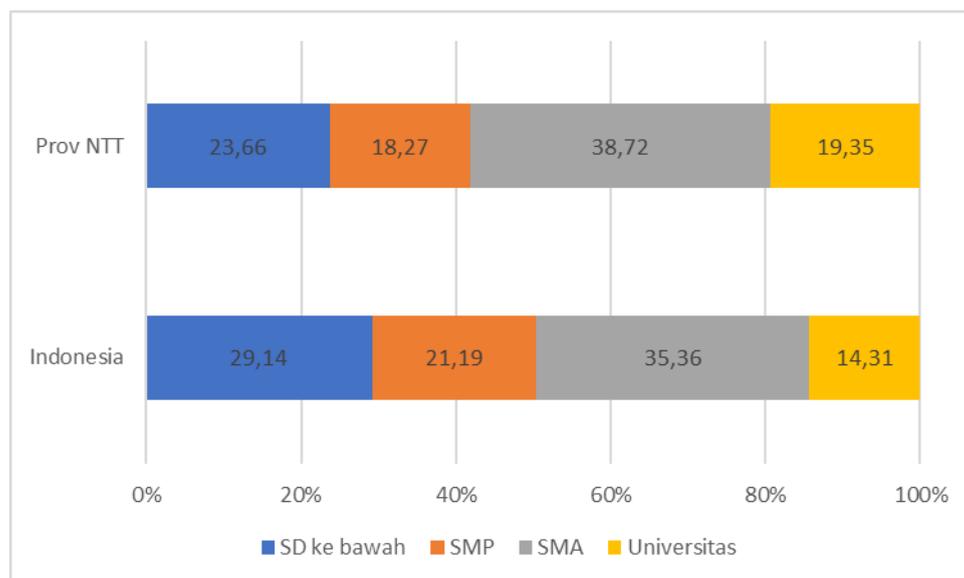
Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang tertinggal dalam pembangunan. Dalam hal pendidikan, penduduk usia lima tahun ke atas di Provinsi Nusa Tenggara Timur 1,9 kali lebih cenderung untuk tamatan sekolah dasar (SD) atau kurang dan 0,5 kali kurang cenderung untuk berpendidikan menengah ke atas dibandingkan penduduk usia lima tahun ke atas di Indonesia secara keseluruhan (Gambar 2.1). Dalam hal partisipasi pendidikan, pada tahun 2015, secara nasional Angka Partisipasi Murni di Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor tujuh paling rendah untuk pendidikan SD, nomor tiga paling rendah untuk pendidikan sekolah menengah pertama, dan nomor empat paling rendah untuk pendidikan sekolah menengah atas.

Dalam hal kesehatan, derajat kesehatan dan akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih rendah daripada derajat kesehatan dan akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan nasional. Hasil Riset Kesehatan Dasar 2013 (Kementerian Kesehatan 2013) menunjukkan bahwa secara nasional prevalensi kurang gizi pada anak usia bawah lima tahun paling tinggi di Provinsi

Nusa Tenggara Timur (lebih dari 50%). Prevalensi kurang gizi pada penduduk usia 5-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, dan usia 18 tahun ke atas juga termasuk yang paling tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih rendah daripada cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan nasional. Selanjutnya, secara nasional prevalensi risiko kurang energi kronis pada perempuan usia 15-49 tahun paling tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lebih lanjut, pengetahuan tentang keberadaan fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, bidan praktek dan rumah bersalin, serta pos pelayanan terpadu, termasuk yang paling rendah di di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gambar 5.5

Penduduk berumur lima tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan: Nusa Tenggara Timur dan Indonesia 2020



Sumber: sp2023.bps.go.id (diolah).

Dalam hal kualitas lingkungan, pada tahun 2014, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekitar 28% rumah tangga tidak memiliki akses terhadap sumber air minum bersih (air kemasan, air isi ulang, leding, sumur/bor pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung). Secara nasional angka ini sebesar 13%, paling rendah di DKI Jakarta (0,1%) dan paling tinggi di Kalimantan Barat (62,2%). Artinya, rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2,5 kali kurang cenderung untuk memiliki akses terhadap sumber air minum bersih daripada rumah tangga Indonesia secara keseluruhan.

Dalam hal penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan, 62,5% dari rumah tangga di Indonesia menggunakan listrik atau gas/elpiji sebagai bahan bakar utama untuk memasak. Angka ini paling rendah di Maluku Utara (0,5%) dan paling tinggi di DKI Jakarta (87,7%). Hanya 1,4% dari rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan sebagai bahan bakar utama untuk memasak. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Timur hampir 122 kali kurang cenderung untuk menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan sebagai bahan bakar utama untuk memasak dibandingkan rumah tangga Indonesia secara keseluruhan.

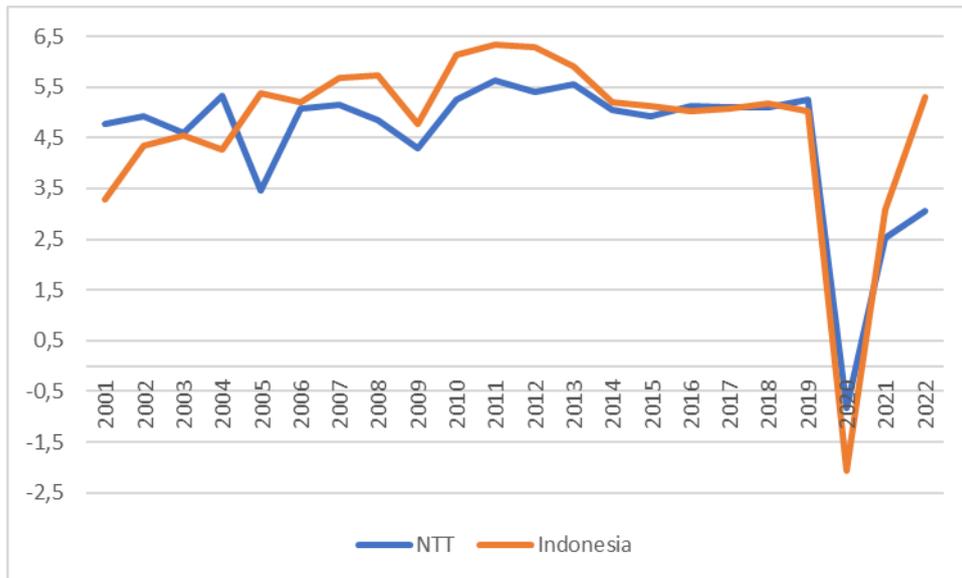
Dalam hal sanitasi, pada tahun 2014, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekitar 87% rumah tangga akses tidak memiliki akses terhadap sanitasi layak. Secara nasional angka ini sebesar 39%, paling rendah di DKI Jakarta (13%) dan paling tinggi di Nusa Tenggara Timur (87%). Artinya, rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Timur hampir 11 kali kurang cenderung untuk memiliki akses terhadap sanitasi layak daripada rumah tangga Indonesia secara keseluruhan.

Dalam hal kualitas perumahan, pada tahun 2014, 8,1% dari rumah tangga di Indonesia memiliki jenis lantai terluas rumah berupa tanah. Angka ini paling rendah di Kalimantan Timur (0,4) dan paling tinggi di Nusa Tenggara Timur (36%). Hal ini berarti rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih dari enam kali lebih cenderung untuk memiliki rumah dengan jenis lantai terluas tanah daripada rumah tangga di Indonesia secara keseluruhan.

Dalam hal akses terhadap sumber energi, pada tahun 2014, hanya tiga persen dari rumah tangga di Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap sumber penerangan listrik. Angka ini paling rendah di DKI Jakarta (nol persen) dan paling tinggi di Papua (53%). Rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber penerangan listrik sebesar 26% di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Artinya, rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih dari 11 kali kurang cenderung untuk memiliki akses terhadap sumber penerangan listrik daripada rumah tangga Indonesia secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur berfluktuasi selama periode 2001-2013 dengan kecenderungan yang meningkat (Gambar 5.4). Laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan di Provinsi Nusa Tenggara Timur meningkat dari 4,8% pada tahun 2001 menjadi 5,6% pada tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional pada periode 2001-2004 dan lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi nasional pada periode 2005-2013, dengan perbedaan yang semakin mengecil pada tahun 2013. Hal ini berarti Provinsi Nusa Tenggara Timur sedang mengejar pertumbuhan ekonomi nasional yang berpotensi untuk menciptakan bonus demografi.

Pada Gambar 5.6 diperlihatkan Laju Pertumbuhan Produk Domestic Bruto atas Harga Berlaku Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2001- 2022. Dari tahun 2001 sampai 2005 angka ini lebih tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dibandingkan dengan Indonesia. Namun selanjutnya pada periode tahun 2006 – 2022, laju Pertumbuhan PDB Indonesia lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Sumber: www.bps.go.id (diolah).

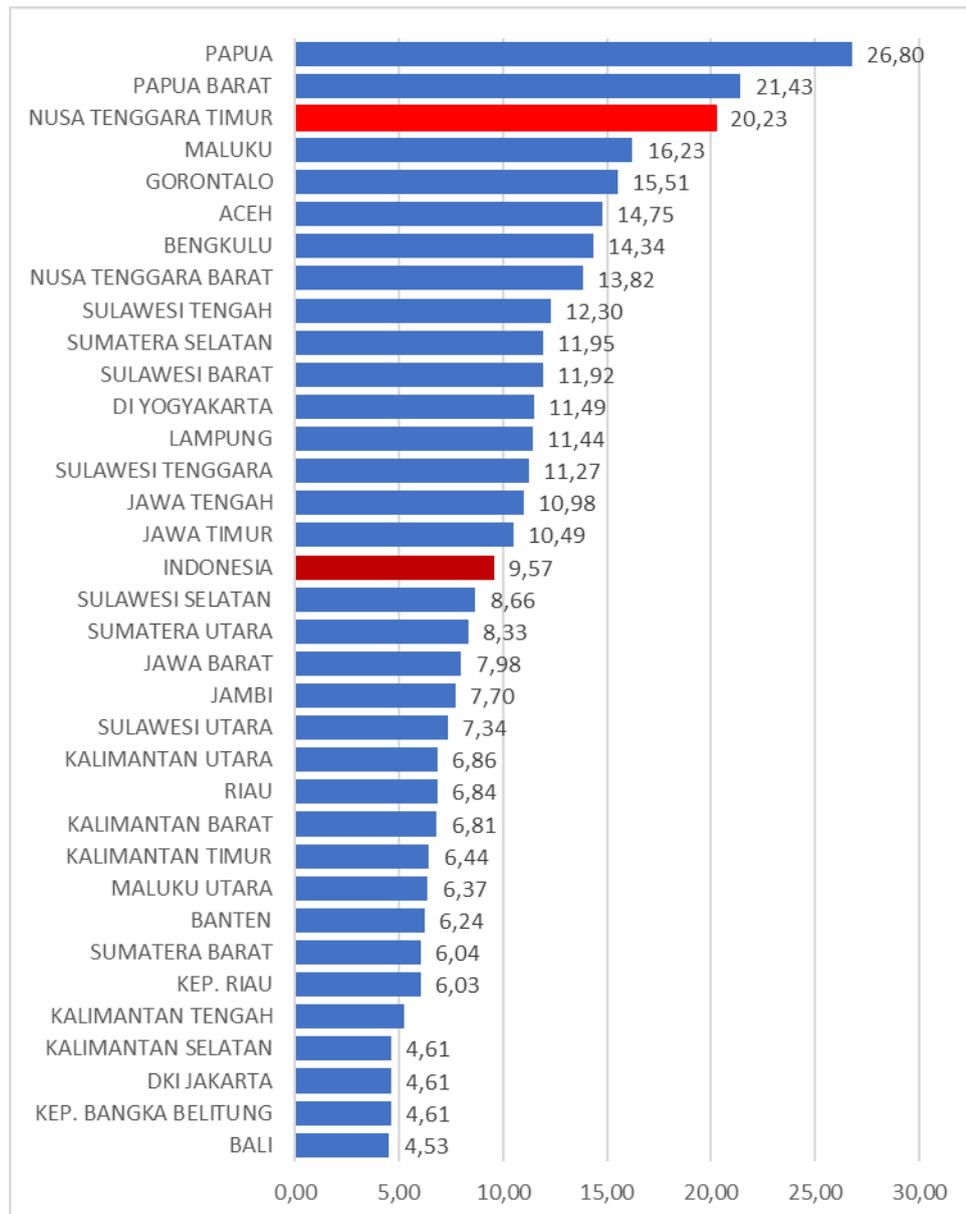
Gambar 5.6

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan: Nusa Tenggara Timur dan Indonesia 2001-2022 (persen)

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi paling miskin ketiga di Indonesia, setelah Papua dan Papua Barat (Gambar 5.7). Pada tahun 2016, secara nasional 11% dari penduduk Indonesia miskin. Angka ini paling rendah di DKI Jakarta (4%) dan paling tinggi di Papua (28%). Penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 22% pada tahun 2014. Artinya, penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2,3 kali lebih cenderung untuk miskin daripada penduduk Indonesia secara keseluruhan.

Gambar 5.7

Persentase penduduk miskin menurut provinsi: Indonesia Agustus 2022



Sumber: www.bps.go.id (diolah).

Dengan situasi pembangunan yang tertinggal, Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati urutan yang ke-32 dari 34 provinsi di Indonesia dalam hal pencapaian pembangunan manusia. Pada tahun 2015, indeks pembangunan manusia (IPM) nasional sebesar 69,6, terendah di Papua (57,3) dan tertinggi di DKI Jakarta (78,9). IPM Nusa Tenggara Timur sebesar 62,7 pada tahun 2015. Pencapaian pembangunan manusia yang relatif rendah ini turut berdampak pada proses demografis, kelahiran, kematian, dan migrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

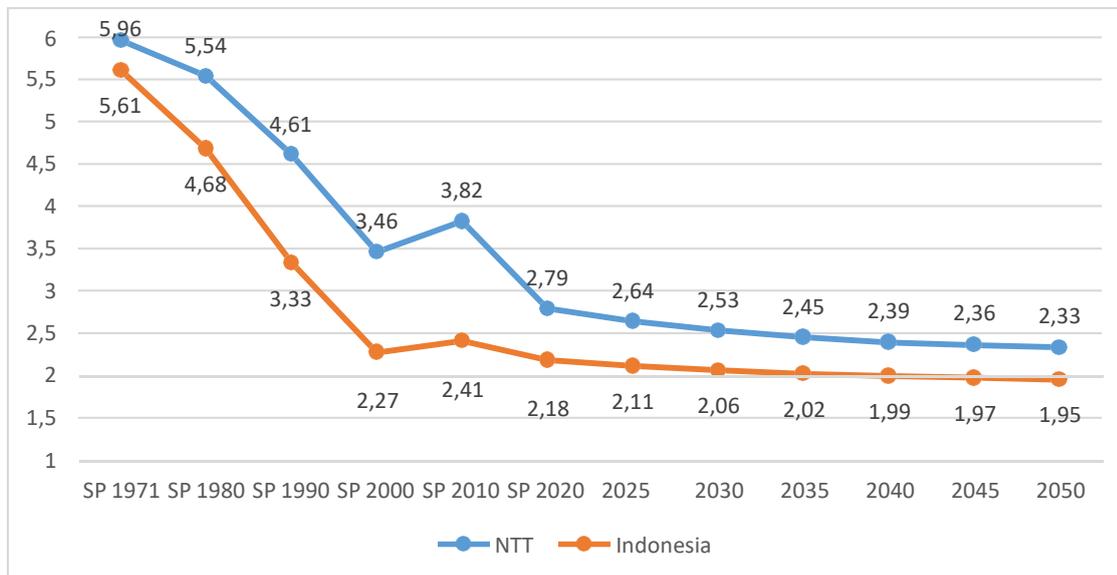
5.3. Situasi Proses dan Keluaran Demografis di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tingkat kelahiran relatif tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, paling tinggi di Indonesia, dan secara konsisten lebih tinggi dari tingkat kelahiran nasional. Hasil Sensus Penduduk (SP) 1971 menunjukkan bahwa angka fertilitas total (*total fertility rate/TFR*) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 5,96 anak per perempuan, 0,35 anak per perempuan lebih tinggi daripada TFR nasional (Gambar 2.4). Selanjutnya, laju penurunan tingkat kelahiran di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih lambat dari laju penurunan tingkat kelahiran nasional. Selama periode 1971-2010, TFR Provinsi Nusa Tenggara Timur turun sebesar 36% menjadi 3,82 anak per perempuan, sementara TFR nasional turun sebesar 57% menjadi 2,41.

Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kemandekan penurunan fertilitas (*stalling fertility*) pada periode 2000-2010 dimana TFR naik dari 3,46 anak per perempuan menurut SP 2000 menjadi 3,82 anak per perempuan menurut SP 2010. Kemandekan penurunan fertilitas ini dapat disebabkan karena penduduk perempuan Timor-Leste yang datang ke Provinsi Nusa Tenggara Timur membawa perilaku fertilitas tinggi mereka yang menyebabkan fertilitas meningkat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proyeksi TFR di Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut SP 2020, pada tahun 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, dan 2050 akan menurun menjadi (berturut-turut) sebesar 2,79; 2,64; 2,53; 2,45; 2,39; 2,36, dan 2,33. Proyeksi ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia.

Gambar 5.7

Angka Fertilitas Total: Nusa Tenggara Timur 1971-2050 (anak per perempuan)



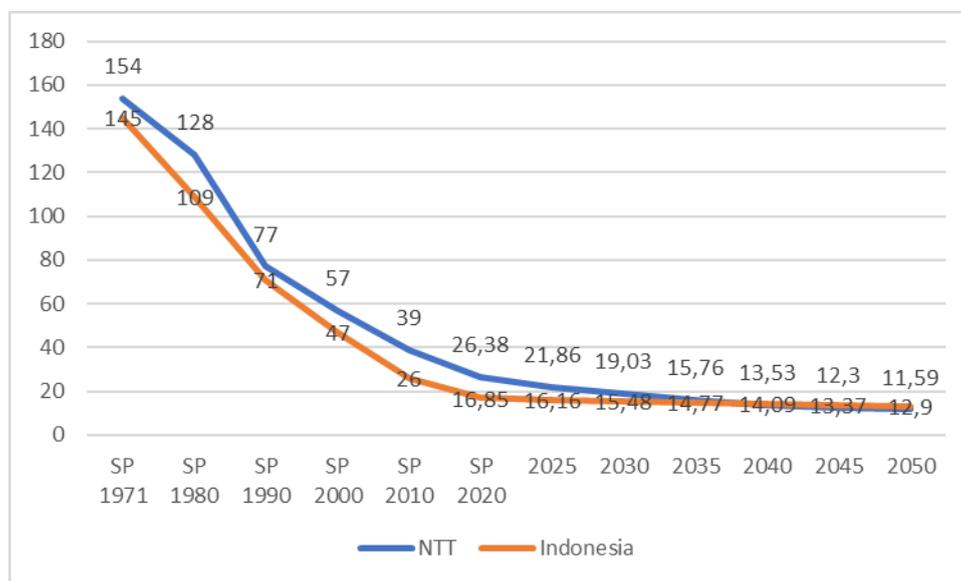
Sumber: www.bps.go.id (diolah).

Relatif tingginya dan lambatnya penurunan tingkat kelahiran di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Secara budaya, keluarga-keluarga di Provinsi Nusa Tenggara Timur memilih mempunyai anak banyak, terutama di daerah perdesaan, karena anak dipandang mempunyai nilai ekonomi bagi rumah tangga. Anak dipandang oleh orang tua mereka dan anggota keluarga lain sebagai suatu aset yang berharga dan sebagai suatu sumber keamanan. Selain itu, orang tua akan bergantung pada anak untuk jaminan hari tua mereka karena sumber daya yang terbatas, ketidakamanan pangan, dan derajat moneterisasi ekonomi yang rendah. Selanjutnya, preferensi anak banyak berarti lebih banyak anggota keluarga berbagi pekerjaan rumah tangga, seperti mengambil air atau kayu bakar bahkan pada usia yang muda.

Tingkat kematian juga relatif tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, menduduki urutan kedelapan paling tinggi, dan secara konsisten lebih tinggi daripada tingkat kematian nasional. Hasil SP 1971 menunjukkan bahwa angka kematian bayi (AKB) di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 154 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, lebih tinggi sembilan kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup daripada AKB nasional (Gambar 5.8). Selanjutnya, laju penurunan tingkat kematian di Provinsi

Nusa Tenggara Timur lebih lambat dari laju penurunan tingkat kematian nasional. Selama periode 1971-2010, AKB Provinsi Nusa Tenggara Timur turun sebesar 75% menjadi 39 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, sementara AKB nasional turun sebesar 82% menjadi 26. Hal ini mengindikasikan bahwa bayi di Provinsi Nusa Tenggara Timur 1,5 kali lebih cenderung untuk mengalami kematian bayi daripada bayi Indonesia secara keseluruhan.

Gambar 5.8
Angka Kematian Bayi: Nusa Tenggara Timur 1971-2050
(kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup)



Sumber: www.bps.go.id (diolah).

Tingkat kematian yang relatif tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat disebabkan oleh cakupan pelayanan kesehatan maternal yang relatif rendah di provinsi ini. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menunjukkan bahwa sebagian besar persalinan (59%) di Provinsi Nusa Tenggara Timur terjadi bukan di suatu fasilitas kesehatan. Cakupan persalinan di suatu fasilitas kesehatan secara nasional adalah 63%, paling rendah di Maluku Utara (21%) dan paling tinggi di Bali (98%). Selain itu, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih kualifikasi tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sekitar 57%. Angka ini sebesar 83% secara nasional, paling rendah di Papua (40%) dan paling

tinggi di DKI Jakarta (98,7%). Selanjutnya, cakupan pelayanan bayi baru lahir (*postnatal care*) sekitar 37% di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Angka ini sebesar 48% secara nasional, paling rendah di Papua (11%) dan paling tinggi di DI Yogyakarta (90%). Artinya, cakupan persalinan di suatu fasilitas kesehatan, persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, dan pelayanan bayi baru lahir di Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing 2,5 kali, 3,7 kali dan 1,6 kali lebih rendah daripada cakupan persalinan di suatu fasilitas kesehatan, persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, dan pelayanan bayi baru lahir di Indonesia secara keseluruhan.

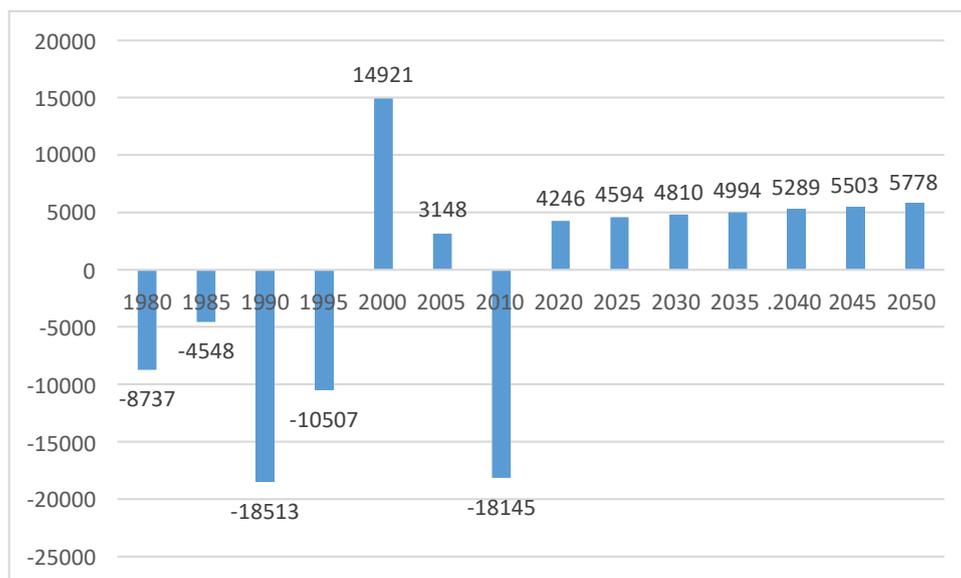
Letak geografis yang sulit serta terbatasnya sarana pembangunan telah membuat Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi bukan tujuan utama migrasi di Indonesia. Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 menunjukkan bahwa hanya empat persen dari penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tempat lahirnya bukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (migran seumur hidup) (BPS 2015). Angka ini secara nasional sebesar 11,8%, paling rendah di Jawa Timur (2,5%) dan paling tinggi di Kepulauan Riau (47,7%). Sebagian besar migran seumur hidup di Provinsi Nusa Tenggara Timur lahir di luar negeri (40,9%), diikuti dengan di Jawa Timur (14,7%), Sulawesi Selatan (10,4%), dan Jawa Tengah (6,9%). Migran seumur hidup yang berasal dari luar negeri kemungkinan adalah mereka yang lahir di Timor-Leste.

Hasil SUPAS 2015 juga menunjukkan bahwa hanya 1,2% dari penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tempat tinggalnya lima tahun yang lalu bukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (migran risen). Angka ini secara nasional sebesar 2,5%, paling rendah di Jawa Timur (0,7%) dan paling tinggi di Kepulauan Riau (14,2%). Sebagian besar migran risen di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2005 bertempat tinggal di Bali (11,5%), diikuti dengan di Sulawesi Selatan (10%), Jawa Timur (9,4%), dan Kalimantan Timur (8,3%).

Selama periode 1980-2015 Provinsi Nusa Tenggara Timur cenderung mengalami migrasi risen neto negatif (penduduk yang meninggalkan Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih banyak daripada penduduk yang datang ke Provinsi Nusa Tenggara Timur), kecuali pada tahun 2000, 2005, dan 2015 (Gambar 5.9). Migrasi risen neto negatif ini dapat disebabkan karena penduduk mencari sarana pendidikan dan kesempatan kerja di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, migrasi risen neto positif (penduduk yang datang ke Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih

banyak daripada penduduk yang meninggalkan Provinsi Nusa Tenggara Timur) pada tahun 2000 dan 2005 dapat disebabkan karena besarnya arus penduduk Timor-Leste yang datang ke Indonesia untuk menjadi warga negara Indonesia setelah Timor-Leste memperoleh kemerdekaannya.

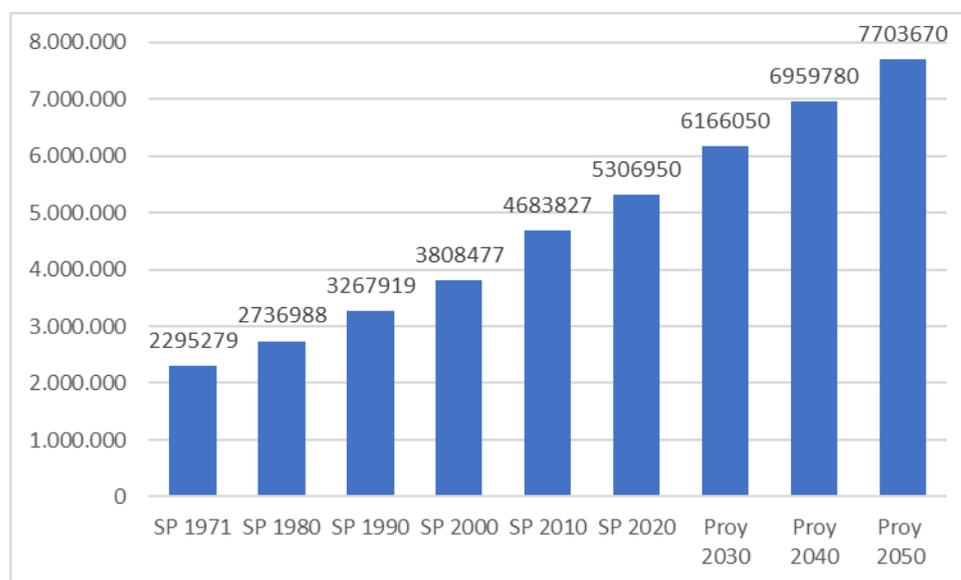
Gambar 5.9
Migrasi risen neto: Nusa Tenggara Timur 1980-2050



Sumber: www.bps.go.id. 2023. (diolah).

Proses demografis mempengaruhi keluaran demografis di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur meningkat dari 2,3 juta jiwa pada tahun 1971 menjadi 4,7 juta jiwa pada tahun 2010 (Gambar 5.10). Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur turun dari 2,31% per tahun pada periode 1971-1980 menjadi 1,64% per tahun pada periode 1990-2000 dan kemudian meningkat menjadi 2,07% per tahun pada periode 2000-2010 (Gambar 2.8). Peningkatan pertumbuhan penduduk ini dapat disebabkan karena peningkatan fertilitas dan migrasi masuk penduduk Timor-Leste pada periode 2000-2010.

Gambar 5.10
Jumlah penduduk: Nusa Tenggara Timur 1971-2050

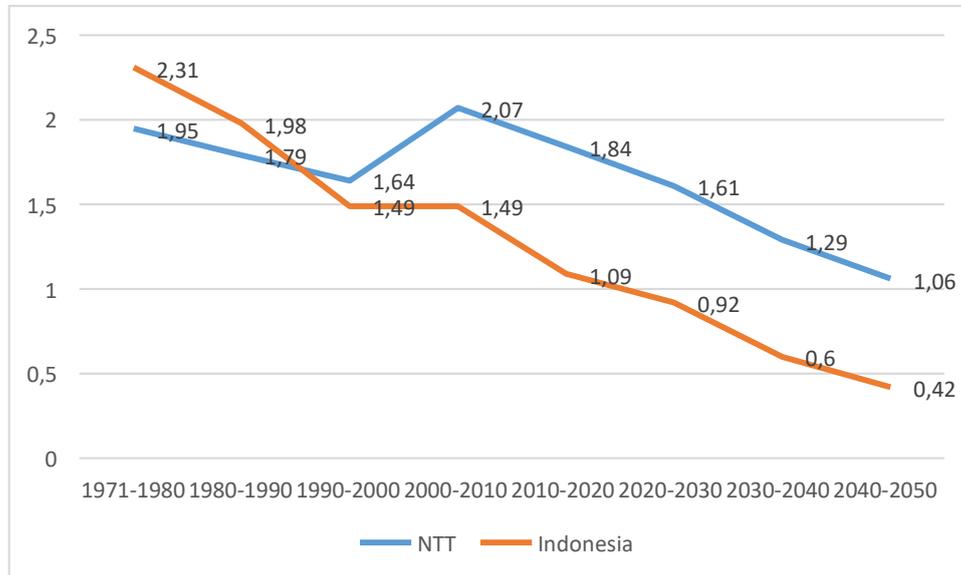


Sumber: www.bps.go.id, 2023, diolah).

Berdasarkan laju pertumbuhan penduduk pada periode 1971-1980 waktu penggandaan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 36 tahun dan meningkat menjadi 43 tahun berdasarkan laju pertumbuhan penduduk pada periode 1990-2000 dan kemudian menurun menjadi 34 tahun berdasarkan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000-2010. Jika Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak mengalami migrasi masuk penduduk dari Timor-Leste pada periode 2000-2010, terdapat kemungkinan tingkat kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur menurun. Jika tidak ada migrasi masuk penduduk dari Timor-Leste dan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur menurun menjadi 1,55% pada periode 2000-2010, maka penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur akan berjumlah sekitar 4,4 juta jiwa pada tahun 2010. Jadi, migran Timor-Leste yang memasuki Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih bertahan hidup pada tahun 2010 diperkirakan antara 200 ribu dan 300 ribu jiwa.

Gambar 5.11

**Angka pertumbuhan penduduk: Nusa Tenggara Timur dan Indonesia
1971-2050 (persen per tahun)**

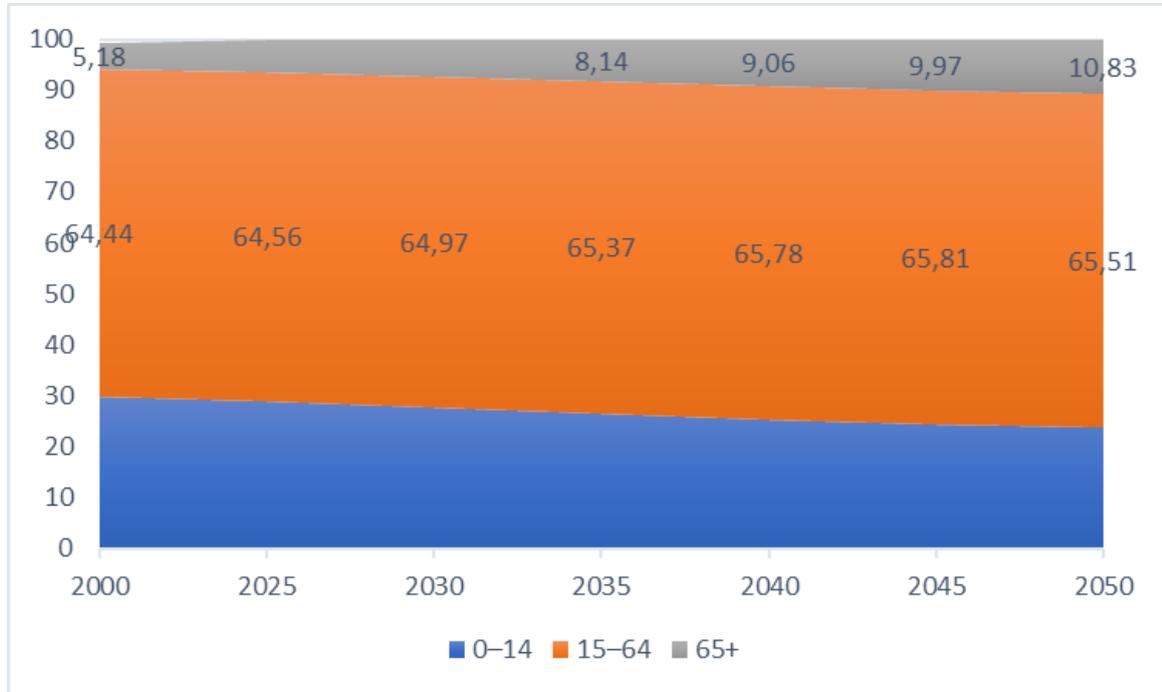


Sumber: www.bps.go.id (diolah).

Struktur umur penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur muda hingga tahun 1990 dimana penduduk usia muda (0-14 tahun) lebih dari 40% dan antara muda dan tua (*intermediate*) pada tahun 2000 dan 2010 dimana penduduk usia muda sudah kurang dari 40% (Gambar 2.9). Persentase penduduk usia muda Provinsi Nusa Tenggara Timur menurun menjadi 37,1% pada tahun 2000 dan meningkat menjadi 37,3% pada tahun 2010. Sementara itu, penduduk usia produktif (15-64 tahun) meningkat dari 53,7% pada tahun 1971 menjadi 58,7% pada tahun 2000 dan menurun menjadi 57,7% pada tahun 2010 dan penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) meningkat secara perlahan dari 3,2% pada tahun 1971 menjadi 5,0% pada tahun 2010. Peningkatan persentase penduduk usia muda dapat disebabkan karena adanya peningkatan fertilitas dan karena migrasi masuk penduduk usia muda dari Timor-Leste. Penurunan persentase penduduk usia produktif dapat disebabkan karena migrasi neto negatif penduduk usia produktif.

Gambar 5.12

Proyeksi Distribusi Penduduk Usia 0-14 tahun, 15-64 tahun, dan 65+ Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020 - 2050

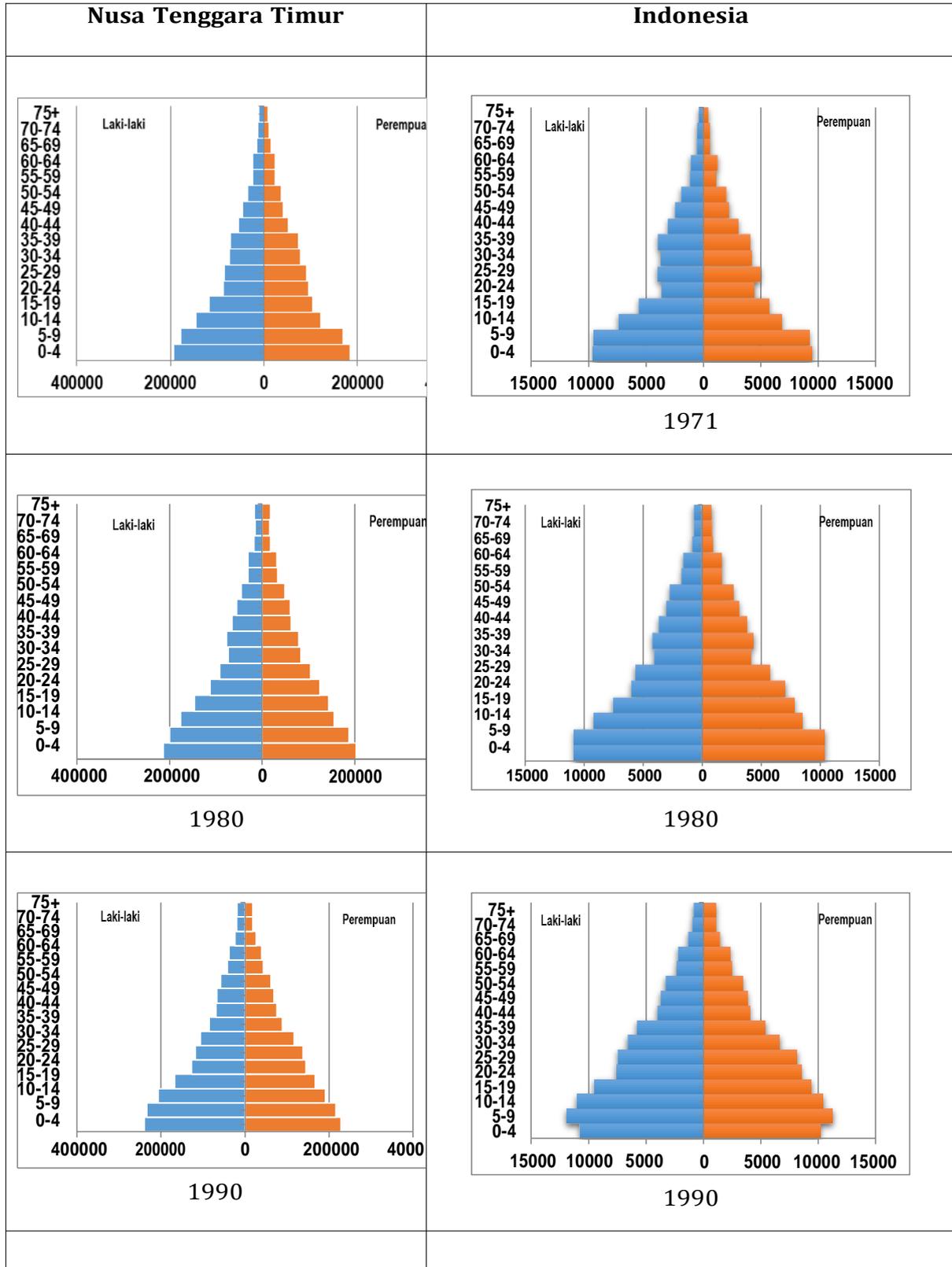


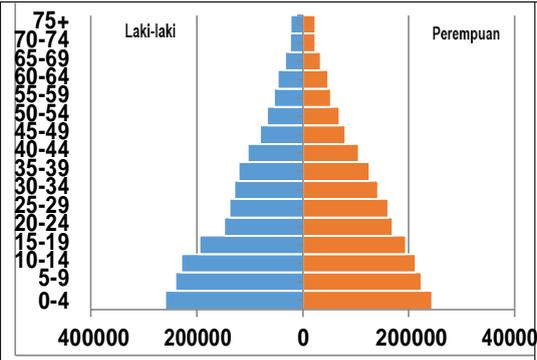
Sumber: Bappenas, 2023. diolah

Proses demografis yang terjadi selama periode 1971-2010, khususnya migrasi neto negatif penduduk usia produktif dan migrasi masuk penduduk Timor-Leste, mengakibatkan piramida penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap ekspansif (dasar piramida paling lebar) hingga tahun 2010 (Gambar 5.13). Sementara itu, piramida penduduk Indonesia sudah mulai konstruktif (lebar dasar piramida berkurang) sejak tahun 1990 karena tingkat kelahiran dan kematian yang terus turun. Hasil proyeksi penduduk Indonesia 2010-2055 (Bappenas dkk 2022) menunjukkan bahwa piramida penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur akan tetap ekspansif hingga tahun 205- karena tingkat fertilitas dan mortalitas yang relatif masih tinggi dan migrasi neto negatif.

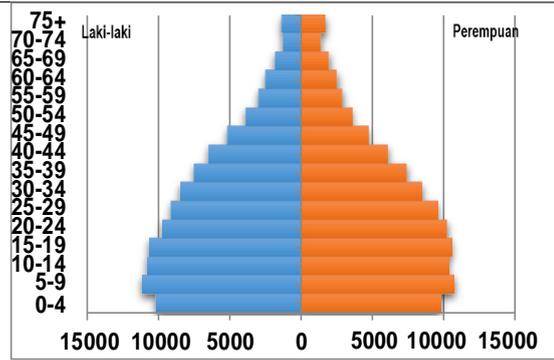
Gambar 5.13

Piramida Penduduk: Nusa Tenggara Timur dan Indonesia 1971-2050

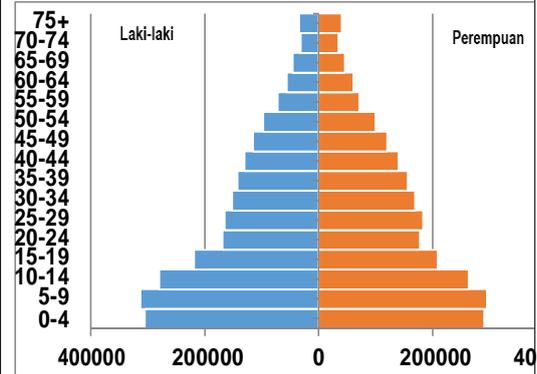




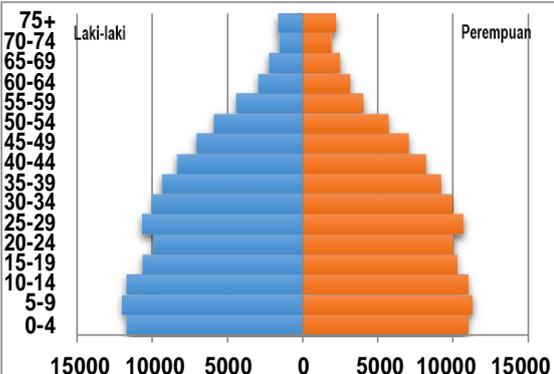
2000



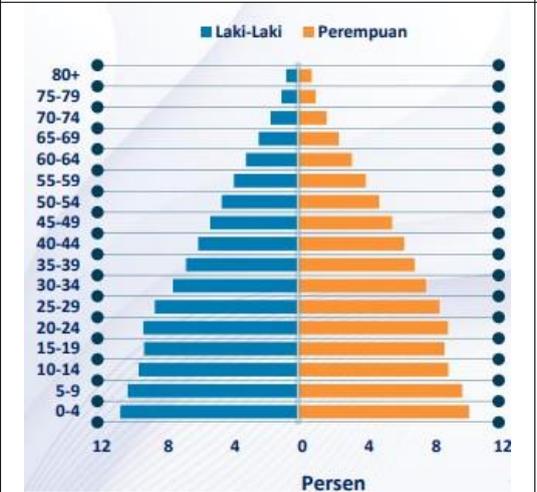
2000



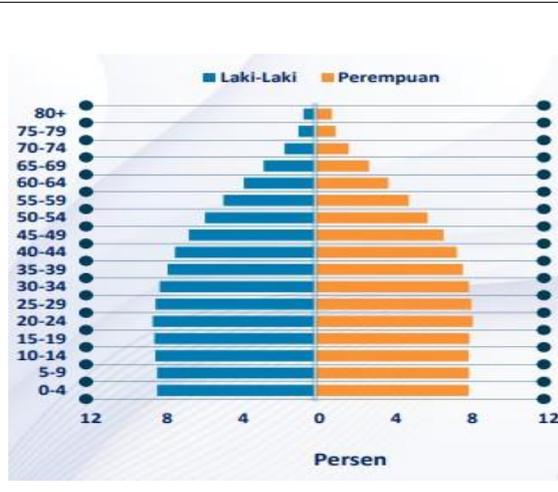
2010



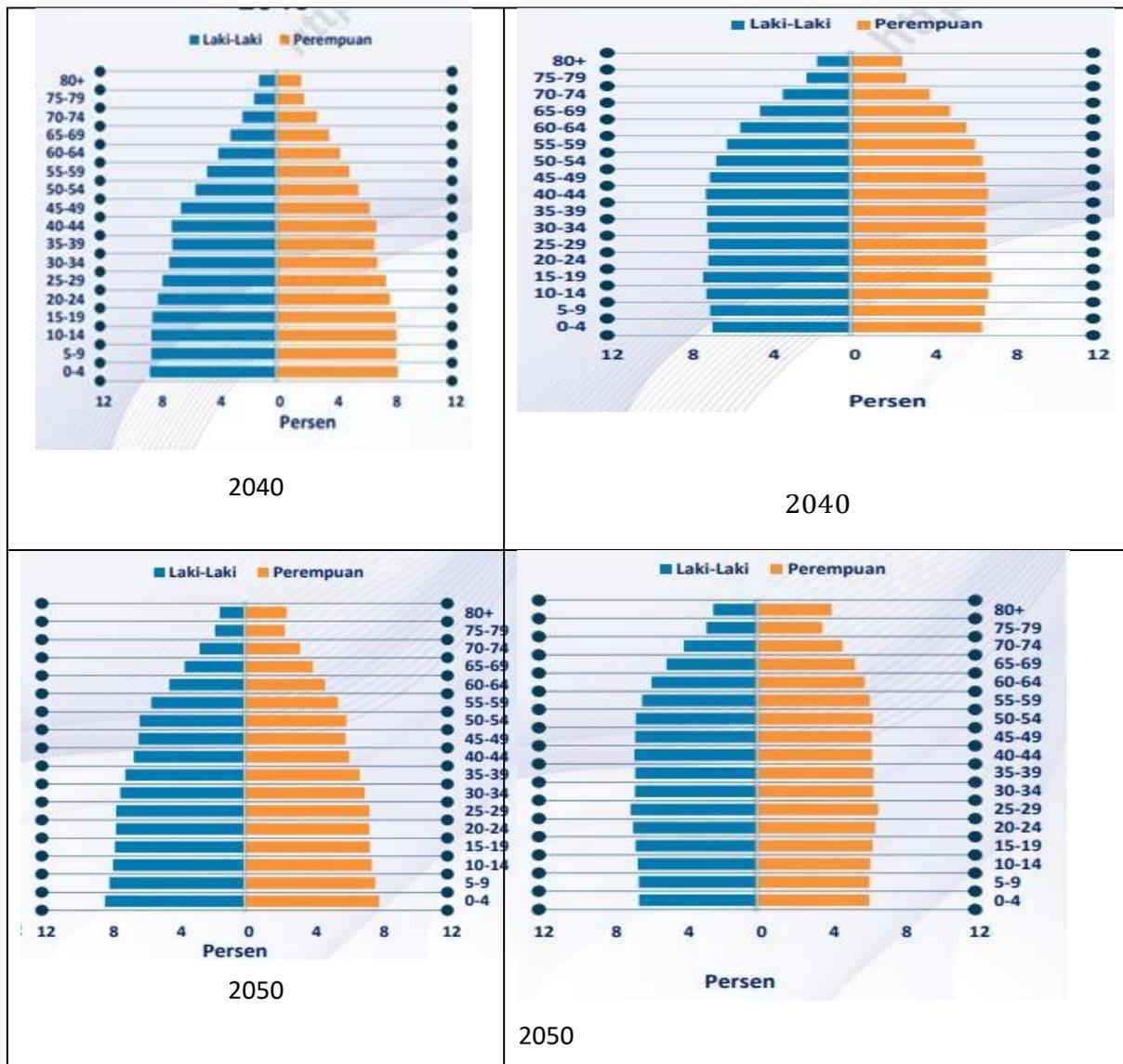
2010



2020



2020



Sumber: BPS (1974a, 1974b, 1983a, 1983b, 19921, 1992b, 2001a dan 2001b, 2023) www.bps.go.id (diolah).

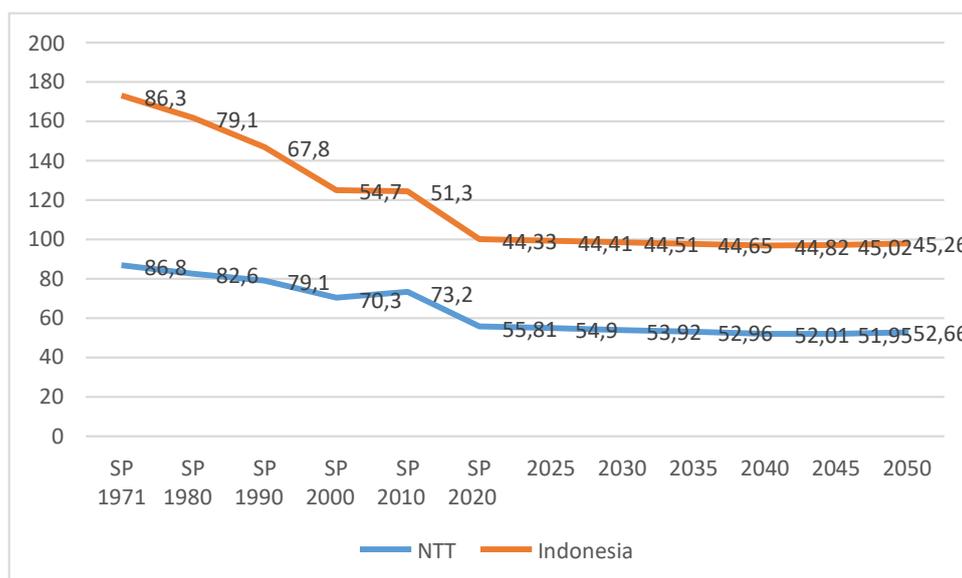
Berdasarkan struktur umur penduduk maka rasio ketergantungan umur (RKU) Provinsi Nusa Tenggara Timur turun dari 86,3 pada tahun 1971 menjadi 70,3 pada tahun 2000 dan kemudian meningkat menjadi 73,2 pada tahun 2010 (Gambar 5.13). RKU Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih rendah daripada RKU Indonesia pada tahun 1971. Akan tetapi, sejak tahun 1980, RKU Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih tinggi daripada RKU Indonesia, dengan perbedaan yang semakin meningkat, 3,5 poin pada tahun 1980 dan 21,9 poin pada tahun 2010.

Pada masa lalu penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur didominasi oleh penduduk laki-laki. Pada tahun 1971 terdapat 102 penduduk laki-laki per 100 penduduk

perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Gambar 5.14). Sementara itu, secara nasional terdapat lebih banyak penduduk perempuan daripada penduduk laki-laki (97 laki-laki per 100 perempuan), yang dapat disebabkan karena banyak laki-laki yang meninggal pada saat perang kemerdekaan. Akan tetapi, rasio jenis kelamin (RJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur kemudian menurun, yang dapat disebabkan karena migrasi keluar penduduk laki-laki, menjadi 98,7 pada tahun 2010. Sementara itu, RJK Indonesia terus meningkat menjadi 101,4 pada tahun 2010, yang dapat mengindikasikan perbaikan derajat kesehatan laki-laki di Indonesia.

Gambar 5.14

**Rasio Ketergantungan Umur: Nusa Tenggara Timur dan Indonesia 1971-2050
(penduduk usia tidak produktif per 100 penduduk usia produktif)**

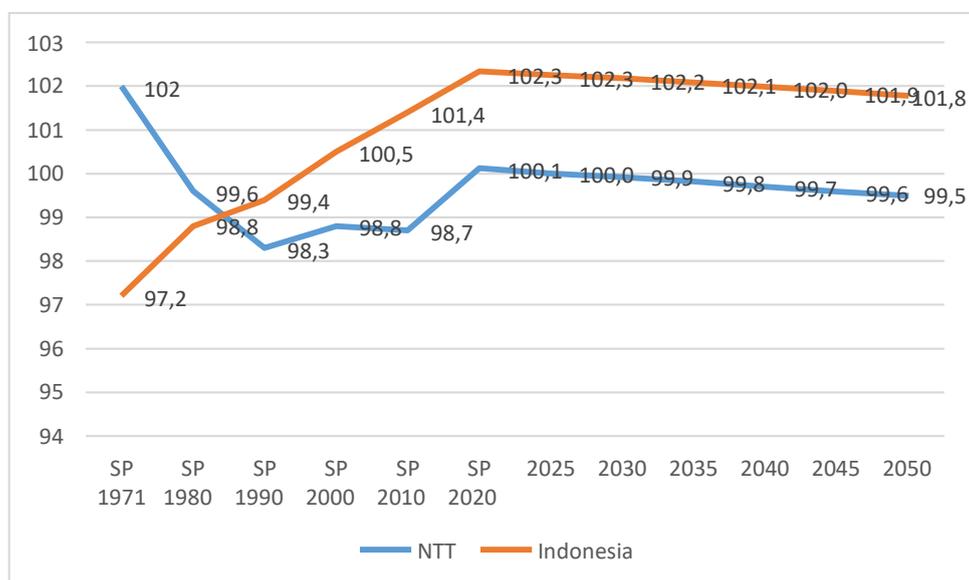


Sumber: BPS (1974a, 1974b, 1983a, 1983b, 19921, 1992b, 2001a dan 2001b, 2023); www.bps.go.id (diolah).

Pada tahun 1971 hanya enam dari 100 penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tinggal di wilayah perkotaan, sementara angka ini sekitar 17% untuk Indonesia (Gambar 2.15). Kemajuan pembangunan telah mengakibatkan peningkatan wilayah perkotaan dan penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan melalui pertumbuhan

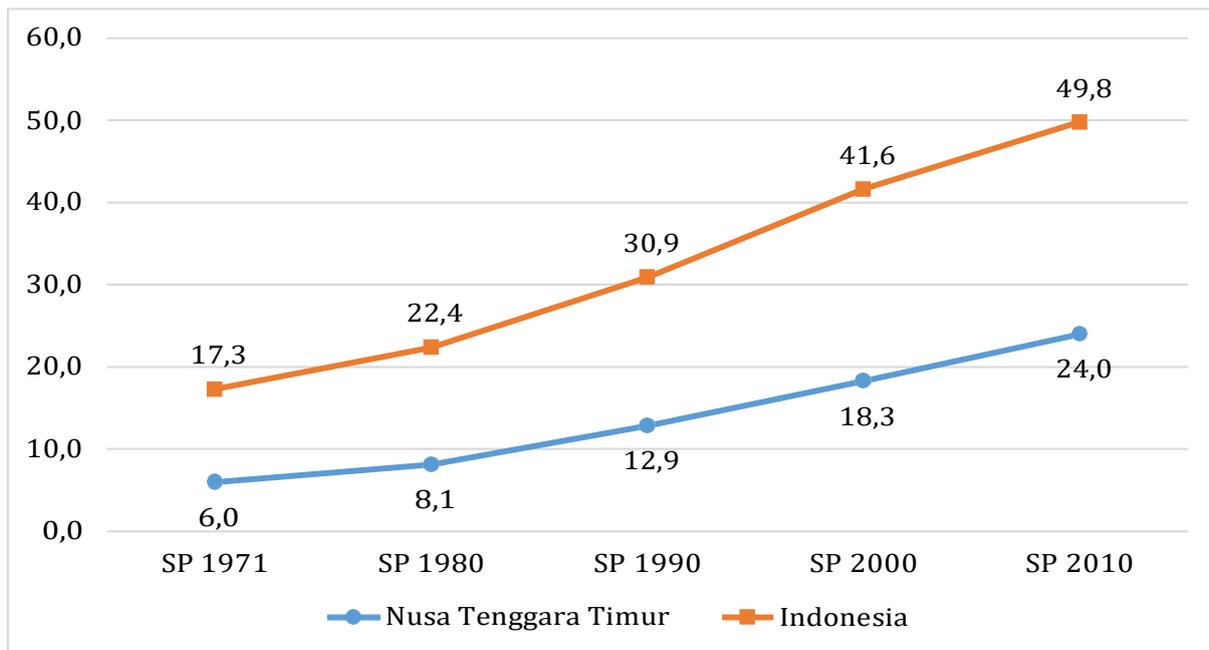
alamiah penduduk perkotaan, migrasi penduduk dari perdesaan ke perkotaan, dan reklasifikasi wilayah perdesaan menjadi wilayah perkotaan. Pada tahun 2010, penduduk perkotaan meningkat menjadi 24% di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 49,8% di Indonesia. Secara absolut, jumlah penduduk perkotaan Provinsi Nusa Tenggara Timur meningkat tujuh kali lebih banyak, sementara penduduk perkotaan Indonesia meningkat 5,8 kali lebih banyak.

Gambar 5.15
Rasio jenis kelamin: Nusa Tenggara Timur dan Indonesia 1971-2050
(laki-laki per 100 perempuan)



Sumber: BPS (1974a, 1974b, 1983a, 1983b, 19921, 1992b, 2001a dan 2001b); www.bps.go.id (diolah).

Gambar 5.16
Persentase penduduk perkotaan: Nusa Tenggara Timur dan Indonesia
1971-2010

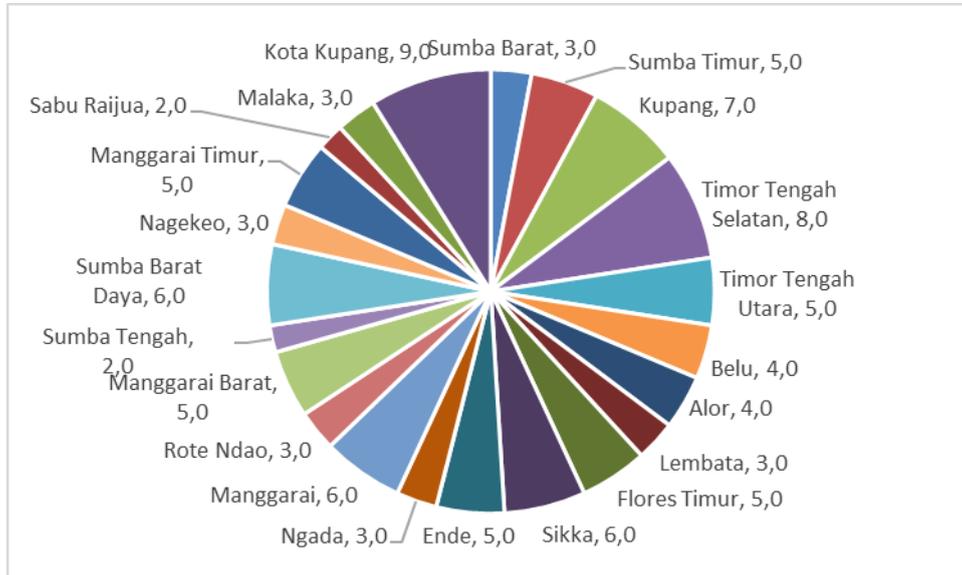


Sumber: BPS (1974a, 1974b, 1983a, 1983b, 1992a, 1992b, 2001a dan 2001b, 2023); www.bps.go.id (diolah).

Secara administratif, Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami perubahan yang signifikan selama periode 1971-2010. Jika pada tahun 1971 hanya ada 12 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka pada tahun 2010 ada 20 kabupaten dan satu kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti dapat dilihat pada Gambar 5.17, pada tahun 2022, penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur paling sedikit di Kabupaten Sumba Timur (4,5%) dan paling banyak di Kabupaten Manggarai (14%). Posisi Pulau Sumba yang secara geografis sulit dijangkau mungkin telah menyebabkan penduduk paling sedikit di Kabupaten Sumba Timur yang terletak di Pulau Sumba. Sementara itu, Kabupaten Manggarai yang terletak di Pulau Flores mungkin merupakan salah satu kabupaten yang relatif paling maju di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 sehingga penduduk paling banyak di Kota Kupang.

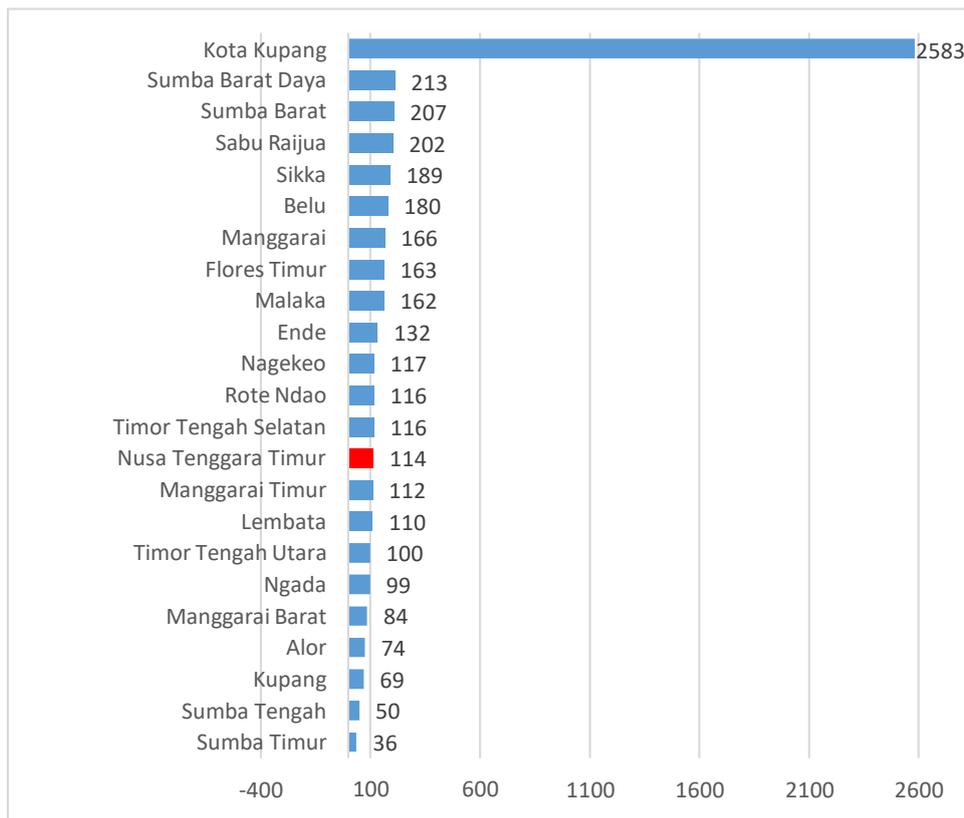
Gambar 5.17

**Distribusi persentase penduduk menurut kabupaten/kotamadya:
Nusa Tenggara Timur 2022**



Sumber: BPS (2023a) (diolah).

Pada tahun 2022, seperti dapat dilihat pada Gambar 5.18, penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur paling sedikit di Kabupaten Sumba Tengah (1,3%) dan paling banyak di Kabupaten Timor Tengah Selatan (9,4%). Seperti halnya Kabupaten Sumba Timur, posisi Pulau Sumba yang secara geografis sulit dijangkau mungkin telah menyebabkan penduduk paling sedikit di Kabupaten Sumba Tengah yang terletak di Pulau Sumba. Paling banyaknya penduduk di Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat disebabkan karena pemekaran kabupaten Manggarai yang penduduknya paling banyak pada tahun 2000, menjadi Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Manggarai Barat.



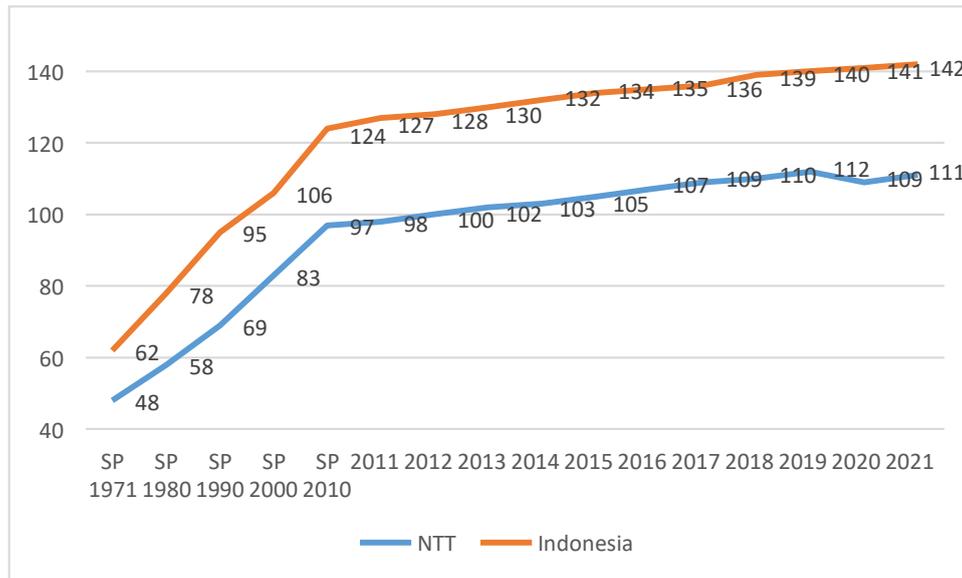
Sumber: BPS, 2023. Diolah

Gambar 5.18
Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023

Proses demografis telah mengakibatkan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih padat lebih dari dua kali lipat dari 62 penduduk per km² pada tahun 1971 menjadi 124 penduduk per km² pada tahun 2010 dan kemudian menjadi 142 penduduk per km² pada tahun 2022 (Gambar 5.19). Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi ke-15 paling padat di Indonesia, namun secara konsisten kepadatan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih rendah daripada kepadatan penduduk Indonesia. Kepadatan penduduk bervariasi secara nyata antarkabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gambar 5.19

Kepadatan penduduk: Nusa Tenggara Timur dan Indonesia 1971-2022

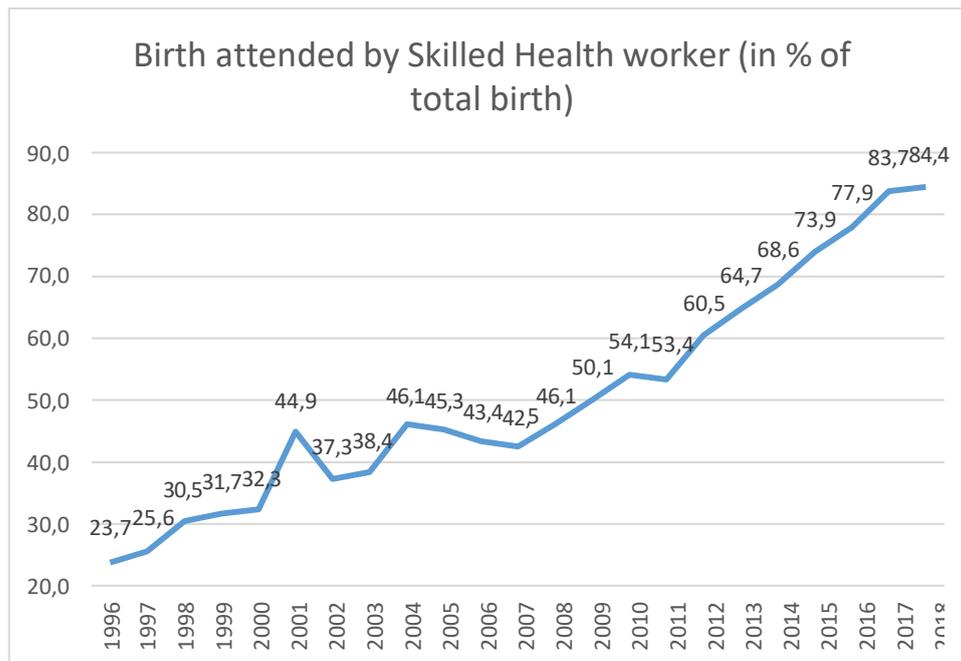


Sumber: BPS (1974a, 1974b, 1983a, 1983b, 19921, 1992b, 2001a dan 2001b, 2022); www.bps.go.id (diolah).

5.4. Situasi Keluarga Berencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program Keluarga Berencana berdampak signifikan pada pencapaian Bonus Demografi. Pada bagian ini dibahas situasi Keluarga Berencana dan Kesehatan Ibu di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada Gambar 5.20 disajikan data persentase kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih tahun 1996 – 2018. Pada tahun 1996 terdapat sebanyak 23,7% persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan angka ini naik menjadi sebesar 84,4% tahun 1996. Parameter kesahatan ini menjadi satu parameter terbukanya jendela kesempatan untuk memetic bonus demografi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Parameter ini harus terus ditingkatkan dan dilakukan dengan sungguh-sungguh melalui program pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun oleh Lembaga kemasyarakatan.



Sumber: World Bank, Indodapoer, 2023. Diolah

Gambar 5.20

Persentase Kelahiran yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Telatih di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 1996 -2018

Program keluarga berencana (KB) di Provinsi Nusa Tenggara Timur baru dimulai pada masa Orde Baru pada Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) III (1979-1984). Jumlah penduduk yang relatif sedikit, kurang dari dua persen dari penduduk Indonesia, merupakan salah satu alasan program KB baru dilaksanakan pada Repelita III di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur dikelompokkan dalam wilayah Luar Jawa dan Bali II dalam hal implementasi program KB nasional, bersama 10 provinsi lainnya (Riau, Jambi, Bengkulu, Timor Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya). Program KB nasional dilaksanakan pertama kali pada Repelita I (1969-1974) di enam provinsi di Jawa dan Bali (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali). Pada Repelita II (1974-1979) program KB nasional diperluas ke 10 provinsi di wilayah Luar Jawa dan Bali I (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan).

Pencapaian program KB nasional relatif lambat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal pengetahuan keluarga berencana, hasil SDKI 2012 (BPS dkk 2013)

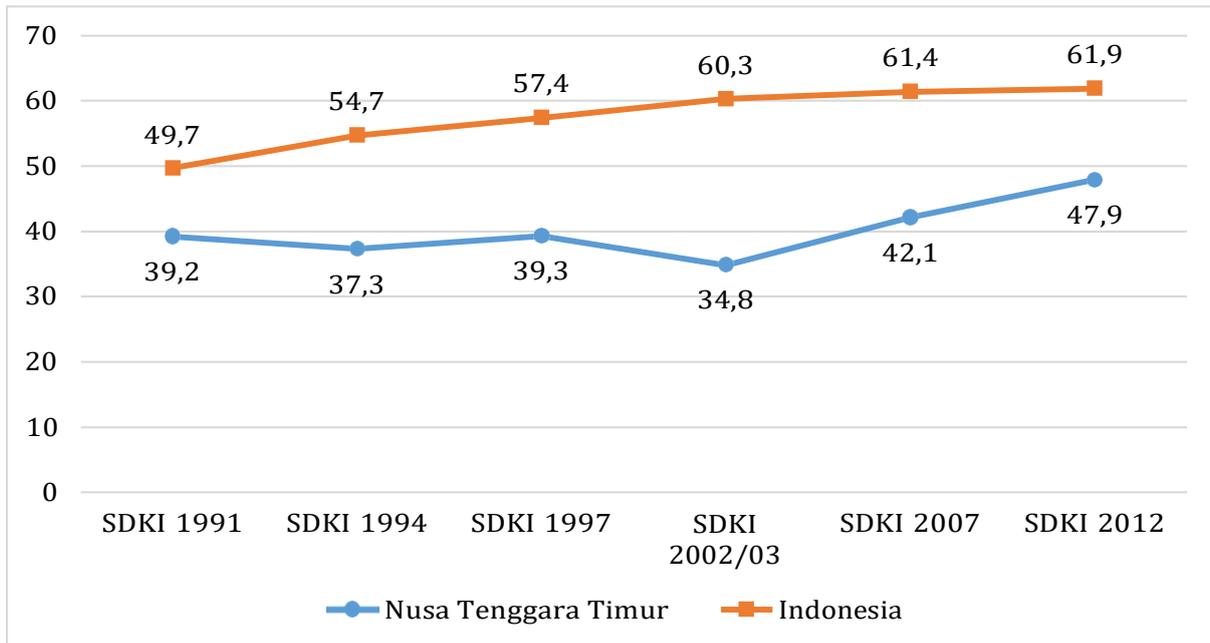
menunjukkan bahwa persentase perempuan usia 15-49 tahun yang mengetahui paling sedikit satu alat/cara KB di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih rendah daripada persentase perempuan usia 15-49 tahun yang mengetahui paling sedikit satu alat/cara KB nasional (94,7% versus 8%). Selanjutnya, persentase perempuan kawin usia 15-49 tahun yang tidak terpapar terhadap pesan KB melalui media massa (radio, televisi, koran/majalah, poster, atau pamflet) lebih tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur daripada di Indonesia (50,3% versus 45,8%).

Dalam hal pemakaian kontrasepsi, hasil SDKI 1991 – SDKI 2012 menunjukkan bahwa pemakaian kontrasepsi di kalangan perempuan kawin usia 15-49 tahun berfluktuasi dan cenderung meningkat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Gambar 5.21). Pada tahun 1991, 39% dari perempuan kawin usia 15-49 tahun di Provinsi Nusa Tenggara Timur ber-KB. Angka ini meningkat menjadi 48% pada tahun 2012. Akan tetapi, pemakaian kontrasepsi di kalangan perempuan kawin usia 15-49 tahun lebih rendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur daripada di Indonesia. Pada tahun 1991 pasangan usia subur (PUS) di Provinsi Nusa Tenggara Timur 1,5 kali kurang cenderung ber-KB daripada PUS Indonesia secara keseluruhan. Angka ini meningkat menjadi 1,8 kali pada tahun 2012. Artinya, kesenjangan ber-KB di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di Indonesia semakin besar.

Seperti halnya di Indonesia secara keseluruhan, hasil SDKI 2012 menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan kawin usia 15-49 tahun di Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan metode KB jangka pendek, terutama suntik KB (41,7%), diikuti dengan suatu cara tradisional (20%), terutama pantang berkala dan sanggama terputus (Gambar 5.21). Akan tetapi, perempuan kawin usia 15-49 tahun di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih cenderung memakai metode KB jangka panjang daripada perempuan Indonesia secara keseluruhan: 1,9 kali lebih cenderung disterilisasi KB, 1,5 kali lebih cenderung menggunakan IUD, dan 1,8 kali lebih cenderung menggunakan susuk KB.

Gambar 5.21

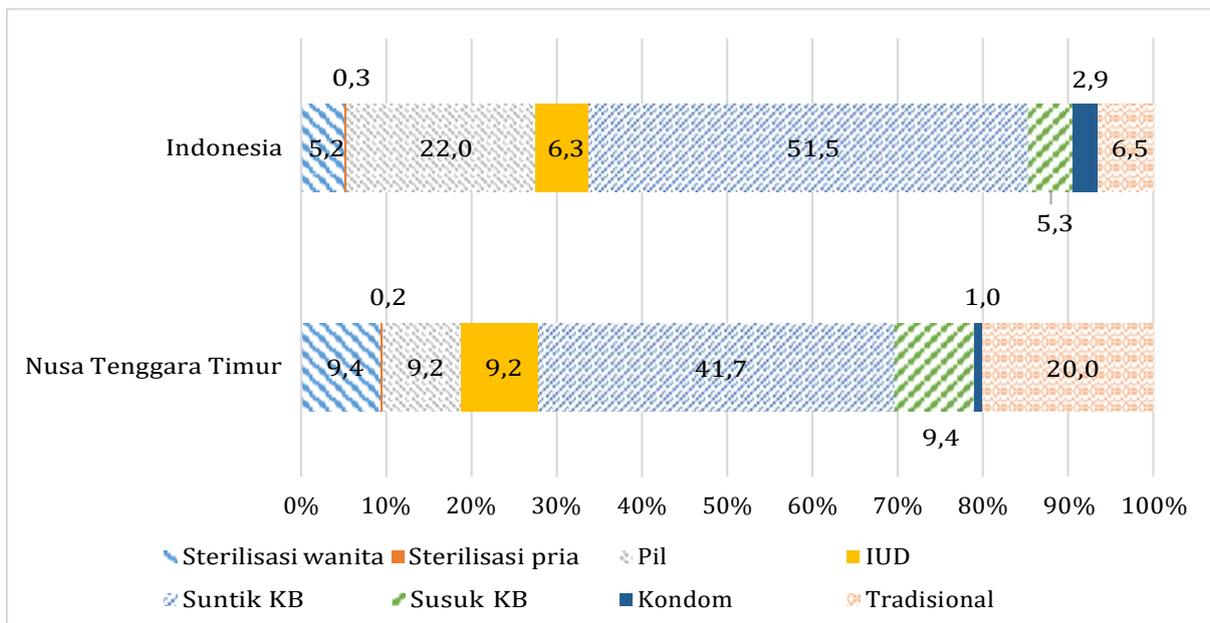
Angka prevalensi kontrasepsi: Nusa Tenggara Timur dan Indonesia 1991-2012



Sumber: Rajagukguk, 2018.

Gambar 5.29

Distribusi persentase pemakai kontrasepsi menurut metode kontrasepsi: Nusa Tenggara Timur dan Indonesia 2012

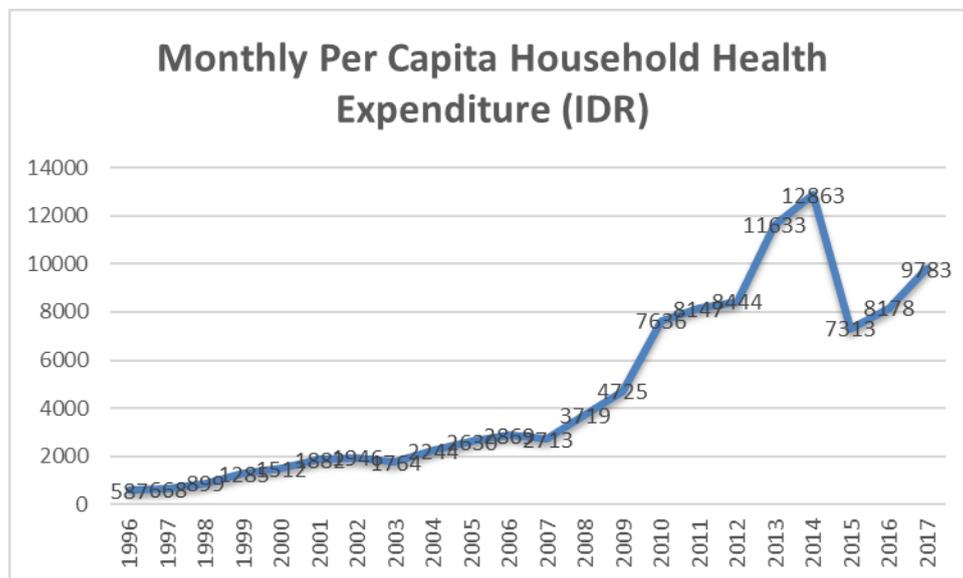


Sumber: Rajagukguk, 2018

5.5. Permasalahan Kependudukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya maka permasalahan kependudukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dikelompokkan menjadi permasalahan keluaran pembangunan, permasalahan proses demografis, dan permasalahan keluaran demografis. Dalam hal keluaran pembangunan, permasalahan yang dihadapi oleh penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah akses terhadap pendidikan, kesehatan, lingkungan yang sehat, sanitasi layak, sumber air minum bersih dan sumber energi yang rendah, bahkan dalam kasus tertentu jauh lebih rendah, dibandingkan penduduk Indonesia secara keseluruhan, serta tingkat kemiskinan yang tinggi, yang telah menyebabkan rendahnya pencapaian pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Salah satu permasalahan Kependudukan dan kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah rendahnya pengeluaran/belanja rumah tangga untuk kesehatan (Gambar 5.30). Angka ini pada tahun 1996 sebesar Rp. 587 dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 12.863. Angka ini turun menjadi Rp. 7.313 pada tahun 2015 dan menjadi Rp. 9.783 pada tahun 2017. Permasalahan kesehatan ibu dan bayi serta pencapaian bonus demografi di Provinsi NTT salah satu diakibatkan oleh rendahnya pengeluaran per kapita untuk kesehatan.



Sumber: World Bank, 2023. diolah

Gambar 5.30

Monthly Per Capita Health Expenditure, Provinsi NTT, 1996-2017

Dalam hal proses demografis, permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah tingkat kelahiran dan kematian yang relatif tinggi, migrasi neto negatif penduduk usia produktif serta migrasi masuk penduduk dari luar negeri. Dalam hal keluaran demografis, permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah pertumbuhan penduduk tinggi, rasio ketergantungan umur tinggi, lebih banyak penduduk perempuan, peningkatan penduduk perkotaan, dan persebaran penduduk yang tidak merata.

5.6. Permasalahan Keluarga Berencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Permasalahan Keluarga Berencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah prevalensi kontrasepsi relatif rendah, dominasi pemakaian metode KB jangka pendek, dan tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi. Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur juga melaporkan adanya masalah komplikasi berat dan kegagalan kontrasepsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB 6
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMANFAATAN BONUS DEMOGRAFI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

6.1. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Menuai Bonus Demografi

Berdasarkan permasalahan kependudukan dan keluarga berencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur maka kebijakan yang harus dilakukan dalam rangka optimalisasi penduduk usia produktif adalah penurunan tingkat kelahiran dan pengelolaan mobilitas penduduk. Strategi yang dapat dilakukan untuk penurunan tingkat kelahiran meliputi penguatan pelayanan keluarga berencana (KB), penyediaan layanan dan alat KB yang terjangkau, peningkatan prevalensi KB, peningkatan penggunaan metode KB jangka panjang, penurunan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, dan penanganan komplikasi berat dan kegagalan kontrasepsi. Strategi yang dapat dilakukan untuk pengelolaan mobilitas penduduk adalah penciptaan kesempatan kerja produktif, layak dan remuneratif, serta penanganan penduduk pendatang dari luar negeri.

Sumber daya manusia berkualitas merupakan faktor kunci untuk penurunan tingkat kelahiran dan pengelolaan mobilitas penduduk. Oleh karena itu, strategi yang juga harus dilakukan adalah peningkatan jaminan kesehatan, perluasan pendidikan menengah universal, peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi, peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan akses sumber energi, penurunan kemiskinan dan peningkatan perekonomian.

6.2. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Penduduk Usia Produktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan permasalahan ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur maka kebijakan yang harus dilakukan dalam rangka optimalisasi penduduk usia produktif adalah peningkatan pendidikan angkatan kerja, peningkatan kesempatan

kerja bagi angkatan kerja usia muda serta berpendidikan menengah dan tinggi, peningkatan keterampilan angkatan kerja di perkotaan, peningkatan produktivitas sektor pertanian, penurunan pekerja keluarga/tidak dibayar, dan penurunan kesenjangan penghasilan.

Setiap peningkatan pendidikan satu jenjang di Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdampak pada kenaikan upah/gaji/rata-rata sebesar Rp. 340.000 per bulan. Oleh karena itu, strategi peningkatan pendidikan angkatan kerja adalah dengan peningkatan pendidikan pekerja dengan mengupayakan agar semua pekerja mendapatkan pendidikan formal. Bagi pekerja yang mengalami hambatan mendapatkan pendidikan formal dengan kelompok usia sekolah, pemerintah dapat dan perlu mendorong mereka menempuh pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan pemerintah Republik Indonesia, yang telah mempunyai program pendidikan kesetaraan yang meliputi program Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA. Bagi tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tinggi dapat mengikuti perkuliahan melalui Universitas Terbuka. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga kerja dapat membangun Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan pendidikan (modal manusia) bagi pekerja yang kesulitan waktu menempuh pendidikan formal. Strategi pelatihan adalah dengan memperhatikan kebutuhan keahlian pada lapangan kerja yang tersedia dan juga perlu memberi pekerja dengan sertifikasi keahlian. Hal ini diperlukan agar pasar kerja dapat memberi imbalan yang sesuai atas keahlian dan spesifikasi pekerja tersebut.

Salah satu permasalahan yang dihadapi pekerja usia muda serta berpendidikan menengah dan tinggi adalah permintaan tenaga kerja yang rendah pada kelompok ini. Pemangku kepentingan perlu membangun dan mengarahkan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor jasa agar selaras dengan permintaan tenaga kerja pada angkatan kerja usia muda serta berpendidikan menengah dan tinggi. Selain itu, dari sisi permintaan tenaga kerja, sektor jasa menjadi faktor permintaan terbesar bagi pekerja dengan kualifikasi pendidikan menengah dan tinggi. Khusus untuk pekerja berusia muda, perlu dilakukan moneterisasi masyarakat, yaitu agar transaksi ekonomi dilakukan melalui pasar dan menggunakan uang.

Proporsi terbesar pekerja di perkotaan adalah buruh/karyawan/pegawai. Pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai adalah pekerja yang menuntut

keterampilan. Peningkatan keterampilan pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai merupakan suatu keharusan. Pemangku kepentingan harus mendorong agar pekerja di perkotaan mengikuti pendidikan melalui pendidikan formal dan pelatihan melalui pendidikan nonformal. Pendidikan formal dapat ditempuh dengan mengikuti pendidikan kesetaraan dan pendidikan nonformal dapat dilakukan dengan pelatihan bersertifikasi. Perlu juga didorong pembangunan pelatihan bersertifikasi yang dilakukan pemerintah bersama-sama dengan asosiasi serikat pekerja sektoral. Misalnya, pemerintah perlu memberi kualifikasi standar (standarisasi pekerja pada keahlian mengelas logam atau pekerja pada keahlian kecantikan). Setiap jenjang keahlian dapat diberi sertifikat.

Salah satu ciri sektor pertanian di negara berkembang adalah produktivitas yang rendah. Hal yang sama terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini terjadi karena sektor pertanian dikelola secara tradisional oleh keluarga dan pada lahan yang dimiliki secara turun temurun. Rendahnya produktivitas juga diakibatkan teknologi pertanian yang diwarisi secara turun temurun. Untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, sektor ini perlu dikelola menurut hukum pasar, dengan teknologi yang dikembangkan. Pemangku kepentingan perlu bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mencari teknologi pertanian yang tepat. Teknologi pertanian diperlukan untuk menentukan komoditas pertanian unggulan lokal dan juga metode pertanian agar produktivitas maksimal. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu menciptakan permintaan pasar yang baik agar petani mau belajar dan bersedia meningkatkan produksi pertaniannya. Produk pertanian perlu diberi akses ke pasar agar produksi pertanian dapat mempunyai nilai ekonomi yang baik. Setiap petani sebagai produsen perlu dilindungi dan diberi akses ke pasar, agar produk pertanian dapat mempunyai nilai tambah yang baik. Pemerintah perlu membentuk dan memberdayakan Badan Urusan Logistik dan juga Badan Pengendali Inflasi Daerah untuk membeli produk pertanian jika hasilnya melebihi permintaan pasar sebagai akibat musim produksi.

Terlihat bahwa pada semua kelompok umur pekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat pekerja rumah tangga/tidak dibayar. Khusus untuk pekerja berusia muda proporsi yang bekerja pada keluarga/tidak dibayar sangat besar, lebih dari setengah. Strategi optimalisasi pekerja menurut kelompok umur dan sektor pekerjaan adalah mendorong pemangku kepentingan agar pekerja ini dimonetarisasi.

Pekerja tersebut perlu dan harus bekerja melalui pasar tenaga kerja dan diberi upah berupa uang.

Kesenjangan penghasilan merupakan salah satu yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama diakibatkan oleh besarnya proporsi pekerja pada keluarga dan tidak dibayar dan juga besarnya proporsi pekerja pada sektor pertanian (tradisional). Pekerja keluarga/tidak dibayar tidak mendapat penghasilan berupa uang. Pekerja di sektor pertanian mempunyai produktivitas rendah. Kedua sektor inilah yang perlu diberi penghasilan yang layak dan sesuai agar kesenjangan penghasilan dapat diturunkan. Untuk menurunkan kesenjangan penghasilan, pemangku kepentingan perlu mendorong pasar tenaga kerja berlaku bagi semua tenaga kerja agar pekerja keluarga/tidak dibayar mendapat penghasilan sesuai dengan mekanisme pasar tenaga kerja. Selanjutnya, dengan modernisasi sektor pertanian menjadi industri pertanian, maka pekerja di sektor pertanian dapat berpindah ke sektor industri yang memberi penghasilan yang lebih baik.

Kebijakan peningkatan kesempatan kerja dapat dilakukan dengan peningkatan investasi. Gambar 3.27 memperlihatkan hubungan antara Investasi (Rp. Juta) dan Kesempatan Kerja (orang) di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2001-2013. Setiap penambahan investasi sebesar Rp. 1 juta akan mengakibatkan peningkatan atau penyerapan tenaga kerja sebanyak 0,036 orang. Artinya, jika dalam kurun waktu 2001-2013 dilakukan investasi sebesar Rp. 1 miliar, dalam jangka panjang akan menyerap tenaga kerja sebanyak 36 orang. Dengan demikian, pemangku kepentingan perlu terus menerus menarik investasi agar penduduk usia produktif dioptimalkan di Provinsi Provinsi Nusa Tenggara. Pemerintah perlu mengadakan pembangunan infrastruktur dan mengajak, mendorong, memfasilitasi pihak swasta untuk berinvestasi.

BAB 7

PENUTUP

Hasil kajian “Pertumbuhan Ekonomi dengan memanfaatkan Bonus Demografi di Provinsi Nusa Tenggara Timur” masih memperlihatkan bahwa permasalahan kependudukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah (masih) pertumbuhan penduduk yang tinggi, kelahiran tinggi, prevavlensi KB yang rendah.

Peluang memanfaatkan bonus demografi di Nusa Tenggara Timur terbuka mengingat sebagian besar kabupaten/kota masih berada pada pra dan awal bonus demografi. Provinsi Nusa Tenggara Timur memerlukan program pemanfaatan bonus demografi agar angka pertumbuhan ekonomi jangka panjang diraih dengan gemilang.

“Pertumbuhan Ekonomi dengan memanfaatkan Bonus Demografi di Provinsi Nusa Tenggara Timur” menunjukkan bahwa permasalahan kependudukan dan keluarga berencana (KB) di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingkat kelahiran yang tinggi, prevalensi KB yang rendah, dominasi metode KB jangka pendek, serta kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi yang tinggi. Permasalahan ketenagakerjaan meliputi dominasi angkatan kerja perdesaan dan berpendidikan rendah, pengangguran tinggi pada angkatan kerja usia muda, berpendidikan menengah dan tinggi dan di perkotaan, dominasi lapangan pekerjaan pertanian, dominasi pekerja keluarga/tidak dibayar dan kesenjangan penghasilan.

Rekomendasi kebijakan untuk penanganan permasalahan kependudukan dan keluarga berencana (KB) di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah penurunan tingkat kelahiran dan pengelolaan mobilitas penduduk. Rekomendasi kebijakan untuk penanganan permasalahan ketenagakerjaan dalam rangka memetik bonus demografi adalah optimasi penduduk usia produktif adalah peningkatan pendidikan angkatan kerja, peningkatan kesempatan kerja bagi angkatan kerja usia muda serta berpendidikan menengah dan tinggi, peningkatan keterampilan angkatan kerja di perkotaan, peningkatan produktivitas sektor pertanian, penurunan pekerja keluarga/tidak dibayar, dan penurunan kesenjangan penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2020a. Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2000. Jakarta, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2020b. Penduduk Nusa Tenggara Timur Hasil Sensus Penduduk 2000. Jakarta, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Penduduk Indonesia Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2015. Jakarta, Indonesia. Jakarta, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2020a. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2016. Jakarta, Indonesia. Jakarta, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2016b. Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2016. Jakarta Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2023a. Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2020. Jakarta, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik.2023b. Penduduk Nusa Tenggara Timur Hasil Sensus Penduduk 2020. Jakarta, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Departemen Kesehatan dan ORC Macro. 2003. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2002-2003. Jakarta, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Departemen Kesehatan dan ORC Macro. 2003. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2002-2003. Jakarta, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Departemen Kesehatan dan Macro International. 2008. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007. Jakarta, Indonesia.
- Rajagukguk, W., Omas Bulan Samosir, Brigitte Inez Maitimo, Oktavianus Porajow, Dahamiaz Arnold Koda, dan Yacobus Yakob. 2015. Fakta dan Prospek Pemanfaatan Jendela Kesempatan Demografis: Suatu Studi Banding di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur. Karya Tulis Ilmiah. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Jakarta, Indonesia.
- Rajagukgul, W., 2018. Optimalisasi Penduduk Nusa Tenggara Timur, UKI Press
- Rajagukguk W. 2023. The demographic and economic features: the nexus with internet use, Heliyon, Netherland.
- Samosir, O.B. 2019. Kabupaten menurut Jenis Bonus Demografi. Lembaga Demografi FEB UI. Tidak diterbitkan.

Samosir, O.B. 2023. Demografi sebagai Ilmu dan untuk Kesejahteraan Umat Manusia. Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Indonesia.

United Nations. 1995. Report of the International Conference on Population and Development. Cairo, 5-13 September 1994. New York, USA.

United Nations (UN). 2015. World Population Prospects: The 2015 Revision. Department of Economic and Social Affairs, Population Division.

ntt.bps.go.id

sp2010.bps.go.id

www.bps.go.id

SP2020.bps.go.id.